

**STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA
MANDIRI PANGAN DI DESA MUNTUK, KABUPATEN BANTUL**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**AGUS MULYONO
L4D007001**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA MANDIRI
PANGAN DI DESA MUNTUK KABUPATEN BANTUL**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

AGUS MULYONO
L4D007001

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 3 Desember 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 3 Desember 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ing. Asnawi Manaf, ST

Landung Esariti, ST, MPS

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.

Sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 4 Desember 2008

Penulis,

AGUS MULYONO

L4D007001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Studi Partisipasi masyarakat Pada Program Desa Mandiri pangan Di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan dan menempuh Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro, Semarang.

Selesainya tesis ini tidak lepas dari peranan dan dukungan yang telah diberikan, dan pada kesempatan yang berbahagia ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc. selaku Ketua Program
2. Bapak Dr. Ing. Asnawi Manaf, ST selaku pembimbing utama.
3. Ibu Landung Esariti, ST, MPS selaku pembimbing pendamping.
4. Ibu Ir. Artiningsih, MT selaku pembahas.
5. Ibu Dr. Ari Pradanawati selaku pembahas.
6. Istri dan anak-anak, keluarga yang sangat saya cintai dan banggakan: Hatmatri Dewi Febriani, SE, Ak, Dania Shinta Nurizky, Fachrizal Rama Aulia yang telah memberikan semangat, dukungan, doa dan waktunya.
7. Pimpinan dan jajaran PUSBINDIKLATREN BAPENAS Di Jakarta.
8. Rekan-rekan kerja di Dinas Pertanian Propinsi DI. Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan dorongan.
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa MTPWK Kelas Bapenas IV Angkatan 2008.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu mohon kritik dan saran untuk kesempurnaannya. Terima kasih.

Semarang, 4 Desember 2008

Penulis

Agus Mulyono

2.2. Partisipasi Masyarakat Pada Program Pembangunan	33
2.3. Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif	42
2.4. Rumusan Kajian Teori	43
BAB III	
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PROGRAM	
3.1. Kondisi Desa Muntuk, Kabupaten Bantul	48
3.1.1. Letak dan Lokasi	48
3.1.2. Kondisi Masyarakat..... Karakteristik	51
3.1.3. Kondisi Partisipasi Masyarakat Desa Muntuk	54
3.2. Program Desa mandiri pangan	56
3.3. Ringkasan	74
BAB IV STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA MUNTUK, KABUPATEN BANTUL	
4.1. Identifikasi Program Desa Mandiri Pangan Tahap Persiapan dan Penumbuhan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul	76
4.2. Kajian Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul	96
4.3. Evaluasi Tujuan dan Pencapaian Program Desa mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul	114
BAB V	
PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	120

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Hubungan Antara Analisis, Data dan Variabel	14
Tabel I.2	Jabaran Kriteria Peran Dalam Tingkatan Partisipasi	16
Tabel I.3	Jenis dan Jumlah Narasumber	21
Tabel II.1	Rangkuman Kajian Teori	45
Tabel III.1	Jumlah Penduduk Desa Muntuk Menurut Umur.....	45
Tabel III.2	Jumlah Penduduk Desa Muntuk Menurut Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel IV.1	Identifikasi Program Desa Mandiri Pangan Tahap Persiapan Dan Penumbuhan Di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul	45
Tabel IV.2	Tanggapan Dan Usulan Program Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa muntuk, Kabupaten Bantul	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir	11
Gambar 1.1	Kerangka Analisis	13
Gambar 3.1	Peta Administrasi Desa Muntuk.....	49
Gambar 3.2	Peta Kelerengan.....	50
Gambar 3.3	Gotong-royong Masyarakat Desa Muntuk.....	55
Gambar 3.4	Perencanaan Program Desa mandiri Pangan.....	58
Gambar 3.5	Pendampingan.....	64
Gambar 3.6	Kelompok Afinitas Kerajinan.....	65
Gambar 4.1	Struktur Lembaga Pengambil Keputusan/Organisasi LKD.....	87
Gambar 4.2	Struktur Lembaga Pelaksana/Organisasi Kelompok Afinitas.....	88

ABSTRAK

Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan mengalami kerawanan pangan. Kerawanan pangan terjadi manakala rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Selama ini sudah banyak program-program pembangunan yang mengarah pada upaya mengatasi kerawanan pangan, namun pada sebagian besar program kurang/tidak mempertimbangkan peran serta dan partisipasi masyarakat setempat dalam operasional pelaksanaan program sehingga dukungan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program tidak muncul yang berimbas pada capaian program yang kurang maksimal.

Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul adalah program pembangunan yang bersifat partisipatif yang mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat secara aktif pada setiap tahapan kegiatan, yang mengarah pada pendekatan pembangunan top down dan bottom up. Walaupun belum tentu juga program pembangunan partisipatif akan berhasil dalam pelaksanaannya, sehinggau diperlukan suatu penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul, sehingga dapat direkomendasikan suatu pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan yang baik dan partisipatif

Lingkup wilayah penelitian adalah Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang merupakan desa rawan pangan serta mempunyai potensi penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Desa mandiri pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan..

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yang menggunakan beberapa tahapan setelah data terkumpul, yang meliputi tahapan reduksi data dan penyajian data sebelum dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Identifikasi dan kajian yang dilakukan terhadap materi program desa mandiri pangan pada tahap persiapan dan penumbuhan, dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan program telah dilaksanakan secara logis dan sistematis yang dimulai dari sosialisasi, penyusunan data dasar desa, penyusunan rencana pembangunan desa dilanjutkan dengan pendampingan, pelatihan, pembentukan kelompok fasilitator dan pemberdayaan kelompok afinitas tapi masih terdapat permasalahan administrasi khususnya dalam seleksi dan penetapan lokasi desa yang terlambat berakibat sedikit banyak pada operasional kegiatan selanjutnya.

Pada kajian partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan, terdapat beberapa tanggapan dan usulan program dari masyarakat berkaitan dengan penyatuan model pengelolaan manajemen program yang diharapkan berbeda dengan program-program yang ada sebelumnya serta kepastian keberlanjutan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan berada pada tingkatan partnership sesuai dengan tingkatan partisipasi Arstein dimana partisipasi mendapat tempat dan apresiasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Masyarakat merasa bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pelibatan masyarakat sangat besar serta ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas di dalamnya antara masyarakat dan pemerintah serta tidak ada intervensi terlalu jauh dari pemerintah serta tidak dimungkinkan adanya keputusan sepihak

ABSTRACT

Needy have high risk and chance in getting lack of food. Lack of food is happen when household, society, and some areas have not enough food to meet the demand of physiology standard requirements for individual growth and health. As long as now there are many development programs that directed to solve the lack of food problem, but most of the programs are not consider the role and participation of local people in operational process so that the support from the local people does not appear. It makes the achievement is not maximum yet.

Food Independent Village Program at Muntuk Village, Bantul is a participative development program that mandating the involvement of people actively in every activity stages that directed to top down and bottom up development approach. Although there is no guaranty that the program will be succeed, so the research about the participation of people in Food Independent Village Program at Muntuk Village, Bantul is needed. The purpose is to make the better and more participative program can be recommended.

Coverage area research is Muntuk Village, Dlingo Subdistrict, Bantul Regency. Muntuk Village is high risk lack of food village and it potential to make the quality of human resources is low. Food Independent Village is a village that the people have ability to create food and nutrient tenacity so that they could live healthy and productive, through this food tenacity development system that includes supply, distribution, and consumption subsystem by using local resources continuously.

Analytical technique used in this research is qualitative analytical. It is use some steps after data collected, that is include data reduction and data presentation before the conclusion/ verification.

From the identification and presentation result to the material of Food Independent Village Program in preparation and development stages, it can be conclude that steps of program implementation has been implemented logically and systematically from the socialization, arrangement of village database, arrangement of village development plan continued with contiguous, training, forming of facilitator group, and using of affinity group, but there is still some administration problems especially when the late of selection and village location establishment that influence the next operational activities.

Whereas in people participation study of Food Independent Village Program, there are some responses and suggestions from local people related to unity of program management controlling model which is expected different from other programs before and also the continuous Food Independent Village Program at Muntuk Village, Bantul. People participation in this program is in partnership level appropriate with Arstein participation which the participation take place and people appreciation formed into good support in planning, actuating, and evaluating level. People think that in every implementation steps there is so much people participation and there is a clear description of job and authority between people and government and there is no too much intervention from government and unilateral decision.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks, terdiri dari: subsistem ketersediaan terkait dengan upaya untuk peningkatan produksi pangan; subsistem distribusi tentang keberadaan pangan yang merata dan terjangkau di masyarakat, dan subsistem konsumsi tentang kecukupan pangan yang dikonsumsi masyarakat baik dalam jumlah maupun mutunya. Dinamika dan kompleksitas tersebut menyebabkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, yang perlu diantisipasi dan diatasi, melalui kerja sama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan. Berbagai upaya yang dilakukan tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal, meliputi : aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Pemerintah sangat berperan dalam menyediakan prasarana sosial-ekonomi. Disamping itu, sistem pemerintahan otonomi daerah telah menyebabkan penurunan

intensitas dukungan dan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang pangan. Pada banyak daerah, penyediaan prasarana usaha pertanian di pedesaan, pelayanan sarana produksi, teknologi, permodalan dan pemasaran kurang menjadi prioritas, sebaliknya tekanan berbagai pungutan di daerah semakin meningkat untuk pemasukan pendapatan daerah. Hal ini tidak hanya menyebabkan biaya tinggi yang mengurangi daya saing produk pangan domestik, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat terhadap pangan.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang rawan pangan serta rentan terhadap masalah kerawanan pangan masih cukup tinggi. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah rendahnya pendapatan masyarakat miskin yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan; serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha mikro. Tantangan utama dalam pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengatasi masalah pangan yang terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan tahun 2000-2004 telah menampakkan hasilnya dengan berkurangnya penduduk miskin, dari 38,7 juta jiwa (19,1 persen) pada tahun 2000 dan menurun menjadi 36,1 juta jiwa (16,7 persen) pada tahun 2004. Meskipun jumlah kemiskinan secara absolut menurun, tetapi angka

pengangguran di Indonesia cenderung naik. Jumlah pengangguran bertambah dari 9,13 juta pada tahun 2002 menjadi 9,67 juta jiwa pada tahun 2004. Sebagian besar dari penduduk miskin ini berada di pedesaan yang menggantungkan hidupnya sebagian besar dari sektor pertanian. Jumlah penduduk di sektor pertanian menempati proporsi 55 persen dari total penduduk miskin, yang meliputi antara lain sekitar 75 persen diantaranya pada subsektor tanaman pangan, 7,4 persen pada perikanan laut, dan 4,6 persen pada peternakan dan sisanya pada lain-lain (pertanian terpadu) (BPS, 2004).

Penduduk miskin ini memiliki resiko tinggi dan rentan mengalami kerawanan pangan. Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini maka akan berdampak meningkatkan kemiskinan/kerawanan pangan dan status gizi yang rendah. Kerawanan pangan terjadi manakala rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Kerawanan pangan dibedakan atas kerawanan kronis, yaitu yang terjadi terus menerus karena ketidakmampuan membeli atau memproduksi pangan sendiri, dan kerawanan sementara yang terjadi karena kondisi tak terduga seperti bencana alam atau bencana

lainnya. Kerawanan pangan, apabila terjadi terus menerus, akan berdampak pada penurunan status gizi dan kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas maka salah satu fokus pembangunan pada saat ini diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu program pembangunan ketahanan pangan masyarakat adalah penurunan tingkat kemiskinan pedesaan dan pemenuhan kebutuhan pangan sampai tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, serta dikembangkan mulai tingkat rumah tangga. Bila setiap rumah tangga sudah mencapai ketahanan pangan maka secara otomatis ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional akan tercapai.

Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan mengartikan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui:

a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Operasionalisasi pelaksanaan PP No. 68 tahun 2002 tersebut pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang

berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat pedesaan dengan fokus utamanya adalah rumah tangga pedesaan.

Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan perdesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Disamping itu membangun daerah pedesaan sangat penting terutama dalam hal penyediaan bahan pangan untuk penduduk, penyedia tenaga kerja untuk pembangunan, penyedia bahan baku untuk industri, dan penghasil komoditi untuk bahan pangan dan ekspor. Karena itu, desa merupakan salah satu *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan di pedesaan adalah melalui Program Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari kehari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk

mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan selama 4 (empat) tahap berturut-turut melalui 4 tahapan pelaksanaan yaitu: tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Tiap tahapan memuat berbagai macam kegiatan dengan waktu pelaksanaan tiap tahapan adalah selama satu tahun. Kegiatan difokuskan di daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang telah ada di tingkat desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat tahun berturut-turut mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian.

Beberapa pendekatan yang diperlukan dalam pengembangan dan pembangunan Desa Mandiri Pangan adalah: 1.) Pemberdayaan masyarakat, adalah gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian proses sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan perubahan lebih baik untuk mencapai kesejahteraan. Proses ini dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat agar mampu menganalisis kebutuhannya berdasarkan situasi perikehidupan dan masalah-masalahnya. 2.) Penguatan Kelembagaan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan kelembagaan pangan antara lain: didasarkan pada kebutuhan masyarakat sebagai pelaku, disesuaikan dengan sistem pemerintahan desa atau lembaga yang sudah

ada, diarahkan pada upaya merevitalisasi kelembagaan tani yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi kelembagaan pangan sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk pertanian, sebagai sarana belajar efektif bagi petani untuk meningkatkan kemampuan, diarahkan kepada pengembangan kapasitas kerjasama internal maupun kerjasama eksternal dengan kelembagaan lain. Kelembagaan yang ditumbuhkan dan diperkuat melalui kegiatan pemberdayaan antara lain: kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan. 3.) Sistem ketahanan pangan, terdiri dari subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan ketiga subsistem tersebut. Keberhasilan pembangunan ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya. Disamping itu, perlu juga didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti kebijakan, peraturan, pembinaan, dan pengawasan.

Berdasarkan Sutrisno (1995: 35), dalam pembangunan partisipatif maka peran pemerintah pada umumnya sebagai fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Fasilitasi tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, maupun batasan-batasan normatif lain. Disamping itu fasilitasi dapat berupa tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil. Peran swasta biasanya pada segi operasionalisasi dan implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil maupun sumbangan dana, alat atau teknologi. Sedangkan peran masyarakat pada umumnya sebagai partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya sasaran wilayah Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang merupakan desa rawan pangan serta mempunyai potensi penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Seleksi sasaran lokasi didasarkan atas pemetaan daerah rawan pangan FIA (*Food Insecurity Atlas*) tahun 2005 dengan peta warna merah adalah lokasi sasaran. Proses penetapan lokasi dan tahapan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan masih bersifat *top-down*. Artinya Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul berasal dari pemerintah, sedangkan partisipasi masyarakat sebagai masukan untuk mendapatkan dukungan pelibatan masyarakat belum sepenuhnya muncul. Dalam hal ini partisipasi masyarakat setempat belum secara maksimal diperhatikan dalam penetapan lokasi dan operasional pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul, sehingga dapat direkomendasikan suatu pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan yang perlu dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul adalah program pembangunan yang bersifat partisipatif yang mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat secara aktif pada setiap tahapan kegiatan, yang mengarah pada bertemunya pendekatan pembangunan *top down* dan *bottom up*. Secara riil operasional program baik dalam penentuan lokasi dan operasional awal pelaksanaan program terdapat senjang karena masih menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* dalam

artian, proses perencanaan, penentuan lokasi, penentuan tahapan kegiatan dan pelaksanaan program awal belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat berupa tinjauan dan komentar terhadap program merupakan peran yang paling sederhana dari masyarakat belum muncul, sehingga dikhawatirkan dukungan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program tidak akan muncul yang berimbas pada capaian program yang kurang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang diangkat akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu: "Sejauhmana partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul".

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian sejauhmana partisipasi masyarakat terkait dengan keberadaan program desa mandiri pangan tahap persiapan dan penumbuhan di Desa Munthuk, Kabupaten Bantul.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengidentifikasi program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.
2. Mengkaji partisipasi masyarakat pada operasional program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.
3. Melakukan evaluasi tujuan dan pencapaian program desa mandiri pangan di Desa

Muntuk, Kabupaten Bantul

4. Mencari alternatif pemecahan masalah pelaksanaan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Untuk lebih memfokuskan penelitian sehingga dapat menghasilkan keluaran yang optimal, diambil wilayah penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wilayah Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang merupakan lokasi pelaksanaan program desa mandiri pangan.
2. Terjadi proses pemberdayaan dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan.

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi yang dapat dikembangkan menjadi variabel dalam metodologi penelitian ini mencakup:

1. Identifikasi program desa mandiri pangan tahap persiapan dan penumbuhan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

Dalam Identifikasi ini membandingkan pedoman program desa mandiri pangan kondisi riil di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul terutama pelaksanaan program pada tahap persiapan dan penumbuhan.

2. Kajian partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

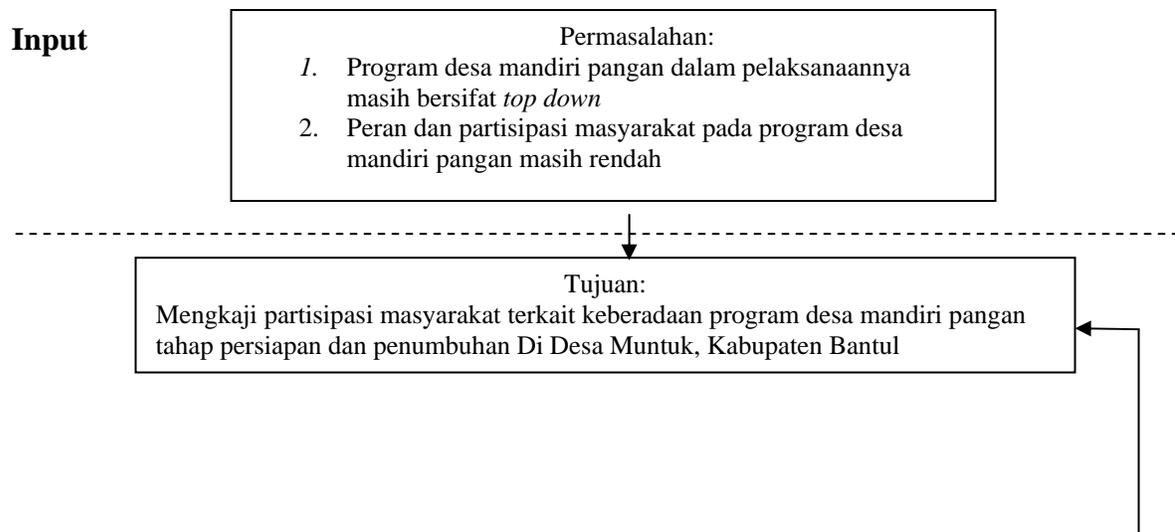
Kajian ini mengkaji partisipasi masyarakat terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul serta usulan program yang harus dilakukan.

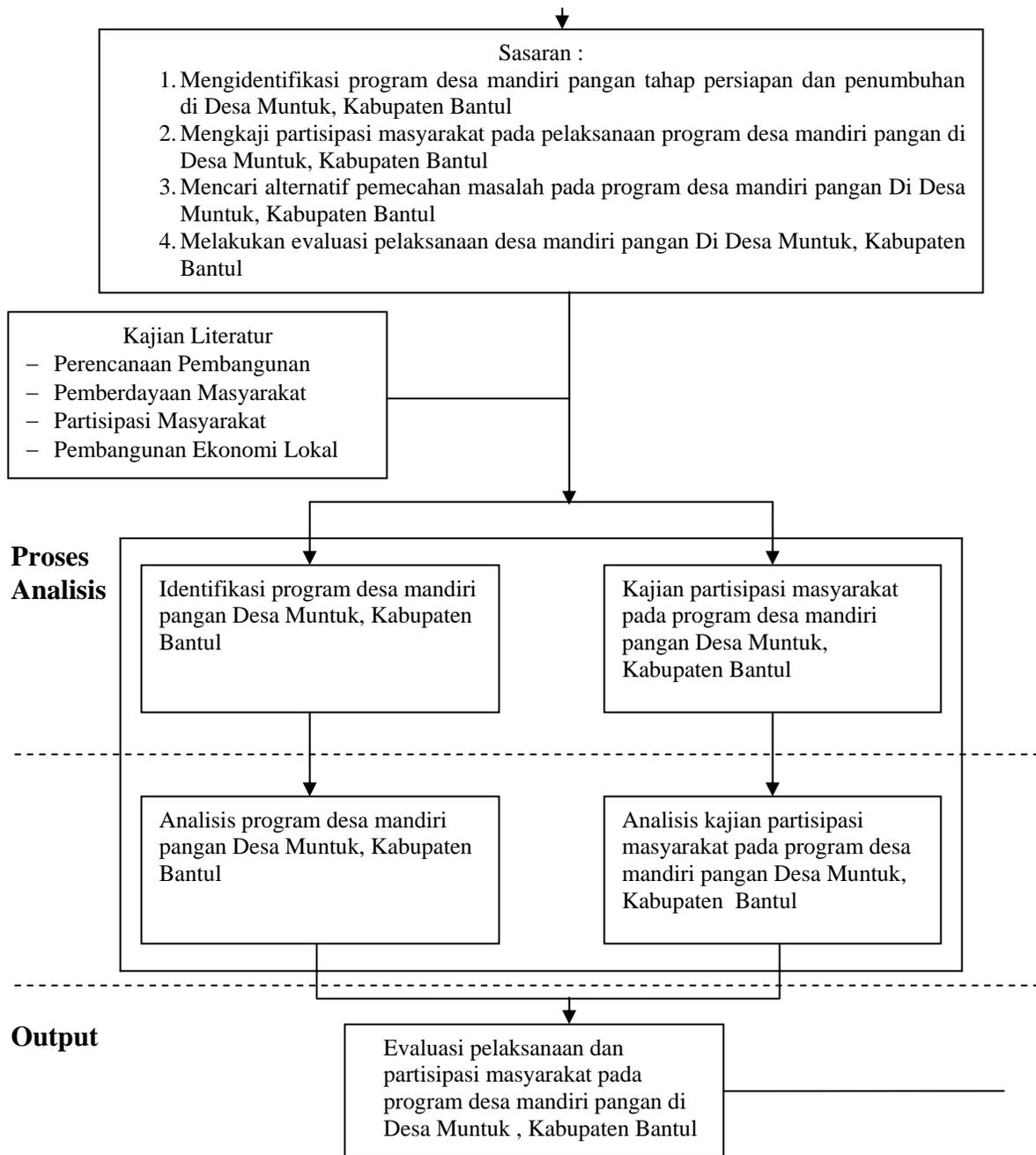
3. Rekomendasikan pelaksanaan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

Dalam kajian ini dijelaskan mengenai capaian program dan kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan dalam rangka operasional program desa mandiri pangan pada tahapan selanjutnya, serta strategi dalam pelibatan segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam studi partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam Gambar 1.1.





GAMBAR 1.1. KERANGKA PIKIR

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Studi

Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul” adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang informasi atau data yang dikumpulkan tidak berwujud angka-angka, dilaksanakan dalam bentuk deskripsi sehingga hanya memaparkan situasi atau peristiwa (Menurut Miles dan Huberman (1992:15). Ada beberapa hal yang menyebabkan alasan pendekatan kualitatif yakni adanya kedekatan dalam struktur dan proses serta adanya tahap-tahap dalam penelitian. Tahapan dimaksud dapat dijelaskan dalam tahapan analisis secara garis besar untuk identifikasi dan proses selanjutnya.

Tahapan-tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Identifikasi program desa mandiri pangan tahap persiapan dan penumbuhan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.
2. Kajian partisipasi masyarakat pada program pembangunan desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.
3. Melakukan evaluasi tujuan dan pencapaian program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

1.6.2. Kerangka Analisis

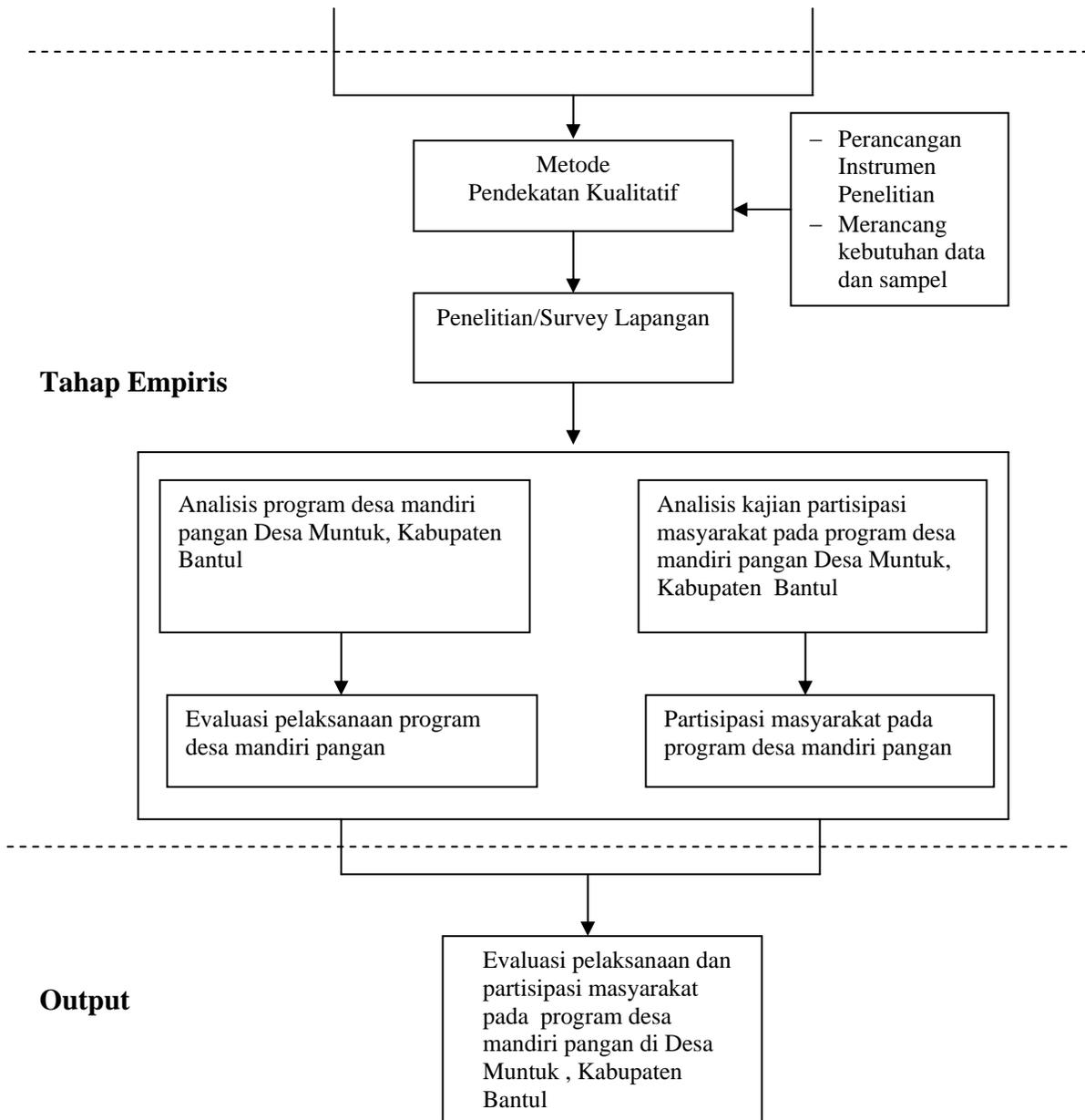
Kerangka analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

Tahap Teoritis

Pengamatan partisipasi terhadap program masih rendah

Literatur

- Perencanaan Pembangunan
- Pemberdayaan masyarakat
- Partisipasi masyarakat
- Pembangunan Ekonomi Lokal



GAMBAR 1.2.
KERANGKA ANALISIS

1.6.3. Kebutuhan Data

Data untuk mendukung penelitian ini dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap tokoh-tokoh kunci (*key persons*) yang berperan dalam pelaksanaan program.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dalam pengumpulannya, diperoleh dari instansi terkait dalam penelitian, meliputi: Pedoman dan laporan pelaksanaan program. Data yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1
HUBUNGAN ANTARA ANALISIS, DATA DAN VARIABEL

Analisa	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter
Program Desa mandiri Pangan Desa Muntuk, Kabupaten Bantul	Seleksi Desa	Seleksi Desa mandiri pangan	Identifikasi lokasi Desa mandiri pangan	Diketahuinya Lokasi sasaran Desa mandiri pangan	Survey Instansional/ Wawancara
		Sosialisasi desa mandiri pangan	Pelaksanaan Sosialisasi Desa mandiri Pangan	Tersosialisasikannya program desa mandiri pangan	
		Penyusunan Data dasar Desa	Penyusunan data dasar rumah tangga, Survey Rumah tangga dan Profil Desa	Diketahuinya data dasar rumah tangga, Survey Rumah Tngga dan profil Desa	
		Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Partisipatif	Pelaksanaan Penyusunan Rencana	Tersusunnya Rencana Pembangunan Desa partisipatif	
	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan	Terlaksananya Pendampingan	- Rekrutmen Pendamping - Penetapan Pendamping - Program Pendampingan - Operasional Pendampingan	
		Pelatihan	Terlaksananya Pelatihan	- Pelatihan Teknis - Pelatihan Penunjang	
	Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Kelompok Fasilitator	Kelompok Fasilitator Mandiri Pangan	- Terbentuknya Pokja Mandiri Pangan - Pertemuan Pokja Mandiri Pangan - Terbentuknya Tim Pangan Desa - Pertemuan Tim Pangan Desa	
		Pemberdayaan Kelompok Afinitas	Kelompok Afinitas	- Terbentuknya Kelompok Afinitas - Kriteria Kelompok Afinitas - Pertemuan Kelompok Afinitas	

Analisa	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Perangkat
2	Tanggapan	Materi Program	Seleksi desa mandiri	Identifikasi desa mandiri pangan	Wawancara

			pangan		
			Sosialisasi Desa mandiri pangan	Pelaksanaan Sosialisasi desa mandiri pangan	Wawancara
			Penyusunan Data dasar desa	Penyusunan data dasar rumah Tangga, Survey Rumah tangga dan Profil Desa	Wawancara
			Penyusunan rencana pembangunan desa Partisipatif	Pelaksanaan penyusunan rencana	Wawancara
		Sikap	Setuju		Wawancara
			Tidak Setuju		Wawancara
	Usulan	Usulan Program	Seleksi Desa	Seleksi Desa mandiri Pangan	Wawancara
				Sosialisasi Desa mandiri Pangan	
				Penyusunan Data dasar Desa	Wawancara
				Penyusunan rencana Desa partisipatif	
			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan	Wawancara
				Pelatihan	Wawancara
			Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Kelompok Fasilitator	
				Pemberdayaan Kelompok Afinitas	
	Usulan Anggaran Biaya	Besarnya Anggaran		Seleksi Desa	Wawancara
				Pemberdayaan Masyarakat	Wawancara
				Penguatan Kelembagaan	
		Sumber		Pemerintah	Wawancara
				Masyarakat	Wawancara
				Swasta	Wawancara
		Sistem Pengelolaan	Kerjasama	Pemerintah	Wawancara
				Masyarakat	Wawancara
				Swasta	Wawancara
		Peranan masyarakat dalam program desa mandiri pangan	<i>Manipulation</i>	Pelibatan diselewengkan, hanya untuk kepentingan publikasi	Wawancara
			<i>Theraphy</i>	Masyarakat dilibatkan dengan perintah-perintah yang bertujuan untuk mengubah pola pikir.	Wawancara
			<i>Informing</i>	Masyarakat diberikan informasi satu arah tidak ada tanggapan atau usulan	Wawancara
			<i>Consultation</i>	Peran masyarakat sebatas memberikan opini	Wawancara
			<i>Placation</i>	Masyarakat terlibat keterwakilannya rendah	
			<i>Partnership</i>	Ada pembagian kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat	Wawancara
			<i>Delegated Power</i>	Ada limpahan kewenangan pada masyarakat	Wawancara
			<i>Citizen Control</i>	Kebijakan, pengelolaan dan kerjasama berada ditangan masyarakat	Wawancara

Sumber: Hasil Analisis, 2008

TABEL I.2
JABARAN KRITERIA PERAN DALAM TINGKATAN PARTISIPASI

No.	Tingkat Partisipasi	Jabaran Peran		
		Inisiasi	Pengelolaan	Keputusan
1.	<i>Manipulation</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan masyarakat diselewengkan, namanya tidak tercatat hanya untuk kepentingan publikasi - Pengelolaan ditangan pemerintah 	Keputusan di tangan pemerintah
2.	<i>Theraphy</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dilibatkan di banyak kegiatan dengan namun seolah hanya penyembuhan penyakit dengan perintah-perintah dengan tujuan untuk mengubah pola pikir atas pengelolaan program - Pengelolaan ditangan pemerinyah 	Keputusan di tangan pemerintah
3.	<i>Informing</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat diberikan informasi satu arah tentang hak dan tanggungjawab dengan berbagai pilihan tidak ada tanggapan atau usulan - Sebagian besar pengelolaan ditangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat diberi limpahan kewenangan terkait jawaban atas pertanyaan terkait keputusan yang menyangkut kepentingannya. - Keputusan ditangan pemerintah
4.	<i>Consultation</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Peran masyarakat sebatas memberikan opini - Disini masyarakat sudah memberikan masukan atau usulan - Sebagian besar pengelolaan ditangan pemerintah 	Keputusan ditangan pemerintah

No.	Tingkat Partisipasi	Jabaran Peran		
		Inisiasi	Pengelolaan	Keputusan
5.	<i>Placation</i>	Ide awal program dari pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian kecil masyarakat ikut dilibatkan - Pelaksana utama oleh pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam beberapa hal masyarakat ikut terlibat namun keterwakilannya rendah - Pemerintah masih sebagai penentu keputusan
6.	<i>Partnership</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ide awal program merupakan ide bersama antara pemerintah dan masyarakat - Kesepakatan pembagian tanggungjawab 	Tanggungjawab dalam pengelolaan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Penyusunan kebijakan - Pemecahan masalah - Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan bersama - Tidak ada keputusan sepihak
7.	<i>Delegated Power</i>	Ide awal program merupakan ide masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan ada pada masyarakat - Peran pemerintah dalam pemecahan masalah dengan tanpa tekanan/paksaan 	Ada limpahan kewenangan pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan
8.	<i>Citizen Control</i>	Ide awal program merupakan ide masyarakat	Kebijakan, pengelolaan dan kerjasama berada ditangan masyarakat	Keputusan sepenuhnya berada ditangan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2008

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yang terdiri dari (Marzuki, 2002:55-56):

1. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan.

2. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Adapun wawancara itu sendiri berguna untuk :

- Mendapatkan data di tangan pertama (primer).
- Pelengkap teknik pengumpulan lainnya.
- Menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif adalah wawancara mendalam. Instrumen yang digunakan di sini, yaitu pedoman wawancara. Jika angket dimaksud untuk menjangkau responden yang jumlahnya relatif banyak, wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

Lebih jauh, tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap tokoh kunci (*key person*) yang mengetahui secara rinci masalah dengan jalan dialog/bercakap-cakap/berhadapan langsung. Seorang *interviewer* (pewawancara) menggunakan *guide* (panduan) wawancara yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam panduan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap topik yang ditentukan. Karakteristik peserta sebaiknya mencerminkan populasi yang diinginkan.

Wawancara dan diskusi dilakukan dengan *stakeholders* untuk mengetahui berbagai aspek antara lain:

- Pengetahuan narasumber terhadap karakteristik wilayah studi
- Pengetahuan terhadap materi program desa mandiri pangan
- Pengetahuan narasumber terhadap konsep peran serta masyarakat pada program desa mandiri pangan.
- Tanggapan terhadap program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.
- Usulan program yang berupa: sistem ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan.
- Usulan anggaran biaya yang meliputi besarnya anggaran dan sumber anggaran.
- Usulan sistem pengelolaan.

Dalam penelitian ini wawancara mendalam yang dipilih menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin (atau bebas terstruktur), setelah mempertimbangkan

kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik wawancara. Hal ini mengingat bahwa teknik campuran ini masih memberi kebebasan kepada responden dalam batas tertentu, namun juga tidak terlalu memberi ruang bagi penyimpangan masukan responden dari topik bahasan. Responden terpilih diminta untuk memberikan tanggapan mengenai variabel penelitian yang telah ditetapkan, meskipun variabel tersebut masih dimungkinkan untuk berubah (bertambah luas) sesuai masukan pendapat responden. Persepsi responden mengenai variabel tersebut menjadi penopang utama dalam penelitian ini.

b) Pengamatan Lapangan (Observasi Lapangan)

Beberapa informasi yang diperoleh dari pengamatan lapangan terutama yang menyangkut implementasi program. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui implementasi program yang sebenarnya dengan menggunakan alat bantu seperti: alat pemotret, alat perekam suara, alat pengukur dan sebagainya.

1.6.5. Teknik Sampling

Untuk mengumpulkan data primer dapat digunakan teknik *sampling* (teknik pengambilan sampel). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2002:56). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Pada dasarnya ada dua macam teknik pengambilan sampel, yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* adalah metode sampling yang setiap anggota populasinya memiliki nilai peluang untuk terpilih menjadi sampel. Sedangkan *non probability sampling* adalah metode sampling yang setiap anggota

populasinya tidak memiliki nilai peluang untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dan tidak ada penggunaan teori probabilitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dimana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat dan tahu mengenai program desa mandiri pangan. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan pada penilaian peneliti. Pada penelitian ini digunakan sampel sebanyak 20 orang responden dengan pertimbangan bahwa dari 20 orang responden, informasi kritis yang terkumpul sudah dianggap mencukupi. Alasan penggunaan teknik *purposive sampling* adalah :

- Penulis tidak membuat *sampling frame* dari populasi yang jumlahnya tidak terbatas dan sulit diidentifikasi. Keterbatasan data dan informasi tentang penduduk Desa Muntuk tidak memungkinkan penulis membuat *sampling frame* yang lengkap sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan sampel secara *probability sampling*.
- Pengumpulan data hanya dapat dilakukan pada orang-orang yang mengetahui dan ikut dalam program desa mandiri pangan di Desa Muntuk. Dengan teknik *purposive sampling* penulis bisa memilih beberapa orang yang mampu memberikan jawaban sesuai dengan topik penelitian. peserta program desa mandiri pangan baik dari sisi usia, pekerjaan maupun latar belakang pendidikan, sehingga penulis memilih orang-orang yang dipertimbangkan mampu memberikan jawaban yang meyakinkan untuk setiap pertanyaan yang diajukan.

- Jumlah sampel sebesar 20 orang juga didasarkan atas pertimbangan keterbatasan biaya dan waktu pelaksanaan penelitian. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui;

Jumlah tokoh kunci atau narasumber yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel I.3 berikut:

TABEL I.3
JENIS DAN JUMLAH NARASUMBER

NO	JENIS NARASUMBER	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kepala Desa	1	Kades Muntuk
2	Kepala Dukuh	6	
4	BPD	3	
5	Karang Taruna	2	
6	Pemuka Agama/Masyarakat	8	
JUMLAH		20	

Sumber: Hasil Analisis, 2008

1.6.6. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. (Miles dan Huberman (1992:20) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada

dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana saja yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis. Kode atau pengkodean merupakan singkatan atau simbol yang diterapkan pada sekelompok kata-kata, dapat berupa kalimat atau paragraf dari catatan-catatan lapangan yang ditulis. Kode-kode merupakan kategori-kategori, biasanya dikembangkan dari permasalahan penelitian, hipotesis, konsep-konsep kunci, atau tema-tema yang penting. Kode-kode adalah peralatan yang mengorganisasi dan menyusun kembali kata-kata sehingga memungkinkan penganalisis dapat menemukan dengan cepat, menarik kemudian menggolongkan seluruh bagian yang berhubungan dengan masalah khusus, hipotesis, konsep atau tema. Selanjutnya dalam reduksi data dapat berupa analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ia merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

Ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, analisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Penelitian kualitatif ini pada dasarnya mengadopsi ketiga alat analisis kualitatif tersebut, namun penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam konteks terapan, penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan variabel penelitian. Proses pelaksanaannya lebih banyak menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun urutannya sebagai berikut :

Tahap pertama, untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah tentang pelaksanaan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul yang partisipatif. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini berupa data primer maupun sekunder yang meliputi data kebijakan pemerintah daerah tentang pelaksanaan program yang partisipatif. Analisis ini mendeskripsikan dukungan pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan yang ada dari data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait maupun

observasi lapangan maupun dari wawancara terhadap narasumber. Hasil akhir dari analisis tersebut menghasilkan rangkaian kegiatan dalam mendukung program desa mandiri pangan secara partisipatif.

Tahap kedua, pada bagian ini digunakan teknik komunikasi langsung dengan cara mengumpulkan data dengan cara kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Materi wawancara mendalam dengan narasumber mengenai tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap program desa mandiri pangan termasuk informasi lain yang muncul yang bisa digunakan untuk analisis yang lebih luas terkait program desa mandiri pangan. Semaksimal mungkin menggali masukan dari narasumber untuk memudahkan dalam analisis.

Masukan-masukan tersebut dianalisis dengan 3 (tiga) alat utama dalam penelitian kualitatif. Sehingga meskipun dalam penelitian kualitatif senantiasa terikat dengan ruang dan waktu (konteks) penelitian, namun berdasarkan data yang diperoleh senantiasa diungkapkan berbagai fakta apa adanya. Meski pada saat menggali data, upaya mendekatkan diri semaksimal mungkin pada narasumber untuk memahami konteks jawaban atau pernyataan dari narasumber. Pada saat melakukan analisis lanjutan, hasil wawancara tersebut disikapi dengan cara lain agar hasil analisis secara keseluruhan dapat lebih baik dan memadai.

Tahap ketiga, mencoba untuk mengambil intisari peran serta masyarakat dalam program desa mandiri pangan tercantum dalam program pemerintah serta kondisi riil yang ada berupa karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat (potensi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan). Dari hasil analisis ini dapat dirumuskan faktor-faktor

pendorong pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan kontribusi masyarakat dalam program desa mandiri pangan secara partisipatif.

Tahap keempat, dilakukan berdasarkan hasil analisis ketiga yang dicoba untuk diabstraksikan dan direfleksikan lebih jauh, guna menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang perlu ditempuh. Rekomendasi yang dihasilkan berupa upaya pelaksanaan program khususnya mandiri pangan partisipatif dalam artian merupakan aspirasi dari masyarakat setempat. Selain itu juga dirumuskan bentuk-bentuk keterlibatan/partisipasi masyarakat dan kontribusinya dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan secara partisipatif di Desa Muntuk Kabupaten Bantul.

1.7. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penulisan tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam penyusunan tesis ini diperlukan suatu alur yang diawali dengan latar belakang mengapa diperlukan kajian ini, rumusan masalah yang ada, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian dan kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan. Pada bab ini juga memuat: pendekatan penelitian, kerangka analisis, teknik analisis, teknik pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, teknik sampling dan kebutuhan data.

BAB II. KAJIAN LITERATUR PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

Dalam bab ini diulas tentang kajian literatur yang diharapkan dapat digunakan

dalam penelitian ini, yang terdiri dari: kajian literatur pemberdayaan, partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pembangunan ekonomi lokal.

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA MUNTUK DAN PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kondisi Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang meliputi: letak dan lokasi, kondisi desa, serta kondisi partisipasi masyarakat. Dalam bab ini juga dijelaskan gambaran umum Program desa mandiri pangan

BAB III. STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA MUNTUK, KABUPATEN BANTUL

Bab ini terdiri dari analisis: identifikasi program desa mandiri pangan tahap persiapan dan penumbuhan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul, Kajian partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul dan Evaluasi tujuan dan pencapaian program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

BAB II
KAJIAN LITERATUR
STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA
MANDIRI PANGAN DI DESA MUNTUK, KABUPATEN BANTUL

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang ikut dalam proses perubahan tersebut.

Kemandirian dapat tercipta dari sebuah masyarakat yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, pembelajaran masyarakat pertama-tama harus difokuskan pada usaha melepaskan seseorang dari realitas yang menghambat eksistensi, yakni hambatan yang berupa ketidaksederajatan, tekanan, dan penindasan dari pihak luar yang merasa lebih berpengetahuan, berpangkat, berjabatan dan lain sebagainya.

Namun demikian, hampir di setiap lini kehidupan masih terdapat sikap-sikap munafik dan feodalisme terutama pada golongan yang berpengetahuan, berpangkat, berjabatan untuk kecenderungan menindas pihak yang lemah.

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (*stakeholders*) akibat

adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik.

5.1. Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pembangunan

Pemberdayaan harus berperan untuk mewujudkan konsep masyarakat belajar atau *Concept of Societal Learning* dan caranya adalah dengan mempertemukan *top down approach* dengan *bottom-up approach* yang pada dasarnya adalah “kontradiktif” (Friedmann dalam Burke, 2004: 238). Kedua macam pendekatan ini kontradiktif karena masyarakat dan perencana sangat sering memiliki pemahaman masalah, perumusan, tujuan dan ide-ide pemecahan praktis yang berbeda akibat menganganya jurang pengetahuan dan komunikasi antara perencana dengan masyarakat.

Pendekatan yang bertentangan ini membutuhkan aktualisasi relasi baru, yang mampu mengintegrasikan proses saling belajar (*mutual learning*) dari kedua belah pihak melalui proses perencanaan yang disebut sebagai *Transactive Planning* (Perencanaan Transaktif). Selanjutnya Friedmann dalam Burke, bahwa Perencanaan Transaktif merupakan tanggapan terhadap kesenjangan komunikasi antara perencana teknis dan para klien. Untuk menutup kesenjangan tersebut, suatu rangkaian transaksi pribadi yang terus menerus dan terutama transaksi secara verbal antara perencana dan klien, sangat dibutuhkan. Friedmann juga menunjukkan bahwa tumbuhnya kaum teknokrat dari masyarakat kita menuntut adanya metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses belajar secara bersama-sama. Friedmann menjelaskan bahwa dibutuhkan suatu penggabungan sains dan teknologi dengan pengetahuan pribadi pada tahap-tahap kritis intervensi sosial guna menghindari agar pengambilan keputusan tidak berada di tangan pihak teknokrat secara eksklusif.

Perencanaan Transaktif memungkinkan perencana belajar pengetahuan eksperimental dari klien, sedangkan klien belajar pengetahuan teknis dari perencana. Melalui proses ini pula, kedua macam pengetahuan tersebut masing-masing akan berubah dengan sendirinya, dan kemudian kedua macam pengetahuan ini akan melebur menjadi satu.

Pada saat pengetahuan kedua belah pihak melebur, maka persepsi dan imaji dari pihak satu terhadap pihak yang lain akan berubah, dan selanjutnya perilaku keduanya pun akan berubah. Ide awal dari perencana untuk “mengajari masyarakat” akan berubah menjadi “pelajar” (*the learners*) akan bertransformasi menjadi aksi masyarakat (*community action*) artinya ”dialog saling belajar” telah merubah perilaku kolektif masyarakat dan mendorong masyarakat secara lebih aktif menolong diri mereka sendiri dan sekaligus membangun komunitas bersama seperti yang diharapkan.

Masyarakat belajar (*Learning Society*) yang aktif melakukan aksi ini dengan sendirinya akan terbangun kapasitasnya karena *learning society* secara inheren akan mengembangkan kapasitas komunitas (*Community Capacity Building*). Secara empirik banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah memasuki fase *Learning Society* akan lebih berpotensi untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang lebih berkelanjutan, karena mereka sudah lebih mandiri dalam berbagai hal mulai dari mengidentifikasi, menilai dan menformulasikan masalah baik fisik, sosial, kultural maupun ekonomi, membangun visi dan aspirasi, memprioritaskan intervensi, merencana, mengelola, memonitor dan bahkan memilih teknologi yang tepat. Masyarakat aktif (*Active Society*) semacam ini juga menghasilkan kerelaan masyarakat yang lebih untuk memberi kontribusi kerja dan biaya pembangunan, operasi dan perawatan sedemikian

sehingga pendekatan mampu mengembalikan biaya investasi publik (*Cost - Recovery*) yang pada gilirannya akan menjadi lebih berkemungkinan terjadinya pengulangan (*Self - Replicability*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang ikut dalam proses perubahan tersebut.

Pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan dalam konsep (wacana) politik menurut Dahl (1963:50) merupakan sebuah kekuatan yang menyangkut suatu kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua.

Program Desa Mandiri Pangan pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat yang menekankan penerapan pelaksanaan penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat di tingkat lokal berdasar prinsip pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan Program Desa Mandiri Pangan mengutamakan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola masyarakat secara langsung dalam wadah kelembagaan-kelembagaan lokal yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal baik desa, kecamatan dan tingkatan di atasnya.

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (*stakeholders*) akibat

adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik. yang umumnya berisikan arah, tujuan, cara dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

Sasaran Program yang mengarah pada penduduk miskin dan perempuan yang kebanyakan menganggur menyebabkan mereka sadar, yakin dan percaya diri untuk dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka akan berusaha menampilkan apa yang dapat diperbuat dan diusahakan dan nantinya dapat dikerjakan bersama. Berawal dari hal sederhana seperti itu, maka semangat masyarakat dalam membangun (walaupun dengan cara dan pemahaman mereka sendiri sendiri) akan terus berlanjut dan berdayanya masyarakat dalam artian mandiri dalam membangun tanpa menggantungkan terhadap pemerintah akan tercapai. Kondisi yang seperti itu dalam masyarakat akan membuat masyarakat merasa nyaman, tenteram sehingga iklim berusaha (peningkatan pendapatan keluarga) akan terjaga dan semangat membangun terus terpelihara dalam masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta kelompok-kelompok masyarakat yang harus dan terus didampingi oleh tenaga pendamping program yang dijalankan.

Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah yang riil dalam penanganannya. Langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan tujuan adalah melalui:

Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

Dua hal yang mendasar dalam membentuk iklim bagi masyarakat adalah dengan;

- Menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan/motivasi untuk berkembang.

Proses menyadarkan masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya melalui *survey* dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.

- Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah, yang disebut dengan *participatory design and planning*.

Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan rasa *ke-berpihak-an* kepada masyarakat.

Memperkuat potensi yang ada.

Memperkuat (*empowerment*) dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangun, yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan-masukan/input serta membuka berbagai peluang-peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya.

Proses Perlindungan (Pendampingan)

Secara aplikatif *empowerment* terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu:

- Penguatan Akses/*Accesibility Empowerment*

Pada pemberdayaan kelompok masyarakat *empowerment* dilakukan melalui menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok pemberdaya. Kebutuhan akan akses ini sangat menentukan share dan partisipasi antar stakeholders dalam proses pemberdayaan.

- Penguatan Teknis/*Technical Empowerment*

Technical empowerment dilakukan sebagai bagian dari kegiatan *advocacy* sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan.

Keterlibatan secara aktif dari masing-masing *stakeholders* diwujudkan dalam bentuk *share* nyata seperti program, pendanaan, dan kebijaksanaan (*policy*).

Program desa mandiri pangan memberikan bantuan dalam jumlah tertentu dan pemanfaatannya semata agar pemanfaatan program dengan berlatih menggunakan dana tersebut sebagai stimulan untuk pengembangan pemberdayaan lebih lanjut. Dana yang ada digunakan untuk pembiayaan investasi sosial dan investasi ekonomi untuk menciptakan produktivitas yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Bentuk bantuan lain adalah pengembangan sumber daya manusia dengan dilakukan diseminasi dan pelatihan secara berjenjang baik melalui tenaga pendamping dan atau aparat mulai dari kecamatan, kabupaten maupun propinsi.

2.2. Partisipasi Masyarakat Pada Program Pembangunan

Memperhatikan berbagai karakteristik dari strategi pembangunan sumber daya berbasis komunitas, maka dalam pelaksanaannya terkandung suatu unsur yang dapat dikatakan mutlak, yaitu partisipasi masyarakat lokal. Sebagaimana telah dipahami bahwa, pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif dan kuantitatif merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya. Agar proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada kesinambungan dan peningkatan yang bersifat kumulatif dari partisipasi masyarakat melalui berbagai tindakan bersama dan aktivitas lokal tersebut.

Dengan demikian berarti pendekatan partisipatoris harus dilihat sebagai pendekatan utama dalam strategi pengelolaan sumber daya berbasis komunitas seperti dalam program desa mandiri pangan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, akan ditemukan berbagai rumusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan.

Partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satu kelompok/antar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia maka partisipasi dapat disebut sebagai “Falsafah Pembangunan Indonesia”. Dengan demikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konsep partisipasi dan tiap partisipasi menurut Parwoto (1997) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Proaktif atau sukarela (tanpa disuruh)
- Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut
- Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
- Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Konsep partisipasi dalam pembangunan kemudian disebut sebagai pembangunan partisipatif, yaitu pola pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan

menerapkan konsep partisipasi, dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dan sekaligus sebagai objek dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yang berwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstual sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh perencanaan makro.

Pembangunan partisipatif juga mempertemukan pendekatan dari atas (*top-down*), dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan pendekatan dari bawah (*bottom-up*), yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing. Dalam pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yang terlibat.

Ada perbedaan wacana mengenai pembangunan dan partisipasi masyarakat, yaitu dari wacana pemerintah dan wacana masyarakat. Menurut Widyatmadja dan Goulet (dalam Prijono 1996:105) partisipasi dalam wacana pemerintah adalah lebih menekankan pada pengorbanan dan kontribusi rakyat daripada hak untuk ikut menikmati manfaat pembangunan itu sendiri. Dari perspektif rakyat, partisipasi merupakan praktek dari keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut menurut Soetrisno (1995:221) ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar dalam masyarakat. Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi

rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.

Definisi kedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Partisipasi masyarakat menurut PPB dalam (United Nations dalam Hall, 1986) adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil.

Cohen dan Uphof, dalam Komarudin, (1997:320) dalam partisipasi masyarakat dikenal adanya tipe partisipasi, modus partisipasi dan siklus partisipasi, yaitu

Tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan, dapat atau layak dioperasionisasikan)

- b. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumberdaya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi)
- c. Dalam kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial dan personel)
- d. Dalam kegiatan evaluasi termasuk keterlibatan dalam proses yang berjalan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut Hall (1986:9) partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal.

Dalam Wibisana (1989:41) partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan.

Slamet, (1992) partisipasi merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, yaitu:

- a. Dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan program-program atau proyek-proyek secara sukarela
- c. Dalam pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek (sesuai dengan azas pembangunan yaitu pembagian yang merata atas hasil pembangunan)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasilnya .

Dalam Burke, (2004:52-54) keuntungan dan masalah partisipasi akan dilihat dalam konteks yang berbeda oleh setiap orang yang berkepentingan. Secara umum, keuntungan dari partisipasi:

- a. Masyarakat akan merasa “memiliki” terhadap rencana kerja.
- b. Memungkinkan adanya ide-ide segar.
- c. Mendapat bantuan dalam bentuk barang atau sumber daya lainnya.
- d. Masyarakat akan tetap merasa menjadi bagian dari pemecahan masalah jangka panjang karena mereka telah mempunyai rasa memiliki terhadap ide-ide awal.
- e. Keikutsertaan dalam satu proyek atau program membangun kesadaran, kepercayaan dan keyakinan menjadi bagian penting pada proyek/kesempatan-kesempatan lainnya.

Selain itu, keuntungan dari suatu keluaran atau *out put* yang lebih baik adalah issue “proses” membantu mengembangkan keterampilan dan *confidence* masyarakat. Keuntungan pada umumnya berkaitan dengan Kepentingan utama yang disepakati pada tingkat partisipasi yang tepat; kesamaan bahasa untuk mendiskusikan issue dan mengembangkan ide-ide; dan metode-metode tepat guna yang dipakai sebanyak mungkin sesuai kesepakatan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diketahui berdasarkan besarnya pengaruh yang dimiliki masyarakat di dalam proses penentuan

permasalahan beserta hasilnya, dari pengaruh yang kecil sampai kepada pengaruh yang besar. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari

1. Tinjauan dan Komentar

Masyarakat diberi kesempatan untuk meninjau suatu rencana yang diusulkan. Komentar dapat dibuat, tetapi organisasi perencanaan tidak terikat untuk mengubah atau memodifikasi rencana tersebut. Peran ini bersifat pasif, yang dirancang terutama untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dan kelompok.

2. Konsultasi

Dengan peran ini, masyarakat diangkat dan dimintai masukan serta informasi khusus. Metode yang dipergunakan untuk memperoleh masukan adalah melalui pertemuan dan kuesioner. Peran masyarakat sebagai konsultan adalah untuk menjadi bagian dari usaha pembuatan keputusan. Tujuan dari peran konsultasi ini bersifat lebih jauh, bukan hanya sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Peran ini merupakan proses komunikasi dua arah di mana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki keputusan.

3. Pemberi Nasehat

Pengaruh dan peran masyarakat bersifat lebih besar karena masyarakat diangkat ke dalam organisasi dan ditempatkan pada komite kebijakan dan perencanaan di dalam organisasi perencanaan tersebut. Tujuan dari peran ini adalah untuk memperoleh informasi maupun dukungan terorganisir untuk kegiatan-kegiatan.

4. Pengambilan Keputusan Bersama

Peran ini menggambarkan partisipasi masyarakat dan perencana yang bertindak sebagai mitra di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah

untuk mencapai keputusan yang mencerminkan keinginan tim perencana yang di dalamnya memuat aspirasi masyarakat.

5. Pengambilan Keputusan Terkendali

Dalam peran ini, masyarakat memiliki wewenang penuh atas semua kebijakan dan keputusan. Peran dari para staf profesional adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, yaitu untuk bertindak sebagai penasehat dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh masyarakat. Peran partisipasi masyarakat ini sangat umum untuk organisasi yang bersifat sukarela.

Pendekatan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memungkinkan keseimbangan antara kepentingan administrasi dari pemerintah setempat dan integrasi penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal. Terdapat 2 (dua) macam partisipasi penduduk, yaitu (Jayadinata, 1999:201-202):

1. Partisipasi Vertikal

Penduduk diberi lebih banyak kesempatan untuk menyumbangkan pendapatnya dalam pembangunan. Interaksi dengan cara dari bawah ke atas (*bottom up*) dalam hal:

- a. Teknik belajar dan mendengarkan (masyarakat diberi informasi mengenai masalah aktual).
- b. Pengumuman informasi berhubungan dengan program yang diusulkan.
- c. Masukan yang terus dari berbagai golongan.
- d. Penelaahan kembali rencana yang diusulkan.

2. Partisipasi Horisontal

Dalam partisipasi ini masyarakat berinteraksi secara horizontal dalam hal:

- a. Masyarakat setempat berinteraksi dengan berbagai kelompok lain.

- b. Mengambil pengalaman dari kelompok lain.
- c. Mempengaruhi agar persentase partisipasi penduduk menjadi lebih besar.

Partisipasi masyarakat secara umum terbagi dalam 8 (delapan) tingkatan menurut Arstein (dalam Panudju, 1999 : 72 -76) tingkatan-tingkatan tersebut, adalah:

1. Manipulation

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada peran yang nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa.

2. Theraphy

Pada tingkatan ini, masyarakat diperlakukan seolah-olah seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam grup terapi. Masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, namun hal tersebut hanya ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan informasi atau usulan-usulan.

3. Informing

Merupakan tahap pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan. Biasanya hanya diberikan secara satu arah, dari penguasa ke rakyat, tanpa adanya kemungkinan umpan balik, Pada tingkat ini masyarakat diberi

limpahan kewenangan untuk mempengaruhi rencana bagi kepentingan masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara media berita, pamflet, poster dan tanggapan atas pertanyaan.

4. Consultation

Mengundang opini masyarakat, setelah memberi informasi kepada mereka. Apabila konsultasi tidak disertai dengan cara-cara partisipasi yang lain, maka tingkat keberhasilannya akan rendah, mengingat tidak adanya jaminan kepedulian terhadap ide-ide masyarakat. Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pertemuan lingkungan, survei tentang pola pikir masyarakat dan dengar pendapat publik.

5. Placation

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh penguasa.

Beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan kerjasama. Usul-usul dari masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikemukakan, tetapi sering tidak diperhitungkan karena kemampuan dan

kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibandingkan dengan anggota-anggota instansi pemerintah lainnya.

6. Partnership

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

7. Delegated Power

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar tanpa adanya tekanan.

8. Citizen Control

Pada tingkat ini masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan "pihak-pihak luar" yang hendak melakukan perubahan.

2.3. Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif

Pembangunan daerah, yang terkait dengan permasalahan lokalitas akan selalu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, basis ekonomi dan pusat pertumbuhan dan spesialisasi. Dalam pembangunan daerah mau tidak mau harus pula memperhatikan komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Penciptaan peluang dan investasi dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki. Basis ekonomi dari sebuah komunitas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja basis yang menjadi tumpuan perekonomian.

Secara umum Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumberdaya yang ada membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah

tersebut (Blakely, 1989). PEL hakekatnya adalah kemitraan antara pemerintah di daerah/lokal dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi ditingkat daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya pada kebijakan “*endogenous development*” mendayagunakan potensi sumberdaya manusia, institusional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarah pada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi daerah peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha koordinator, fasilitator dan stimulator. Selanjutnya Blakely mengatakan saat ini hal yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi lokal dengan tingkat kompetisi yang sangat berat diantaranya adalah penguasaan teknologi dan sumberdaya manusia dengan keterampilan tinggi.

2.4. Rumusan Kajian Teori

Dari kajian teori di atas, dapat ditarik beberapa rumusan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Konsep *societal learning* terwujud dengan mempertemukan *top down approach* dengan *bottom-up approach* melalui proses perencanaan transaktif. Proses akhir dari konsep ini memunculkan masyarakat aktif (*active society*) yang dengan kerelaan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap proses perencanaan.
2. Pemberdayaan merupakan sebuah kekuatan yang menyangkut suatu kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua.

3. Konsep pembangunan partisipatif:

- Pola pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi.
- Pembangunan yang mempertemukan perencanaan makro yang berwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstual sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh perencanaan makro.
- Pembangunan yang mempertemukan pendekatan dari atas (*top-down*), dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan pendekatan dari bawah (*bottom-up*), yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing. Dalam pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yang terlibat.

4. Pembangunan Ekonomi Lokal:

- Kemitraan antara pemerintah di daerah/lokal dengan para *stakeholders* termasuk sektor swasta dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi ditingkat daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

TABEL II.1
RANGKUMAN KAJIAN LITERATUR

LITERATUR	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
A. Landasan Teori Perencanaan Pembangunan			
Friedmann dalam Burke (2004)	Perencanaan Transaktif	Perencanaan Transaktif memungkinkan perencana belajar pengetahuan eksperimental dari klien, sedangkan klien belajar pengetahuan teknis dari perencana. Melalui proses ini pula, kedua macam pengetahuan tersebut masing-masing akan berubah dengan sendirinya, dan kemudian kedua macam pengetahuan ini akan melebur menjadi satu.	Transfer pengetahuan eksperimental dan teknis antara klien (masyarakat) dengan perencana
B. Landasan Teori Pemberdayaan			
Dahl (1963)	Pemberdayaan dalam wacana politik	Pemberdayaan dalam wacana politik menurut merupakan sebuah kekuatan yang menyangkut suatu kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua.	Kemampuan untuk mempengaruhi antara pihak pertama (seseorang) dengan pihak kedua (orang lain)
C. Landasan Teori Partisipasi Masyarakat			
Burke (2004)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergantung dari besarnya pengaruh yang dimiliki di masyarakat. Partisipasi tersebut terdiri dari: - Tinjauan dan komentar - Konsultasi - Pemberi nasehat - Pengambilan keputusan bersama - Pengambilan keputusan terkendali	Bentuk partisipasi dalam pembangunan: - Tinjauan dan komentar - Konsultasi - Pemberi nasehat - Pengambilan keputusan bersama - Pengambilan keputusan terkendali
Parwoto (1997)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pola pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan langsung menikmati/terkena akibat	- Program pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat

LITERATUR	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
A. Landasan Teori Perencanaan Pembangunan			
		pembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi, dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subjek pembangunan dan sekaligus sebagai objek dalam menikmati hasil pembangunan.	

LITERATUR	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
Jayadinata (1999)	Macam partisipasi	Terdiri dari: - Partisipasi vertikal - Partisipasi horisontal	Kedudukan masyarakat dalam proses perencanaan.
Cohen dan Uphof Dlm Komarudin (1997)	Type Partisipasi Dalam Pembangunan	Tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: - Partisipasi dalam membuat keputusan - Partisipasi dalam implementasi - Dalam kegiatan yang memberikan keuntungan - Dalam kegiatan evaluasi termasuk dalam mencapai tujuan tertentu	Bentuk partisipasi : - Membuat pilihan dan rencana. - Kontribusi - Memberikan keuntungan - Partisipasi dalam evaluasi
Arstein (1969)	Tingkatan (tangga) partisipasi	Tangga partisipasi terdiri dari: Manipulation; Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja dan tidak tercatat sebagai anggota dalam berbagai bahan penasehat. Tidak ada peran yang nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa. Therapy; Pada tingkatan ini, masyarakat diperlakukan seolah-olah seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam grup terapi. Masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan	Tingkat partisipasi terdiri dari: - <i>Manipulation</i> - <i>Therapy</i> - <i>Informing</i> - <i>Consultation</i> - <i>Placation</i> - <i>Partnership</i> - <i>Delegated Power</i> - <i>Citizen Control</i>

		<p>dengan perintah-perintah, namun hal tersebut hanya ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan informasi atau usulan-usulan.</p> <p>Informing; Merupakan tahap pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan. Biasanya hanya diberikan secara satu arah, dari penguasa ke rakyat, tanpa adanya kemungkinan umpan balik/masukan dari rakyat, Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk mempengaruhi rencana bagi kepentingan masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara media berita, pamflet, poster dan tanggapan atas pertanyaan.</p> <p>Consultation; Mengundang opini/masukan/usulan masyarakat, setelah memberi informasi kepada mereka. Apabila konsultasi tidak disertai dengan cara-cara partisipasi yang lain, maka tingkat keberhasilannya akan rendah, mengingat tidak adanya jaminan kepedulian terhadap ide-ide masyarakat. Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pertemuan lingkungan, survei tentang pola pikir masyarakat dan dengan pendapat publik.</p>	
--	--	---	--

LITERATUR	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
		<p>Placation; Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh penguasa. Beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan kerjasama. Usul-usul dari masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikemukakan, tetapi sering tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibandingkan dengan lainnya anggota-anggota instansi pemerintah</p> <p>Partnership; Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi. Tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak</p>	

Blakely, (1989)	Pembangunan Ekonomi Lokal	<p>Delegated Power; Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar tanpa adanya tekanan.</p> <p>Citizen Control; Pada tingkat ini masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan "pihak-pihak luar" yang hendak melakukan perubahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan pemerintah lokal dengan stakeholders untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah - Mendayagunakan potensi sumberdaya manusia, institusional dan fisik setempat. <p>Orientasi fokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi</p>	Kedudukan pemerintah daerah/lokal dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi
-----------------	---------------------------	---	--

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PROGRAM

3.1. Kondisi Desa Muntuk, Kabupaten Bantul

3.1.1. Letak dan Lokasi

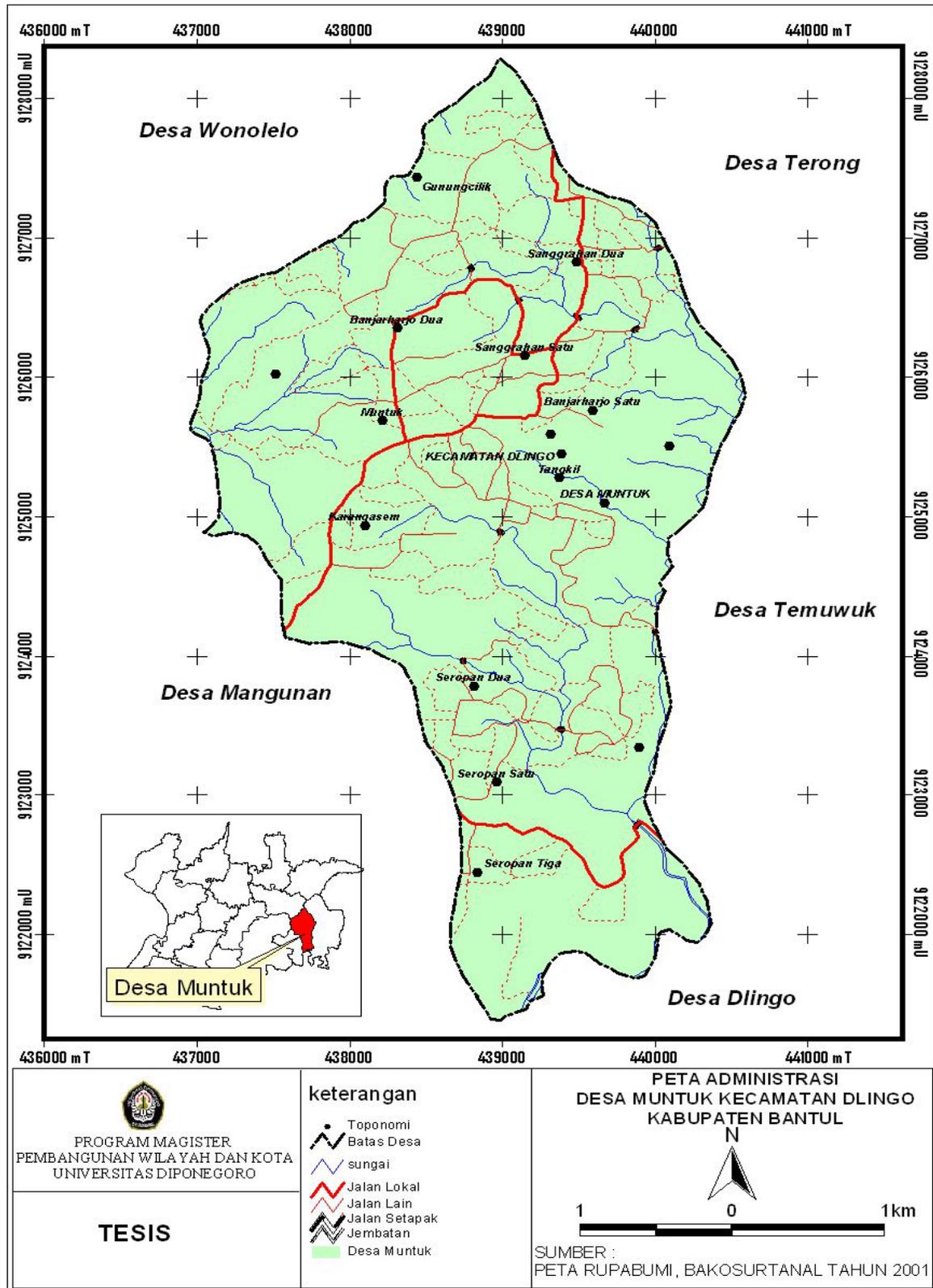
Desa Muntuk secara administrasi termasuk dalam Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Lokasi studi Desa Muntuk memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Desa Terong, Kecamatan Dlingo
- Selatan : Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo
- Barat : Desa Pleret, Kecamatan Dlingo
- Timur : Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo

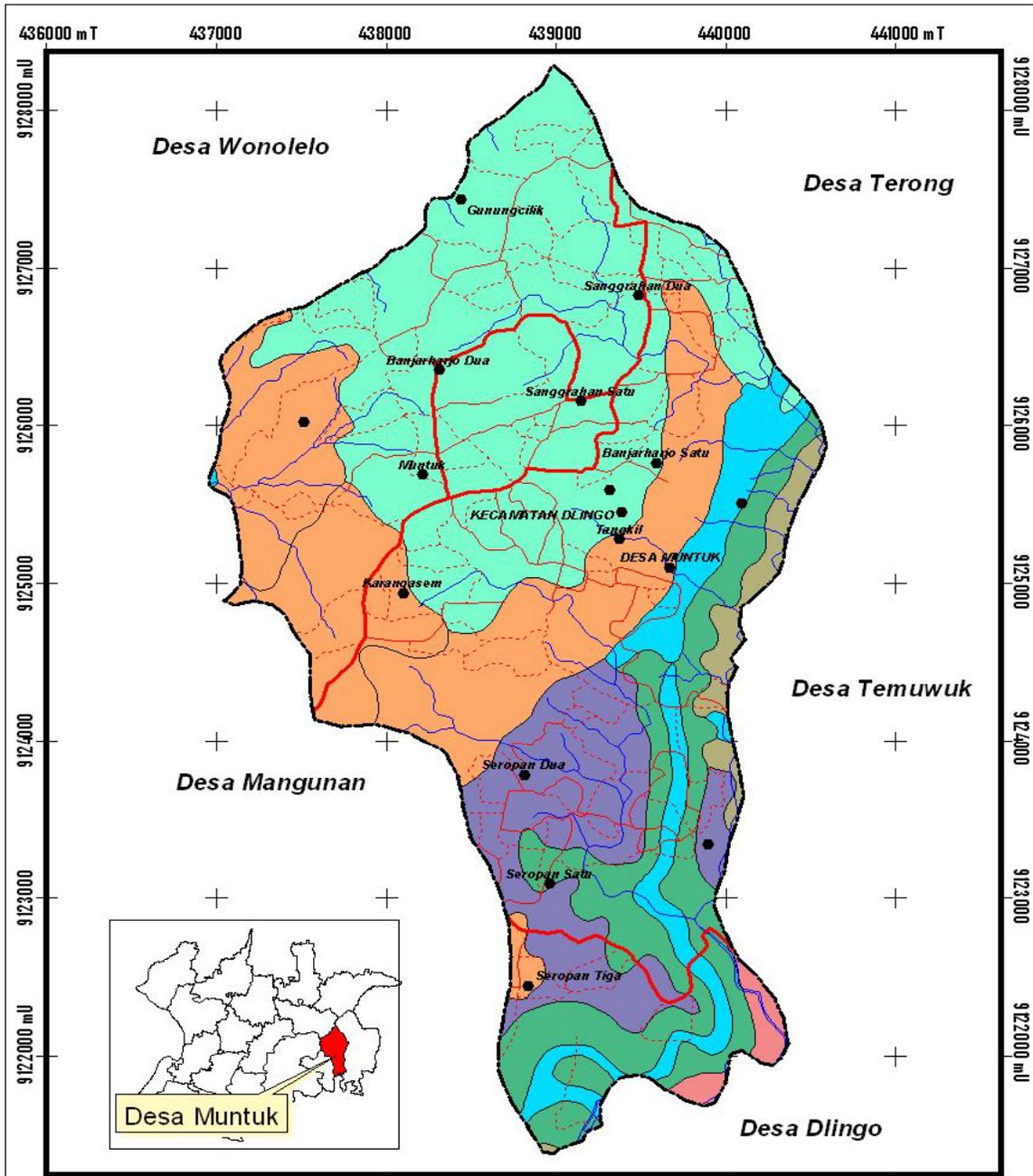
Desa Muntuk merupakan daerah pegunungan dengan luas wilayah 1.284,6265 Ha terdiri dari 11 pedukuhan yang meliputi 22 RW dan 60 RT. Kegiatan ekonomi penduduk yang paling dominan adalah dibidang pertanian dan kerajinan, dengan jenis kegiatan :

- Pertanian tanaman pangan : padi, jagung, kacang tanah dan ketela pohon
- Perikanan : Kolam lele, nila
- Peternakan : sapi, kambing, ayam
- Perkebunan : kelapa, melinjo, mete
- Kerajinan : kerajinan bambu dan mebel
- Perdagangan : jual-beli kebutuhan pokok

Gambaran peta wilayah studi seperti terlihat pada gambar 3.1 dan 3.2.



GAMBAR 3. 1. PETA ADMINISTRASI DESA MUNTUK



 <p>PROGRAM MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p> <p>TESIS</p>	<p>keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Toponomi — Batas Desa — Jalan — Jalan Lokal — Jalan Lain --- Jalan Setapak — sungai Lereng <ul style="list-style-type: none"> ■ Datar ■ Agak Curam ■ Berbukit ■ Berombak ■ Curam ■ landai ■ Sangat Curam 	<p>PETA KEMIRINGAN LERENG DESA MUNTUK KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL</p> <p style="text-align: center;">N</p>  <p>1 0 1km</p> <p>SUMBER : PETA RUPABUMI, BAKOSURTANAL TAHUN 2001</p>
---	--	--

GAMBAR 3. 2. PETA KELERENGAN

3.1.2. Kondisi Karakteristik Masyarakat

Desa Muntuk berada di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Sebagai daerah pedesaan, Desa Muntuk kondisinya tidak jauh berbeda dengan desa lain yang belum dapat berkembang seperti pedesaan lain yang ada di kabupaten Bantul. Di samping itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga tidak terlalu baik, hal ini terlihat pada sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Sumber daya manusia yang ditemui masih memprihatinkan baik dari segi pendidikan dan kesehatannya maupun taraf kehidupan sehari-hari. Walaupun aksesibilitas menuju ke Desa Muntuk relatif bagus dan lancar dengan jalan beraspal namun lokasi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dan jasa mengakibatkan masyarakat harus mengeluarkan biaya mahal untuk menuju ke Desa Muntuk.

Dari segi budaya, di Desa Muntuk ini masih melaksanakan tradisi adat istiadat dan budaya seperti halnya pedesaan seperti gotong-royong untuk kegiatan bersama seperti pendirian rumah maupun kegiatan pedesaan seperti event tujuh belas agustusan. Kegiatan lain seperti kumpulan bapak-bapak maupun ibu-ibu dalam arisan sekaligus membahas perkembangan pembangunan pedesaan dan kebiasaan lainnya yang berkaitan dengan upacara keagamaan.

Secara terperinci karakteristik masyarakat Desa Muntuk, Kabupaten Bantul dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya dari aspek usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang ada.

A. Kelompok Usia

Jumlah penduduk Desa Muntuk, Kabupaten Bantul berjumlah 2.625 KK terdiri dari: laki-laki 4.137 jiwa, perempuan 4.250 jiwa. Berdasarkan usia, jumlah penduduk di Desa Muntuk terlihat dalam tabel berikut ini.

TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK DESA MUNTUK MENURUT UMUR

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Klasifikasi
0 - 5	197	231	428	Penduduk Usia Non Produktif 18,48%
6 - 15	547	576	1.123	
16 - 25	1.398	1.282	2.678	Penduduk Usia Produktif 60,04%
26 - 55	1.181	1.178	2.359	
> 55	818	983	1.801	Penduduk Usia Non Produktif 21,47%
Jumlah	4.139	4.250	8.389	

Sumber: Data primer diolah 2008

Komposisi penduduk Desa Muntuk paling banyak pada usia 16-55 tahun dan komposisi penduduk paling sedikit pada kelompok umur >55 tahun. Sedangkan jika dilihat dari jumlah usia produktif, penduduk Desa Muntuk yang termasuk dalam kelompok usia produktif sebesar 60,04%. Sedangkan jumlah penduduk non produktif berjumlah 3.352 jiwa atau sekitar 39,96% dari total penduduk Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Muntuk masih tergolong rendah, dimana penduduk yang telah mengenyam pendidikan formal paling banyak adalah lulusan SD sebesar 24,49% penduduk atau sebanyak 120 jiwa dan penduduk yang hanya tamat SD sebesar 18,36%. Sedangkan penduduk yang tamat pendidikan formal yang lebih tinggi yaitu

SMA sebesar 6,12% dan lulusan Akademi/ Perguruan Tinggi hanya 1 orang saja. Lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Muntuk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL III.2
JUMLAH PENDUDUK DESA MUNTUK
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak tamat SD	613	14,14%
Tamat SD	2.298	53,02%
Tamat SMP	954	22,01%
Tamat SMA	437	10,08%
Akademi/PT	32	0,74%
Jumlah	4.334	100,00%

Sumber: Data primer diolah 2008

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Muntuk dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berupa daerah perbukitan dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Mata pencaharian masyarakat di Desa Muntuk terutama kaum laki-laki tidak hanya satu pekerjaan saja. Artinya, mereka memiliki pekerjaan utama yang sebagian besar sebagai petani.

Sedangkan pekerjaan tambahan berupa pekerjaan-pekerjaan informal seperti: tukang bangunan, perajin maupun bekerja di industri kecil serta berdagang. Pekerjaan tambahan ini dilakukan saat mereka tidak bertani, yakni pada saat lahan pertanian tidak bisa digarap. Petani di Desa Muntuk hanya bisa melakukan kegiatan bercocok tanam yang kurang intensif karena keterbatasan atau ketidakmampuan lahan untuk bisa ditanami lebih dari satu kali yang sangat minim. Sedangkan kaum perempuan lebih banyak bekerja

sebagai perajin utamanya karajinan bersumberutamakan dari bambu untuk pembuatan kebutuhan sehari-hari diluar kegiatan dimaksud kebanyakan kaum perempuan berdiam diri di rumah mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari.

E. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan masyarakat setempat dipengaruhi oleh mata pencahariannya. Mata pencaharian penduduk setempat sebagai petani dengan kemampuan bercocok tanam terbatas menyebabkan pendapatan yang diterimanya kecil. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat setempat, didapatkan data bahwa pendapatan rata-rata masyarakat setempat per hari dari hasil bertani tidak menentu. Oleh karena itu, maka masyarakat setempat mencari alternatif pekerjaan lain selain sebagai petani. Dengan tingkat pendapatan yang rendah tersebut, menyebabkan masyarakat mencari alternatif pekerjaan tambahan sebagai perajin, sopir, buruh bangunan, buruh industri kecil maupun berdagang. Pekerjaan tambahan tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan tingkat pendapatan rata-rata per hari sebesar Rp. 25.000,-.

3.1.3. Kondisi Partisipasi Masyarakat Desa Muntuk

Kondisi awal partisipasi masyarakat Desa Muntuk sangat perlu diketahui sebelum adanya program Desa Mandiri Pangan. Kondisi partisipasi masyarakat Desa Muntuk dapat digambarkan dengan potensi dan kendala yang berasal dari masyarakat setempat. Potensi partisipasi masyarakat Desa Muntuk antara lain:

- Semangat gotong-royong dan kesadaran telah ada, seperti kegiatan terjadwal dalam melaksanakan kegiatan di pedesaan.
- Kelembagaan di tingkat lokal dalam menyikapi kondisi dan dinamika pembangunan

yang berkembang cukup baik, yang dikoordinir oleh tokoh-tokoh setempat.

- Kesadaran terhadap pengembangan potensi yang ada di desanya telah dimiliki oleh masyarakat. Sehingga bagi mereka ada harapan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.
- Kesadaran akan ancaman sosial dan budaya yang terjadi bagi generasi muda bila ada hal-hal yang buruk terjadi di desanya dengan membuat semacam peraturan, peringatan ataupun sanksi jika perlu dengan berlandaskan norma-norma yang ada.
- Keinginan dan motivasi masyarakat untuk maju dan dapat bersaing sudah ada.



Sumber : Hasil Analisis 2008

GAMBAR 3.3. GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA MUNTUK

Sedangkan faktor kendala partisipasi yang berasal dari masyarakat Desa Muntuk antara lain:

- Perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat, berpotensi menjadi konflik bila tidak

dikelola dengan baik.

- Lembaga-lembaga desa belum maksimal untuk dapat mengakomodir dan melihat kebutuhan masyarakat.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat secara umum, menimbulkan masalah pada tingkat pemahaman dan sudut pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah baik yang berkaitan dengan pembangunan dan organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal.
- Keterbatasan pengetahuan dalam memicu kreatifitas dan inovasi untuk mengembangkan ekonomi di tingkat lokal yang mendukung program pembangunan.

3.2. Program Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Sasaran dari program desa mandiri pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi.

Sasaran wilayah adalah desa yang merupakan daerah rawan pangan yang merupakan titik-titik potensi penyebab rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Penerima manfaat program adalah aparat dan rumah tangga miskin.

Melalui program desa mandiri pangan diharapkan masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan

kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian.

Pengembangan desa mandiri pangan merupakan suatu kegiatan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah perdesaan. Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil (perdesaan) sebagai basis kegiatan pertanian.

Pelaksanaan program desa mandiri pangan difasilitasi dengan masukan antara (intermediate input) yaitu: 1) pelatih (instruktur), 2) pendamping (bidang manajemen kelompok, manajemen usaha, dan teknis), 3) modal, 4) sarana dan prasarana, 5) tenaga kerja, serta 6) teknologi.

Masukan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: kegiatan pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, aksesabilitas), harmonisasi sistem ketahanan pangan (subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi) dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan. Proses pengembangan desa mandiri pangan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif.

A. Perencanaan Program Desa Mandiri pangan

Perencanaan program aksi desa mandiri pangan dilakukan secara berjenjang yang di mulai dari perencanaan di tingkat kelompok masyarakat dan perencanaan di tingkat desa. Dalam proses perencanaan tersebut didasarkan pada hasil pendataan kondisi awal (base line).

Penyusunan perencanaan di tingkat kelompok dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh pendamping. Rencana yang disusun ditingkat kelompok mencakup perencanaan penguatan kelompok dan perencanaan pengembangan usaha kelompok yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) yang selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan rencana di tingkat desa.

Penyusunan perencanaan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aparat, pemangku kepentingan (tokoh masyarakat) untuk dapat mengumpulkan informasi kondisi desa, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan desa menjadi rawan pangan (lahan, air, iklim, teknologi, input produksi, SDM), dan langkah-langkah pemecahan secara mandiri.

Perencanaan Desa dilakukan secara partisipatif melalui teknik PRA oleh Tim Pangan Desa bersama *stakeholder* yang difasilitasi oleh pendamping. Perencanaan pembangunan desa merupakan rencana mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil base line survei dan PRA.



Sumber : Hasil Analisis 2008

GAMBAR 3.4. PERENCANAAN PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN

Mekanisme Perencanaan pada program desa mandiri pangan dilakukan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dilakukan di tingkat desa dengan lebih memposisikan wakil-wakil kelompok dan para tokoh masyarakat formal maupun non formal desa (Lembaga Pembangunan Desa) sebagai perencana kegiatan.
- Peserta lain dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah (i) Tim Pangan Desa (ii) Penyuluh, (iii) Pokja Tingkat Kabupaten, (iv) Pendamping (v) Lembaga Pembangunan Desa (LPD) (vii) Kepala Desa dan Kaur Pembangunan. Para peserta untuk huruf (i) sampai (iv) tersebut lebih diposisikan sebagai fasilitator.
- Sebagai kendali perencanaan dan realisasi kegiatan perlu dibahas kembali mengenai keluaran, tujuan, target, sasaran, volume, indikator, lokasi, waktu, anggaran dan penanggungjawab. Alasan untuk setiap kegiatan yang dimunculkan juga diuraikan, termasuk kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa.
- Rencana pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan baik untuk *on farm*, *off farm*, keuangan mikro maupun usaha mikro.

B.

Pengorganisasian Program Desa Mandiri Pangan

Program aksi desa mandiri pangan melibatkan kegiatan lintas sektor, untuk itu perlu dilakukan pengorganisasian baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten dibawah

koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mempertegas fungsi dan peran masing-masing lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagai koordinator pelaksana program.
2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
3. Pokja Desa Mapan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bertindak sebagai pelaksana kegiatan desa mapan. Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan.
4. Camat bertindak sebagai koordinator desa pelaksana program aksi desa mapan di wilayah kerjanya.
5. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasional program aksi desa mapan di tingkat desa
6. Tim Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di Desa

Program pengembangan desa mandiri pangan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program aksi secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi dan pusat.

1. Tingkat Desa

Tim Pangan Desa terdiri dari 5 (lima) orang yaitu aparat desa (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), perwakilan dari masyarakat khususnya masyarakat miskin (2 orang) dan Ketua Tim Penggerak PKK (1 orang). Tim ini bertugas bersama pendamping untuk merumuskan perencanaan dan menggerakkan pelaksanaan kegiatan

hingga pemantauan dan evaluasi. Tim Pangan Desa akan menggantikan peran pendamping, setelah tahapan Program Aksi Desa Mandiri Pangan berakhir.

Tugas dan fungsi Tim Pangan tingkat desa, dibantu oleh Pendamping dalam:

- a. Mengenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.
- b. Menjalan fungsi pelaporan situasi pangan dan cadangan pangan desa dan perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan di desa dengan formulir yang telah disepakati.
- c. Mengintegrasikan berbagai sumberdaya pembangunan di perdesaan
- d. Mengadakan pertemuan Tim Pangan Desa minimal dilaksanakan dua bulan sekali.

2. Tingkat Kecamatan

Camat memfasilitasi pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di wilayahnya.

Tugas dan fungsi Camat:

- a. Mengkoordinasikan Kepala Desa dalam pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di wilayahnya
- b. Membantu aparat propinsi dan kabupaten dalam proses penetapan lokasi

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pokja tingkat kabupaten di Ketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat Kabupaten/Kota dengan anggota dinas-dinas terkait dengan ketahanan pangan, Camat dan bank penyalur.

Tugas dan fungsi pokja tingkat Kabupaten/Kota :

- a. Melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam program aksi desa mandiri pangan.
 - c. Melakukan Identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program aksi mandiri pangan.
 - d. Merumuskan Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Wilayah Kabupaten
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Program Aksi Desa Mandiri Pangan di tingkat Propinsi dan Pusat.
 - f. Mengadakan Pertemuan Pokja ditingkat kabupaten minimal 3 bulan sekali.
4. Tingkat Propinsi

Pokja ditingkat propinsi diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat Propinsi dengan anggota dinas-dinas lain yang terkait dengan ketahanan pangan.

Tugas dan fungsi Pokja Tingkat Propinsi :

- a. Melakukan sosialisasi di tingkat propinsi dan kabupaten.
- b. Merumuskan program pengembangan desa mandiri pangan di wilayah propinsi
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam program aksi desa mandiri pangan
- d. Mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan program aksi mandiri pangan.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Program Aksi Desa Mandiri Pangan di tingkat Pusat

- f. Mengadakan pertemuan Pokja di tingkat propinsi yang dilaksanakan minimal minimal 4 bulan sekali.

5. Tingkat Pusat

Susunan Organisasi Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan ditingkat pusat diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian yang anggotanya terdiri dari instansi terkait dengan ketahanan pangan.

Tugas dan fungsi pokja tingkat Pusat:

- a. Melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan lembaga terkait dalam pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan
- b. Merumuskan kebijakan dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan
- c. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program aksi mandiri pangan.
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan/Menteri Pertanian.
- e. Mengadakan pertemuan Pokja di tingkat pusat yang dilaksanakan minimal 6 bulan sekali.

C. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan

Program Aksi Desa Mandiri Pangan meliputi empat tahapan pelaksanaan yaitu: tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian.

Tahap Persiapan (Tahun Pertama)

Tahap persiapan dilaksanakan dalam waktu satu tahun dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Seleksi lokasi

Seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat: kabupaten, kecamatan, dan desa.

2. Sosialisasi program

- Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang desain program aksi desa mandiri pangan dan rencana implementasi kegiatan untuk *stakeholder*.
- Sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan forum Dewan Ketahanan Pangan baik di tingkat propinsi, kabupaten (kecamatan dan desa) dengan melibatkan aparat dari instansi terkait, swasta dan tokoh masyarakat setempat.

3. Pendampingan

Kegiatan pendampingan meliputi:

- a. Rekrutmen pendamping
- b. Pelatihan pendamping
- c. Pelaksanaan pendampingan



Sumber: Hasil Analisis 2008

GAMBAR 3.5. PENDAMPINGAN

4. Penyusunan Data Dasar Desa

Penyusunan data dasar desa (data base) dilakukan dalam dua tahap, yaitu : Pengumpulan Data Dasar Rumah Tangga dan Survei Rumah Tangga (SRT). Data lain yang dikumpulkan adalah profil desa.

Data base tersebut selanjutnya digunakan sebagai:

- a. Data dasar untuk penyusunan rencana pembangunan desa mandiri pangan
- b. Bahan acuan (*bench mark*) dalam pemantauan dan evaluasi.

5. Pelatihan

Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan melalui pelatihan kepada : petugas pendamping/pembina kemitraan, pamong desa, aparat tingkat

propinsi/kabupaten/kecamatan, petani dan pengurus kelembagaan petani. Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang di tingkat propinsi dan kabupaten.

6. Pemberdayaan kelompok afinitas

Kelompok afinitas adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.



Sumber : Hasil Analisis 2008

GAMBAR 3.6. KELOMPOK AFINITAS KERAJINAN

7. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Mandiri Pangan Partisipatif

Perencanaan Desa secara Partisipatif adalah suatu penyusunan rencana pembangunan, khususnya ketahanan pangan tingkat desa yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan dalam melihat persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan pelibatan semua *Stakeholder* dan inisiatif masyarakat. Upaya membuat hasil perumusan bersama *stakeholder* dari

tindakan–tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana caranya untuk bisa mencapai tujuan tersebut melalui teknik PRA.

Tahap Penumbuhan (Tahun Kedua)

Tahap penumbuhan dititikberatkan pada penguatan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pelayanan masyarakat.

1. Penumbuhan Kelembagaan Aparat

a. Pemberdayaan Penyuluh

Menumbuhkan pemahaman kepada penyuluh tentang pentingnya program aksi desa mandiri pangan.

Langkah-langkah:

- Melakukan koordinasi terhadap kelembagaan penyuluh.
- Sosialisasi program aksi mandiri pangan.
- Mengintegrasikan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam Program Penyuluhan.
- Memberikan penyuluhan kepada kelompok sasaran.

b. Aparat yang Menangani Ketahanan Pangan Tingkat Propinsi dan Kabupaten.

Menumbuhkan pemahaman kepada Aparat yang menangani ketahanan pangan Tingkat Propinsi dan Kabupaten tentang pentingnya program aksi desa mandiri pangan.

Langkah-langkah :

- Pembinaan bagi aparat pelaksana Program aksi desa mandiri pangan.
- Workshop hasil pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan.

2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

a. Pemberdayaan kelompok afinitas

Pemberdayaan kelompok afinitas pada tahap penumbuhan dilakukan melalui peningkatan kapasitas para anggota kelompok baik di bidang organisasi maupun dalam penumbuhan usaha. Kegiatan pemberdayaan kelompok tersebut dilakukan melalui pelatihan oleh aparat di tingkat kabupaten dan fasilitasi tenaga pendamping.

b. Pemberdayaan lembaga usaha ekonomi perdesaan.

Pemberdayaan lembaga usaha ekonomi perdesaan dilakukan melalui: Identifikasi dan pengembangan potensi usaha produktif, pemupukan modal usaha, pengembangan potensi usaha kelompok, pelatihan kewirausahaan, teknis, manajemen serta pembinaan kegiatan usaha ekonomi produktif.

3. Pemberdayaan Kelembagaan Pelayanan

Menumbuhkembangkan kelembagaan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Kelembagaan pelayanan meliputi:

- Lembaga pelayanan usaha ekonomi produktif seperti: lumbung pangan, koperasi, pasar, perbankan, dan jasa lainnya.
- Lembaga pelayanan pangan dan gizi, seperti: posyandu, PKK, Dasa wisma, pelayanan kesehatan masyarakat.

Penumbuhan atau penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat organisasi masing-masing kelembagaan sesuai dengan peran dan fungsinya melalui pembenahan administrasi dan mekanisme pelayanan.

Fasilitasi dari pemerintah yang dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dengan Program Aksi Mandiri Pangan.

1. Pelatihan

Peserta: Kelompok afinitas dan lembaga-lembaga yang telah ada dan berkembang di masyarakat seperti: Lumbung Pangan, kelembagaan pangan lokal dan pekarangan, Koperasi Tani, KUD, Kelompok Tani, KWT .

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok afinitas, meliputi :

- Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat.
- Membantu masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan dan mencari mitra usaha.
- Membantu penyuluh pertanian lapangan dalam penerapan teknologi spesifik lokasi dan pengolahan hasil.

3. Perbaikan Sarana dan Prasarana

- *On Farm*: irigasi, jalan usaha tani, sarana usaha tani
- *Off Farm*: sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran, lembaga pengolahan hasil usaha
- Lembaga permodalan pedesaan.
- Lembaga penunjang, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas umum

4. Penguatan Modal Usaha

Tujuan :

- Meningkatkan kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola kegiatan dan keuangan bersama.
- Meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengakses permodalan.
- Meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha pertanian dan non pertanian.

Prinsip-prinsip:

- Dana penguatan modal usaha bukan merupakan modal yang habis pakai.
- Dana penguatan modal merupakan dana yang harus berkembang dan bergulir di lokasi Desa mandiri pangan.

5. Harmonisasi Sistem Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Keberhasilan pembangunan ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya.

a. Subsistem Ketersediaan

- 1) Peningkatan produksi pangan (tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan)
 - Diversifikasi produksi pangan
 - Intensifikasi usaha pemanfaatan pekarangan
- 2) Peningkatan usaha pemenuhan cadangan pangan

- Cadangan pangan keluarga
- Cadangan pangan masyarakat desa
- Cadangan pangan wilayah

b. Sub sistem Distribusi

- 1) Menjamin kelancaran distribusi pangan antar wilayah
- 2) Pengembangan jaringan informasi pasar dan harga antar wilayah.
- 3) Pengendalian harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, secara wajar

c. Sub sistem Konsumsi

- 1) Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya wilayah
- 2) Pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan olahan
- 3) Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap konsumsi pangan 3B yang halal, sehat dan aman
- 4) Memberikan pendidikan pangan dan gizi masyarakat atau usaha perbaikan gizi keluarga, melalui: penyuluhan pangan dan gizi masyarakat, penganekaragaman pola konsumsi, peningkatan keterampilan dan pengolahan pangan dan peningkatan nilai tambah pangan.

Harmonisasi sistem ketahanan pangan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, sampai terwujudnya kemandirian pangan masyarakat di tingkat desa.

Tahap Pengembangan (Tahun Ketiga)

Tahap pengembangan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dimulai pada tahun ketiga. Arah pengembangan dilakukan melalui pengembangan kapasitas masing-masing lembaga sesuai dinamika dan peluang yang ada, seperti:

1. Lembaga masyarakat

- Pengembangan dan pemeliharaan prasarana (pengairan, jalan usaha tani, air bersih, transportasi dan komunikasi di perdesaan)
- Pengembangan dan penerapan teknologi untuk perbaikan produksi (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas).
- Pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan layak secara ekonomi.
- Pengembangan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan.

2. Lembaga Pelayanan Masyarakat

- Gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman
- Pengembangan sistem pemantauan, deteksi dan respon dini kerawanan pangan

Tahap Kemandirian (Tahun Keempat)

Bekerjanya fungsi kelembagaan perdesaan berdasarkan standarisasi organisasi, tertib administrasi dalam pengelolaan modal sebagai landasan untuk mencapai kemandirian. Proses kemandirian masyarakat dilaksanakan pada tahun keempat sampai terwujudnya ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Proses kemandirian masyarakat desa ditandai dengan:

- Meningkatnya peran masyarakat dalam penyediaan dan distribusi pangan.
- Meningkatnya kemampuan kelompok afinitas dalam melakukan kegiatan usaha.
- Meningkatnya kemandirian kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan.

- Meningkatnya jaringan kemitraan usaha dan lembaga keuangan/bank.
- Meningkatnya peran Tim Pangan Desa sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan.

D. Pembiayaan

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai program aksi mandiri pangan berasal dari APBN, APBD I, APBD II dan sumber dana lainnya, yang disalurkan melalui instansi dan lembaga terkait dalam pembangunan wilayah pedesaan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Pemanfaatan dana sesuai dengan tupoksi yang ada di masing-masing instansi terkait untuk mendukung program aksi desa mandiri pangan. Koordinasi pelaksanaan program kerja kegiatan di masing-masing instansi pelaksana melalui Dewan Ketahanan Pangan yang ada di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Pembiayaan operasional program aksi desa mandiri pangan adalah alokasi dana yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, serta alokasi dana yang ada di masing-masing instansi lintas sektoral yang pemanfaatannya untuk mendukung program pembangunan wilayah pedesaan. Dana APBN yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dialokasikan di tingkat pusat, propinsi (dana dekonsentrasi), dan kabupaten (dana tugas pembantuan). Untuk mendukung operasional kegiatan program aksi desa mandiri pangan, maka Propinsi diwajibkan mengalokasikan dana APBD propinsi minimal sebesar 20% dari dana dekonsentrasi propinsi, sedangkan kabupaten diwajibkan mengalokasikan dana APBD kabupaten minimal sebesar 20% dari dana tugas pembantuan kabupaten. Sedangkan dukungan dana pembangunan wilayah pedesaan untuk program aksi desa mandiri pangan yang berasal dari instansi lintas sektoral diatur menurut ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi.

Dalam rangka kesinambungan dan keberlanjutan program aksi desa mandiri pangan, setiap tahun harus dialokasikan dana operasional untuk desa lama yang telah ditumbuhkan pada tahun sebelumnya dan alokasi dana untuk desa baru dengan perincian kegiatan sesuai dengan masing-masing tahapan.

E. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pemantauan dan Evaluasi secara Partisipatif (PEP). Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif dilaksanakan secara mendalam pada semua tahap pelaksanaan kegiatan desa mandiri pangan agar setiap proses berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan termasuk peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Untuk itu pelaksanaan pemantauan harus dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pusat. Sedangkan evaluasi kegiatan dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun, dengan tujuan mengetahui perkembangan dan tingkat

keberhasilan program pengembangan desa mandiri pangan melalui pencapaian indikator tiap-tiap tahapan.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Desa melaporkan pada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi pangan dan cadangan pangan desa serta perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan di desa dengan formulir yang telah disepakati. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke kabupaten/kota dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan form yang telah disepakati.

Kabupaten/kota memantau kegiatan dilokasi secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan desa dan kecamatan ke propinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan *feedback* kepada desa dan kecamatan serta melakukan *follow up* terhadap kondisi yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat kabupaten/kota.

Propinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan dan melaporkan ke pusat sesuai dengan format yang disepakati. Selanjutnya propinsi memberikan *feedback* kepada kabupaten terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat propinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan pemantauan kegiatan lapang secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan propinsi dan selanjutnya memberikan *feedback* kepada propinsi atau melakukan follow up terhadap kegiatan yang

memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat pusat.

3.3. Ringkasan

Melalui program desa mandiri pangan diharapkan masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah dan mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat tahun berturut-turut sesuai tahapan program yaitu pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Kegiatan difokuskan pada daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang telah ada di tingkat desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat.

Dipilihnya Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul sebagai lokasi program desa mandiri pangan adalah karena desa dimaksud adalah desa rawan pangan dengan kondisi kecukupan dan akses pangan yang masih rendah. Kondisi partisipasi masyarakat sudah ada dengan memanfaatkan kelembagaan lokal yang ada, namun relatif belum optimal. Untuk menumbuhkan dan lebih mengoptimalkan peran kelembagaan yang ada perlu adanya peningkatan SDM dari pelaku sehingga akan mampu mengelola SDA yang ada secara optimal dan terdistribusi merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melakukan fungsi pengelolaan dan layanan. Pada program desa mandiri pangan peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui kegiatan berupa pelatihan

teknis, pengelolaan administrasi, pengorganisasian, peningkatan keterampilan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kewirausahaan serta dilakukan magang pada lembaga yang sudah eksis sehingga dapat menerapkan strategi pengembangan menuju kemandirian.

Arah penelitian difokuskan pada tahapan persiapan dan penumbuhan yang telah berlangsung selama dua tahun. Pada kedua tahapan ini paling banyak kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, diantaranya dalam identifikasi awal lokasi desa mandiri pangan meliputi kegiatan survei data dasar rumah tangga dan survei rumah tangga. Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa partisipatif dan penyusunan data dasar desa. Dalam hal pemberdayaan masyarakat kegiatan meliputi pendampingan, pelatihan-pelatihan baik administrasi maupun teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku kegiatan di desa mandiri pangan. Terkait dengan penguatan kelembagaan kegiatan yang tercakup dalam program desa mandiri pangan meliputi pembentukan kelompok fasilitator desa mandiri pangan yang akan menjadi pendamping masyarakat dalam berorganisasi serta penumbuhan kelompok afinitas yang akan menjadi sarana masyarakat untuk belajar berusaha tentunya melalui berbagai kerjasama dan dukungan dari segenap instansi lintas sektor.

BAB IV

STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA MUNTUK, KABUPATEN BANTUL

4.1 Identifikasi Program Desa Mandiri Pangan Tahap Persiapan dan Penumbuhan Di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul

Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul merupakan desa miskin dengan jumlah KK miskin yang cukup besar, sementara potensi pengembangan desa khususnya dalam pembangunan ketahanan pangan cukup besar yang dicerminkan dengan besarnya atensi masyarakat untuk berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan keluarga baik bercocok tanam, beternak maupun usaha lainya seperti kerajinan, dan jasa perdagangan. Disamping itu sarana prasarana yang meliputi jalan yang mudah untuk melaksanakan distribusi produk maupun jasa perdagangan lainnya.

Melihat potensi diatas pemerintah dalam hal ini melalui Dinas pertanian sebagai unit pelaksana ketahanan pangan di Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Upaya yang dilakukan dengan penetapan Desa Muntuk sebagai lokasi program desa mandiri pangan dengan mengintegrasikan segenap potensi melalui subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi melalui tahapan pelaksanaan program desa mandiri pangan yang meliputi tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Pada tahun 2008 ini telah memasuki tahun pengembangan atau tahun ketiga dari rencana empat tahun tahapan pelaksanaan program. Pada masing-masing tahapan pelaksanaan program ada bermacam kegiatan yang pada intinya merupakan upaya untuk meningkatkan atau memberdayakan masyarakat di Desa Muntuk agar mampu mencapai ketahanan pangan rumah tangga dan ketahanan pangan wilayah atau desa. Selain itu dengan program desa mandiri pangan ini pemerintah

mencoba merangsang masyarakat untuk lebih besar menggali potensi yang ada sehingga mampu untuk menangkap peluang-peluang yang ada untuk peningkatan taraf hidupnya.

Program desa mandiri pangan ini juga mengintegrasikan program-program pembangunan yang sudah dan akan ada di Desa Muntuk. Bentuk sinergitas ini baik dalam hal pembangunan fisik sarana-prasarana maupun pembangunan sumberdaya manusia dalam hal pembinaan maupun bentuk lain yang menunjang pembangunan pedesaan.

Pada bagian pembahasan ini, akan dilakukan identifikasi program desa mandiri pangan khususnya pada tahapan persiapan dan penumbuhan. Identifikasi hanya dibatasi pada dua tahun pelaksanaan program disamping karena saat ini tahapan program baru jalan pada tahun ketiga atau tahap pengembangan juga dikarenakan pada dua tahun pertama inilah merupakan dasar dari pelaksanaan program secara keseluruhan dimana kegiatan yang ada didalamnya banyak melibatkan peran aktif masyarakat. Diharapkan dengan melakukan identifikasi, dapat diputuskan bahwa apakah program yang telah ditetapkan tersebut telah sesuai dengan kondisi desa yang sebenarnya. Pada dasarnya, suatu program/kegiatan pembangunan yang bersifat *top-down* harus sesuai dengan kondisi objeknya.

Fokus identifikasi program desa mandiri pangan tahap persiapan dan penumbuhan adalah: 1) Seleksi desa yang meliputi seleksi desa mandiri pangan, sosialisasi desa mandiri pangan, penyusunan data dasar desa, penyusunan rencana pembangunan desa partisipatif. 2) Pemberdayaan masyarakat yang meliputi pendampingan, pelatihan, dan 3) Penguatan kelembagaan yang meliputi pembentukan kelompok fasilitator, pemberdayaan kelompok afinitas.

Secara lebih dalam dapat diuraikan identifikasi program pada masing-masing kegiatan pada tahapan desa mandiri pangan :

1. Seleksi Desa

Seleksi desa merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan program desa mandiri pangan. Proses seleksi dilakukan berdasarkan data pemetaan rawan pangan yang dilakukan di tingkat kabupaten. Tujuan dilakukan seleksi desa adalah untuk mendapatkan daftar nama desa miskin sebagai calon penerima program desa mandiri pangan. Sasaran pelaksanaan seleksi desa diarahkan kepada desa miskin yang memenuhi syarat yang ditetapkan bersama dan diutamakan desa yang belum pernah tersentuh proyek atau program pemerintah sebelumnya. Tahapan pelaksanaan seleksi desa tingkat kabupaten dimulai dengan pertemuan program desa mandiri pangan di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh dinas terkait di tingkat kabupaten dan pemerintah daerah. Kegiatan dimulai dari pemetaan desa-desa miskin yang ada di kabupaten tersebut sesuai data sekunder yang diperoleh dari pemerintah daerah dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

Peserta dibagikan daftar desa miskin yang diperoleh dari pemerintah daerah setempat dengan kriteria desa miskin yang meliputi;

- Merupakan kriteria desa miskin dengan jumlah KK miskin sebesar 50%
- Mempunyai potensi (SDA dan SDM) mendukung program pembangunan ketahanan pangan
- Tingkat kesejahteraan dan pendapatan keluarga diukur dengan spesifik lokal.
- Keterbatasan sarana dan prasarana

Daftar desa miskin dimaksud disampaikan bahwa desa-desa yang sesuai dengan kriteria miskin terutama desa yang belum pernah menerima kegiatan proyek dari Dinas/instansi, oleh peserta yang hadir diberi tanda.

Membuat potensi pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan untuk pengentasan desa miskin secara bersama. Kemudian membuat prioritas desa miskin yang dipilih untuk menerima program pada tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Penentuan prioritas desa ini ditentukan oleh jarak desa dari pemerintahan kabupaten, berat ringannya permasalahan yang dihadapi sekurang-kurangnya dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi desa tersebut terkait dengan kriteria desa miskin. Rata-rata desa sasaran untuk tahun pertama disetiap kabupaten adalah adalah 2 desa sesuai dengan pemetaan sebagai lokasi atau merupakan desa rawan pangan. Pada tahun berikutnya desa sasaran ditambah sesuai dengan pola pendekatan program yang sudah ada. Setelah didapat daftar desa berdasarkan kesepakatan, maka disepakati hasil tersebut merupakan desa lokasi dan ditetapkan sebagai desa mandiri pangan.

2. Sosialisasi Desa Mandiri Pangan

Sosialisasi desa mandiri pangan dilakukan pada tahun berjalan pada tahap persiapan bersamaan dengan kegiatan penetapan desa mandiri pangan. Proses sosialisasi dilakukan berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa. Sosialisasi dilakukan melalui forum dewan ketahanan pangan dengan menghadirkan aparat instansi teknis, swasta dan tokoh masyarakat setempat difasilitasi oleh dinas pertanian sebagai stake holder pelaksana program desa mandiri pangan. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait program desa mandiri pangan serta aspek-aspek yang terkait didalamnya.

a. Sosialisasi Di Tingkat Kabupaten

Tahapan pelaksanaan sosialisasi desa mandiri ditingkat kabupaten dilaksanakan dalam wadah dewan ketahanan pangan kabupaten dengan peserta diantaranya dinas terkait (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Dinas Peternakan, Kimpraswil, Kantor Peranan Wanita, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan

BKKBN), dan Pemerintah Daerah. Metodologi yang digunakan adalah diskusi terarah atau "*Focus Group Discussions*" (FGD) untuk mensosialisasikan program dan pelaksanaan program serta mendapatkan umpan balik tanggapan/respon atas program desa mandiri pangan.

b. Sosialisasi Di Tingkat Kecamatan

Peserta sosialisasi terdiri dari unsur aparat kecamatan terkait, Bapak Camat, seluruh kepala desa yang ada dalam daftar, perwakilan dari PKK, dan unsur dinas terkait tingkat kecamatan seperti Penyuluh Pertanian Spesialis. Proses diskusi mekanismenya sama dengan tingkat kabupaten, yaitu peserta disampaikan materi program dan diharapkan umpan balik dari peserta. Peserta diminta memberikan masukan tentang materi program termasuk program-program yang sebaiknya dilakukan di desa tersebut tentunya disesuaikan dengan kerangka besar program desa mandiri pangan di tingkat desa.

c. Sosialisasi Di Tingkat Desa

Sosialisasi tingkat desa dihadiri oleh aparat desa terkait, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, perwakilan kelembagaan desa setempat, perwakilan PKK, Penyuluh Pertanian Lapang/ PPL. Proses diskusi mekanismenya sama dengan tingkat kabupaten, yaitu peserta dibagikan daftar desa miskin hasil workshop tingkat kecamatan. Peserta diberikan pemahaman kriteria desa miskin tersebut untuk memberikan masukan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program. Di tingkat desa sedikit berbeda dengan kegiatan sosialisasi ditingkat atasnya, dimana peserta atau masyarakat juga diminta menentukan desa prioritas program yang akan dilaksanakan termasuk lebih spesifik dalam rangka pembentukan kelompok-kelompok yang akan menerima manfaat dari program desa mandiri pangan termasuk sejauh mana kesiapan kelompok atau masyarakat dalam melaksanakan program desa mandiri pangan. Kegiatan sosialisasi tingkat dusun dilakukan di balai dusun dengan dihadiri aparat dusun dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat tingkat dusun agar pemahaman program desa mandiri pangan diketahui oleh mereka sebagai lembaga pemerintahan dan pemuka masyarakat dan masyarakat di tingkat dusun. Proses sosialisasi sangat tidak mudah terutama saat menyampaikan tahapan dan teknis pelaksanaan program, sehingga fasilitator dan pendamping harus mampu memberikan analisa kepada mereka akan kelebihan dari pendekatan program desa mandiri pangan. Satu kunci yang perlu dipahami oleh seorang fasilitator untuk memudahkan pelaksanaan sosialisasi adalah sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlu melakukan pertemuan informal dengan aparat setempat dan pemuka masyarakat sehingga apabila kedua *stakeholder* ini sudah paham akan memudahkan dalam sosialisasi di tingkat masyarakat.

3. Penyusunan Data Dasar Desa

Penyusunan data dasar desa (data base) dilakukan dalam dua tahap, yaitu : Pengumpulan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) dan Survei Rumah Tangga (SRT). Data lain yang dikumpulkan adalah profil desa. Pada awal pelaksanaan program data dasar desa dikumpulkan dari seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Muntuk untuk selanjutnya diolah lebih lanjut untuk mendapatkan sejumlah KK miskin yang nantinya akan mendapatkan manfaat awal dan langsung dari desa mandiri pangan. Data base tersebut selanjutnya digunakan sebagai:

- c. Data dasar untuk penyusunan rencana pembangunan desa mandiri pangan
- d. Bahan acuan (*bench mark*) dalam pemantauan dan evaluasi.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Partisipatif

Perencanaan program aksi desa mandiri pangan dilakukan secara berjenjang yang di mulai dari perencanaan di tingkat kelompok masyarakat dan perencanaan di tingkat desa. Dalam proses perencanaan tersebut didasarkan pada hasil pendataan kondisi awal (*base line*).

Penyusunan perencanaan di tingkat kelompok dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh pendamping. Rencana yang disusun ditingkat kelompok mencakup perencanaan penguatan kelompok dan perencanaan pengembangan usaha kelompok yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) yang selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan rencana di tingkat desa.

Penyusunan perencanaan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aparat, pemangku kepentingan (tokoh masyarakat) untuk dapat mengumpulkan informasi kondisi desa, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan desa menjadi rawan pangan (lahan, air, iklim, teknologi, input produksi, SDM), dan langkah-langkah pemecahan secara mandiri.

Perencanaan Desa dilakukan secara Partisipatif melalui teknik PRA oleh Tim Pangan Desa bersama *stake holder* yang difasilitasi oleh Pendamping. Perencanaan pembangunan desa merupakan rencana mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil *base line survei* dan PRA.

5. Pendampingan

Proses pengembangan masyarakat menuju kemandirian pangan dalam Program desa mandiri pangan melalui penumbuhan kelompok mandiri. Dengan melalui kelompok masyarakat afinitas ini diharapkan pada gilirannya kelompok-kelompok tersebut akan mencapai kemandirian kelompok sehingga menjadi berkesinambungan.

Untuk mencapai kondisi tersebut perlu adanya pendampingan kelompok yang terprogram dan terencana dalam arti pendampingan dari pihak di luar masyarakat sasaran hanya bersifat sementara, sehingga diharapkan pendampingan itu akan dilaksanakan oleh motivator yang berasal dari masyarakat.

Dalam Program desa mandiri pangan rekrutmen pendamping dilaksanakan pada tahun pertama atau tahun awal pelaksanaan program, kondisi ini dengan pertimbangan tenaga pendamping harus sudah bisa secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program khususnya pada tahun pertama tahap persiapan desa.

Petugas pendamping masyarakat ditetapkan kabupaten yang ditumbuhkan dari tokoh lokal sebagai kader non formal di tingkat akar rumput yang berperan meneruskan fungsi pendampingan dan motivator dalam mendorong pengembangan usaha masyarakat di masa akan datang secara berkelanjutan serta memiliki komitmen, profesional dan motivasi. Tenaga pendamping yang telah ditetapkan diberikan semacam pembelajaran baik melalui pembinaan, pelatihan maupun magang, sehingga pendamping tidak merasa terlalu terbebani untuk belajar. Untuk menghasilkan tenaga pendamping yang siap memang memerlukan waktu untuk berproses dan selama satu tahun pertama diharapkan di masing-masing kelompok mandiri sudah memiliki tenaga pendamping yang bisa memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan program desa mandiri pangan.

Pada saatnya tenaga pendamping akan mampu menjadi pendamping bagi masyarakat dan khususnya bagi kelompok mandiri yang ada di desanya masing-masing. Pendampingan juga dimaksudkan untuk dapat memotivasi kelompok mandiri untuk

dapat mencapai tahapan kelompok mandiri yang berkesinambungan, untuk dapat mencapai tahapan tersebut pendampingan harus secara konsisten dan terencana. Adapun kelompok dapat dikatakan pada tahapan "Mandiri" apabila setelah dilaksanakan evaluasi oleh Tim Evaluasi.

Tugas tenaga pendamping adalah:

- Mengumpulkan data dasar kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- Menumbuhkan kader pangan desa dan kelompok afinitas.
- Menumbuhkan lembaga keuangan desa.
- Membimbing kelompok dalam mengembangkan usaha produktif.

6. Pelatihan

Proses pelatihan dalam program desa mandiri pangan dilakukan berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten maupun desa dengan peserta dari mulai aparat pelaksana, fasilitator, tenaga pendamping, kelompok afinitas dan masyarakat sebagai pelaksana langsung program. Materi pelatihan menyesuaikan dengan peserta baik pelatihan manajemen, teknis maupun tentang operasional desa mandiri pangan. Dari pelatihan yang dilaksanakan diharapkan dihasilkan umpan balik bagi peserta sehingga mampu menguasai, memahami materi latihan dengan tahapan (1) mengalami; (2) mengungkapkan; (3) menganalisis; (4) menemukan prinsip; (5) menerapkan prinsip. Adapun tahapan pelaksanaan pelatihan partisipatif adalah:

- Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang merupakan pembulatan dari keseluruhan materi pelatihan dan dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang akan peserta lakukan.
- Evaluasi seluruh proses pelatihan oleh peserta yang berguna untuk pembelajaran mereka dalam kegiatan pelatihan berikutnya.

Dari pelaksanaan pada berbagai pelatihan petugas selalu melakukan monitoring manfaat dari pelatihan yang sudah diberikan tersebut melalui RTL yang sudah mereka buat karena hasil monitoring tersebut bahan masukan bagi pelaksanaan program desa mandiri pangan di tingkat lapangan, juga terkait dengan evaluasi sejauh mana materi itu bisa diserap dan dipahami oleh peserta sehingga menjadi bahan perbaikan lebih lanjut.

Bagi tenaga pelaksana, dalam menyempurnakan pemahaman dari suatu pembekalan pelatihan adalah pada saat adanya koordinasi bulanan di lembaga atau instansi induk, sehingga koordinasi disini selain menyangkut masalah pelaksanaan teknis lapang juga pembekalan yang dirasakan perlu didukung dari lembaga/ instansinya untuk penguatan kapasitas sebagai pendamping.

Bagi pendamping, sebagai materi masukan untuk pelaksanaan program bagi kelompok maupun masyarakat untuk melengkapi materi yang diberikan kepada kelompok pada saat pendampingan kepada kelompok dengan menggunakan metoda penyegaran pada saat pertemuan rutin, maupun saat pendampingan di lokasi.

7. Pembentukan Kelompok Fasilitator

Kelompok fasilitator pada program desa mandiri pangan adalah pembentukan pokja pangan desa yang ada di tingkat kabupaten yang bertugas dalam pelaksanaan pengawalan program. Unsur anggota dalam pokja pangan kabupaten terdiri dari instansi teknis di tingkat kabupaten termasuk didalamnya dari unsur pemda. Sementara di tingkat desa ada kelembagaan pengambil keputusan meliputi tim pangan desa, lembaga keuangan desa termasuk unsur aparat ditingkat desa berikut tokoh masyarakat yang ada. Tugas kelembagaan pengambil keputusan ini terkait dengan keberhasilan pelaksanaan program desa mandiri pangan. Secara koordinatif tim pangan desa, lembaga keuangan desa dan aparat akan mengawal proses pelaksanaan program dari mulai perencanaan awal, tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di tingkat desa. Agenda pertemuan baik dengan pendamping, kelompok, maupun masyarakat jika dirasa perlu terkait adanya hal-

hal yang mendesak maupun penting utamanya dalam kerangka keberhasilan program desa mandiri pangan. Struktur lembaga pengambil keputusan seperti pada Gambar IV.1

8. Pemberdayaan Kelompok Afinitas

Sasaran program desa mandiri pangan adalah meningkatkan pendapatan, produksi pangan dan ketahanan pangan sekaligus memperbaiki kondisi hidup kelompok sasaran secara berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut maka satu komponen dari empat komponen yang ada dalam program desa mandiri pangan adalah pemberdayaan kelompok afinitas yang merupakan komponen pertama sekaligus komponen utama yang akan menjadi motor penggerak bagi tiga komponen lainnya (komponen pengembangan pertanian dan peternakan, komponen pengembangan infrastruktur pedesaan, dan komponen pengembangan institusi dan manajemen program).

Komponen pemberdayaan kelompok afinitas merupakan kegiatan yang mempersiapkan masyarakat agar sadar dan mampu berdaya dan bermanfaat besar seperti pada gambar IV. 2.

Gambar IV.1

Gambar IV.2

Proses pemberdayaan kelompok afinitas menuju kemandirian masyarakat dalam Program desa mandiri pangan melalui penumbuhan kelompok mandiri baik pada kegiatan pertanian, perikanan, peternakan kerajinan, dan jasa perdagangan. Dengan melalui kelompok afinitas ini diharapkan pada gilirannya kelompok-kelompok tersebut akan mencapai kemandirian kelompok sehingga menjadi berkesinambungan. Untuk mencapai kondisi tersebut perlu adanya pendampingan kelompok yang terprogram dan terencana dalam arti pendampingan dari pihak diluar masyarakat sasaran hanya bersifat

sementara, sehingga diharapkan pendampingan itu akan dilaksanakan oleh motivator yang berasal dari masyarakat.

Dalam program desa mandiri pangan disamping pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping lokal juga ada pendampingan atau bisa disebut pembinaan. Pendampingan kelompok afinitas dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan rutin kelompok dan pelatihan penguatan internal kelembagaan kelompok mandiri oleh fasilitator dan pendamping desa. Jadwal Pertemuan rutin kelompok mandiri untuk masing-masing kelompok di desa dampingan tidaklah sama. Jadwal pertemuan ditentukan oleh kelompok sendiri yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang luang pada masing-masing anggota kelompok.

Dalam pemberdayaan kelompok afinitas menggunakan komponen internal kelompok sebagai indikator pendampingan, dimana komponen internal terdiri: (a) Organisasi; (b) Administrasi; (c) Permodalan; (d) Usaha/Kegiatan *on-farm* atau *of-farm*; (e) Akseptasi/ Kesenambungan. Berikut ini adalah tabel kajian kesesuaian antara program desa mandiri pangan dengan kondisi riil pelaksanaan yang ada.

Berikut ini adalah tabel kajian kesesuaian antara program desa mandiri pangan dengan kondisi riil pelaksanaan yang ada.

Tabel IV.1

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas pada seleksi desa mandiri pangan seleksi dilaksanakan pada tahun berjalan ini berakibat pada kurang akuratnya desa lokasi sasaran yang ditetapkan sebagai lokasi program desa mandiri pangan. Kesan yang ada penetapan desa seolah dipaksakan karena penetapan sebaiknya dilakukan pada tahun sebelumnya atau T-1 sehingga pada tahun berjalan kriteria-kriteria sebagai desa mandiri pangan sudah ada, ketika penetapan desa dilaksanakan pada tahun berjalan tahapan kegiatan seharusnya sudah memasuki kegiatan operasional yang meliputi sosialisasi desa, penyusunan data base desa mandiri pangan dan penyusunan rencana pembangunan desa partisipatif. Dari sini terlihat adanya perbedaan antara pedoman program yang dikehendaki dengan kondisi yang ada pada saat ini. Perbedaan ini sebenarnya dimungkinkan karena merupakan tahapan awal pelaksanaan program namun ketika menyangkut seleksi desa yang selanjutnya berimbas pada pelaksanaan selanjutnya program desa mandiri pangan menjadi tidak tepat.

Pada persyaratan ditetapkannya suatu desa sebagai lokasi desa mandiri pangan diantaranya adalah jumlah KK miskin total adalah 50% dari jumlah penduduk sementara kondisi riil jumlah KK miskin di Desa muntuk yang Cuma 21,10% walaupun dimungkinkan namun lebih memperlihatkan pada pendekatan yang dipakai dalam seleksi dan penetapan desa mandiri pangan bersifat *top-down* daripada mengadopsi kondisi yang nyata di lapangan.

Sebenarnya, tahapan pelaksanaan program desa mandiri pangan telah berlangsung secara logis dan sistematis yang dimulai dari sosialisasi desa mandiri pangan, penyusunan data dasar desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa partisipatif kemudian dilanjutkan dengan pendampingan, pelatihan, pembentukan kelompok fasilitator dan pemberdayaan kelompok afinitas dan tahapan ini dijalankan dengan sebesar mungkin melibatkan masyarakat kedalam proses pelaksanaan. Tetapi, ketika tahapan paling awal tidak terpenuhi yakni penetapan desa dengan kriteria yang ada tidak terpenuhi dikhawatirkan terjadi permasalahan pada pelaksanaannya atau pada partisipasi masyarakat yang tentunya dengan pendekatan yang sama.

Oleh karena itu, program sedikit tersendat untuk dapat segera dilaksanakan. Hambatan pelaksanaan tersebut diakibatkan pada lambatnya tahap penetapan lokasi desa mandiri pangan, yang menjadikan terhambatnya tahap-tahap selanjutnya. Dampak penggunaan pendekatan *top down* pada proses pelaksanaan program juga menyebabkan terlambatnya proses pembentukan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung partisipasi masyarakat.

4.2 Kajian Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan di Desa

Muntuk, Kabupaten Bantul.

Partisipasi masyarakat Desa Muntuk, Kabupaten Bantul pada dasarnya memberikan tanggapan yang positif berkaitan dengan kegiatan program desa mandiri pangan. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan substansi dari program desa mandiri pangan terkait dengan kondisi Desa Muntuk yang merupakan desa rawan pangan dengan jumlah KK miskin yang cukup besar.

Tanggapan dan usulan terhadap program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul yang dapat diidentifikasi berdasarkan informasi dan partisipasi masyarakat serta observasi lapangan antara lain adalah:

1. Seleksi Desa Mandiri Pangan

Seleksi desa mandiri pangan merupakan dasar atau *entry point* masuknya program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Seleksi desa mandiri pangan menetapkan Desa Muntuk Kabupaten Bantul sebagai lokasi program desa mandiri pangan dengan pertimbangan karena masih besarnya jumlah KK miskin, besarnya potensi (SDA maupun SDM) dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan dan besarnya dukungan aparat dalam mensukseskan program ketahanan pangan, seperti dinyatakan oleh Jiman salah satu kepala dusun di Desa Muntuk:

“Seleksi desa memang merupakan hal penting untuk membuka diri kepada pelaksanaan program secara keseluruhann. Setahu saya seleksi dan penetapan desa ini telah ditentukan, memang dengan mempertimbangkan kondisi riil Desa Muntuk yang memang daerah rawan pangan” (Lampiran 1.1. 1).

Selain itu seleksi desa mandiri pangan sangat vital terutama terkait pelaksanaan program desa mandiri pangan secara berkelanjutan. Seleksi desa yang diikuti dengan penetapan desa membawa konsekuensi pada dukungan masyarakat terhadap program, penetapan desa yang salah baik lokasi maupun waktunya akan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program. Lokasi desa yang salah disamping tidak akan mendapat dukungan masyarakat, juga kegiatan yang diimplementasikanya menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lilik, bahwa :

“Memang benar Desa Muntuk merupakan desa miskin dalam arti jumlah KK miskinnya banyak dan penghidupan penduduknyapun masih terbelakang baik dalam penghasilan maupun pendidikan. Bagaimana akan maju jika program-program yang ada atau datang dari pusat kadang tidak mempertimbangkan kondisi penduduk”. (Lampiran 1.15.1)

Seleksi desa dan penetapan desa telah dilakukan, namun waktu penetapannya bersamaan dengan pelaksanaan program desa mandiri pangan pada tahap persiapan atau tahun pertama, sehingga juga langsung diikuti dengan kegiatan lain terutama kegiatan implementasi program, hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat walaupun secara detail masyarakat sudah diberikan sosialisasi program tapi ada sebagian masyarakat yang kurang begitu peduli terhadap tahapan awal yakni tahap persiapan terutama penetapan desa mandiri pangan seperti yang diungkapkan oleh Warsono :

”Perencanaan dan pelaksanaan desa mandiri pangan sudah disampaikan, setahu saya penetapan desa langsung ditentukan dari pusat di Desa Muntuk ini jadi ya kita langsung menjalani sesuai petunjuk-petunjuk baik dari aparat, pendamping maupun bapak-bapak baik dari kabupaten maupun propinsi.” (Lampiran 1.16. 1).

2. Penyusunan Data Dasar Desa

Penyusunan data dasar desa telah dilakukan yakni dengan melakukan pendataan tentang data dasar rumah tangga dan survei rumah tangga sebagai dasar untuk implementasi program desa mandiri pangan. Permasalahannya data dasar desa dimaksud difokuskan pada KK miskin dengan jumlah yang terbatas yaitu sebanyak 40 orang, ini dimungkinkan karena keterbatasan dana yang ada. Walaupun ini telah menjadi kesepakatan tahapan pelaksanaan namun secara tidak langsung harapan untuk mendapatkan manfaat program menjadi tertunda (setelah perguliran) karena baru mendapatkan setelah kelompok pertama penerima manfaat sejumlah 40 orang diatas, itupun dikawatirkan akan sangat berbeda sentuhannya dibandingkan ketika program itu masih dalam kawalan ditahun program. Hal ini diperkuat oleh Dalduri anggota BPD yang menyatakan :

“Untuk identifikasi awal atau pendataan awal desa mandiri pangan memang masih difokuskan pada 40 kelompok usaha dengan anggota masyarakat miskin, mungkin ini yang dikeluhkan walaupun nantinya masyarakat miskin lain akan mendapatkan

perguliran namun sentuhannya akan sangat berbeda dibandingkan dengan penerima manfaat pada tahap awal". (Lampiran 1. 5. 2)

3. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Partisipatif

Keinginan masyarakat terkait dengan program desa mandiri pangan adalah agar setiap usulan/masukan terkait dengan perbaikan kualitas hidupnya dapat diakomodasi. Untuk dapat mengakomodasi usulan masyarakat dalam program diarahkan pada kelompok-kelompok afinitas yang telah terbentuk baik yang sebelumnya sudah ada maupun baru terbentuk. Wadah untuk menampung aspirasi kelompok yakni dalam forum pertemuan penyusunan rencana yang diadakan dengan sebagai arah untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan oleh Suparno, yang juga anggota BPD setempat:

"Sebagai kepala dusun saya selalu memantau pelaksanaan program ditingkat kelompok bersama dengan pendamping yang ada dan hasil ini akan kami sampaikan serta diskusikan di forum pertemuan aparat Tim Pangan Desa di tingkat desa, hasil pertemuan atau informasi apapun terkait dengan program desa mandiri pangan juga akan kami sampaikan kepada kelompok dalam pertemuan rutin yang diadakan di kelompok".(Lampiran 1. 3. 2)

Jiman menambahkan pernyataan bahwa :

"Tahapan penyusunan rencana pembangunan desa saya juga ikut namun tidak bisa 100%. Pada tahapan selanjutnya program tingkat desa tertentu kita kembangkan di dusun pada kelompok-kelompok afinitas dengan kesepakatan kelompok dan disitu saya sebagai pelindung supaya kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan selanjutnya apa yang terjadi nantinya menjadi tanggungjawab kelompok" (Lampiran 1.1.2)

Dari pernyataan diatas kondisi yang ada bahwasannya penyusunan rencana pembangunan desa partisipatif telah ada dan disusun namun sosialisasi hasil perencanaan sebagai arah untuk tindak lanjut kegiatan serta kawalan dari masyarakat masih belum tersosialisasikan secara merata, hanya kepada kelompok-kelompok afinitas yang telah terbentuk dan menerima manfaat awal yang tahu. Sementara masyarakat yang belum menerima manfaat atau akan mendapatkan setelah perguliran belum secara detail mengetahuinya. Ini dikawatirkan akan menjadi permasalahan untuk pelaksanaan di waktu mendatang, karena diperlukan pemahaman dari awal lagi, di samping masyarakat nantinya merasa kurang percaya terhadap pelaksanaan kegiatan ditahun-tahun sebelumnya.

4. Pendampingan

Pendamping desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul adalah penduduk setempat yang selama ini banyak terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di desa sehingga masyarakat sangat paham dengan pendamping dimaksud, dari basis pendidikannyapun mendukung yakni pertanian serta mempunyai kemampuan untuk memotivasi masyarakat dalam program pendampingan dan yang

lebih penting masyarakat percaya tentang tugas dan kemampuan pendamping dimaksud seperti yang dikemukakan oleh Sugiono, Kadus Tangkil:

“Kalau ditanya apakah pendamping yang ada ini telah sesuai saya sampaikan sangat pas, karena mas Joko ini adalah penduduk desa sini tahu tentang kondisi dan masyarakat desa, sekolahnyapun sarjana pertanian yang mendukung dalam hal pendampingannya dan yang penting baik sekarang maupun sebelum jadi pendamping telah aktif dan tanggap dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa”. (Lampiran 1.4. 1)

Sedangkan terkait dengan tugas pendampingan yang selama ini dilaksanakan pendamping mempunyai kemampuan untuk melakukan kawalan program, baik dalam merencanakan kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta mencari solusi atas permasalahan yang timbul serta mengkomunikasikan dengan masyarakat. Pendamping juga menjadi jembatan dalam melakukan komunikasi baik dengan fasilitator maupun pembina baik ditingkat desa, kabupaten maupun provinsi, ini seperti yang disampaikan oleh Emi, anggota afinitas sebagai berikut :

“Peran pendamping sangat penting dan berpengaruh, yang saya alami dan rasakan adalah tempat konsultasi dan berkeluh kesah atas permasalahan yang saya alami. Pernah saya memasukkan benih ikan lele sebanyak 11.000 karena saya tidak tahu apa masalahnya kok mati semua padahal saya habis magang. Oleh pendamping air kolam saya dilabkan ternyata mengandung potasium yang menyebabkan matinya lele dikolam saya, sejak itu saya jadi tahu bahwa sumber air kolam dari sungai tidak baik dan beralih ke sumber mata air. Disamping tanggap dan aktif, pendamping juga sumber informasi tentang jalannya program dari awal sampai dengan berjalan”. (Lampiran 1. 17. 3)

Disamping kawalan program desa mandiri pangan yang dilakukan oleh pendamping lokal, juga ada pembinaan yang dilakukan oleh fasilitator maupun petugas baik ditingkat kabupaten maupun propinsi, pembinaan ini terkait teknis program maupun operasional pelaksanaan program. Instansi pembinapun tidak hanya dari Dinas Pertanian sebagai pelaksana program juga dari instansi lain yang dikoordinasikan oleh fasilitator hal ini seperti yang disampaikan oleh Sugiyono:

”Ada juga pembinaan yang dilakukan oleh bapak-bapak baik dari propinsi maupun kabupaten juga dari dinas-dinas baik pertanian, peeternakan, perikanan, perdagangan, kesehatan. Selama ini juga sangat terbantu juga dengan adanya satu bahasa tentang program dari aparat di desa sampai dengan masyarakat artinya pembinaan selama ini disamping secara umum dilakukan didesa juga terjun langsung dikelompok maupun di masyarakat”. (Lampiran1. 4. 3)

5. Pelatihan

Pelatihan berkenaan dengan program desa mandiri pangan diberikan kepada baik pendamping, fasilitator tingkat desa kelompok afinitas maupun masyarakat dengan materi meliputi kawalan kelompok kepada pendamping dan fasilitator serta pelatihan teknis baik teknis budidaya untuk pertanian, peternakan dan perikanan serta teknis lainnya untuk kerajinan maupun jasa perdagangan. Pelatihan juga menyangkut

manajemen usaha termasuk pemasaran dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan usaha, seperti yang ditambahkan oleh Emi:

“Saya baru saja pulang dari pelatihan terkait budidaya perikanan yang diadakan ditingkat kabupaten, ini juga dikoordinasikan oleh fasilitator desa mandiri pangan disamping itu juga dulu saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen secara umum bagaimana berusaha untuk mandiri dan berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada termasuk upaya mengatasi permasalahan yang muncul”. (Lampiran 1. 17. 5)

Satu hal muatan atau materi pelatihan yang terkait dengan pemberdayaan wanita maupun tata laksana keluarga/ rumah tangga masih dirasa kurang. Ini penting karena materi dimaksud justru merupakan dasar untuk bagaimana mengelola keluarga baik dari sisi peran keluarga khususnya ibu dalam mewarnai kehidupan keluarga baik dari sisi pendidikan, konsumsi yang akan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, seperti yang ditekankan oleh ibu Suparmi, anggota PKK Desa :

”Memang banyak sih pelatihan yang telah dilakukan, namun yang kami rasakan masih kurang terutama pelatihan menyangkut perempuan kaitannya dengan keterampilan keluarga, bagaimana perempuan mencari nafkah tambahan karena kebanyakan perempuan disini pendidikan masih kurang, paling-paling tamat SMA untuk anak sekarang semuran saya maksimal tamat SMP, pelatihan yang sekarang cenderung teknis dan administrasi, sementara masih kita perlukan pelatihan terkait berwirausaha, mendidik anak, kesehatan dan penatalaksanaan keluarga khususnya bagaimana memberdayakan perempuan atau ibu-ibu untuk bisa berusaha membantu ekonomi keluarga, yang saya rasakan mandiri pangan ini harusnya dari keluarga kan tidak terlepas dari peran ibu-ibu”.(Lampiran 1. 14. 1)

6. Pembentukan Kelompok Fasilitator

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, menyebabkan minimnya akses masyarakat terhadap penentu kebijakan. Namun demikian, akses mereka secara politis terwakili dengan adanya BPD (Badan Perwakilan Desa) serta keberadaan Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun (Kadus) sebagai pembantu aparat desa dalam proses pembangunan. Selain itu, di Kawasan Desa Muntuk juga terdapat karang taruna maupun tokoh masyarakat. Dalam Program desa mandiri pangan anggota masyarakat diatas berperan sebagai fasilitator yang duduk dalam pokja pangan desa. Bersama dengan pendamping lokal dan petugas teknis baik dari kabupaten maupun provinsi pokja pangan desa menjembatani pelaksanaan program sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pemecahan masalah yang muncul. Manfaat ini banyak dirasakan oleh masyarakat langsung maupun kelompok afinitas seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono :

”Sebagai kepala dusun saya selalu memantau pelaksanaan program ditingkat kelompok bersama dengan pendamping yang ada dan hasil ini akan kami sampaikan serta diskusikan di forum pertemuan aparat Tim Pangan Desa di tingkat desa, hasil pertemuan atau informasi apapun terkait dengan program desa mandiri pangan juga akan kami sampaikan kepada kelompok dalam pertemuan rutin yang diadakan di kelompok”. (Lampiran 1. 4. 2)

7. Pemberdayaan Kelompok Afinitas

Kelompok afinitas merupakan kelompok yang sudah ada atau baru dibentuk untuk mendapatkan manfaat dari program desa mandiri pangan. Masyarakat yang termasuk dalam KK miskin berhimpun dalam kelompok afinitas yang sudah ada. Untuk selanjutnya kelompok dimaksud mendapatkan bantuan dari mulai pembinaan maupun pelatihan termasuk magang, untuk selanjutnya akan mendapatkan bantuan materi sesuai dengan bidang usaha (pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, pengolahan pangan lokal, maupun jasa perdagangan). Besaran dana sesuai dengan yang diusulkan berdasarkan kesepakatan kelompok. Kelompok juga berkewajiban untuk mengembalikan dana sesuai aturan bersama termasuk berapa lama waktu pengembaliannya.

Munculnya kelompok afinitas merupakan salah satu keberhasilan pemberdayaan dalam rangka penguatan kelembagaan. Kelompok-kelompok yang sudah ada di desa namun kurang maksimal dalam berusaha dicoba untuk sebesar mungkin diberdayakan untuk mendapatkan akses dana pengetahuan tentang teknis berusaha termasuk membangun jejaring pemasaran termasuk akses permodalan yang lebih besar melalui perbankan. Sementara kelompok afinitas baru coba ditumbuhkan dengan mengacu atau belajar dari kelompok yang ada ditambah dengan bekal pembinaan, pendampingan dan kawalan baik dari fasilitator, pendamping maupun aparat. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan kelompok ini akan mandiri untuk bisa menarik kelompok-kelompok lain termasuk kelompok baru, ini tersirat seperti dikemukakan oleh Dalduri :

“Pemberdayaan kelompok usaha seharusnya dapat dilakukan dengan dukungan masyarakat setempat asal pemerintah jelas tujuannya apa. Kami bisa memberitahu kepada masyarakat. Ditempat kami ada kelompok-kelompok usaha yang sudah ada utamanya di kerajinan walaupun juga ada dibidang peternakan maupun perikanan, kebetulan kami salah satu anggota dari kelompok usaha yang sudah ada. Ada juga keinginan dari anggota kelompok mandiri mendirikan kelompok baru maupun usaha baru tentunya berangkat dari dari pengalaman yang telah diperoleh dari kelompok sebelumnya. Dengan program yang ada dari pemerintah yang disampaikan kepada kami maka dukungan atas program akan terus ada. Secara materi atau permodalan kami memang kurang mampu, tapi kami punya tenaga, pengalaman, informasi dan yang penting kami bisa memberikan masukan-masukan berkait dengan pelaksanaan program desa mandiri pangan”. (Lampiran 1. 5. 1)

Sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi lokal pemberdayaan kelompok afinitas ini pada hakekatnya adalah kemitraan antara pemerintah di daerah/lokal dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi ditingkat daerah dan menciptakan lapangan kerja baru, dengan ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah titik beratnya pada kebijakan mendayagunakan potensi sumberdaya manusia, institusional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarah pada fokus dalam proses

pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi daerah peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha koordinator, fasilitator dan stimulator. Selanjutnya Diharapkan dengan keberadaan kelompok afinitas ini dapat memberikan kontribusi terhadap dinamika berusaha di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Usaha yang selama ini sudah ada meliputi budidaya pertanian, peternakan puyuh, ternak lele, kerajinan bambu, pengolahan pangan olahan maupun jasa perdagangan kecil seperti dagang sayuran diharapkan berlanjut dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendapatan masyarakat desa pada umumnya. Hal yang paling penting adalah kemampuan kelompok afinitas dengan dukungan pemerintah dan pendamping sebagai fasilitator untuk menggerakkan masyarakat agar berusaha menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya ikut berperan serta secara aktif dalam program desa mandiri pangan.

8. Usulan Anggaran Pembiayaan

Ada beberapa program pembangunan yang masuk dan ada di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Program dimaksud berasal dari instansi yang ada baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Seperti yang disampaikan Emi ;

“Sumber pendanaan dari APBN dan APBD dan yang saya paling senang dari program desa mandiri pangan ini adalah adanya kawalan dan pembinaan jadi dibandingkan dengan misalnya bank lebih baik karena kalau dari bank tanpa kawalan jika ada masalah atas usaha kita maka kita sendiri yang memecahkan sementara pada program desa mandiri pangan ada solusi dari pendamping ada juga ada pembinaan-pembinaan untuk keberlanjutan usaha kita “. (Lampiran 1. 17.4)

Pembangunan desa disamping menggunakan anggaran rutin yang ada di desa juga memanfaatkan dari sumber-sumber pendanaan yang mungkin untuk dimanfaatkan, juga bersumber dari swadaya masyarakat baik ditingkat dukuh, RW maupun RT. Hal ini disampaikan oleh Jiman :

”Dana program desa mandiri pangan ini sepengetahuan saya ya dari pemerintah, namun yang mendapatkan manfaat dana dari program ini masih sangat kecil namun walaupun kecil untuk motivasi dirasa masih cukup. Besaran dana dalam hal ini setelah distribusi kekelompok tentunya tergantung kelompoknya katakanlah untuk masing-masing kelompok mendapat sekitar Rp. 500.000,- untuk kelompok perajin maupun pedagang keliling hitungannya ya masih kecil namun sebagai stimulan untuk memotivasi dalam berusaha lebih lanjut saya rasa cukup yang penting juga agar kawalan dana dan penerima manfaat lebih lanjut terkait dengan perguliran ke kelompok lainnya” .(Lampiran 1. 1. 3)

Sujilah, warga masyarakat juga menambahkan bahwa sumber pendanaan lain yang digunakan untuk pembangunan di Desa Muntuk berasal dari dana bantuan berupa program yang berasal dari pemerintah. Hal ini terlihat dari pernyataanya:

”Untuk dana yang ada selama ini lumayan bisa untuk peningkatan usaha, namun selanjutnya kedepan kebutuhan dana akan besar karena permintaan barang kerajinan cukup besar selama ini diperkirakan besar karena misalnya untuk

kerajinan adanya sampel-sampel untuk memenuhi konsumen yang semakin berkembang” (Lampiran 1.6. 1)

Selain itu, ada juga sumber pendanaan lain yang tidak menentu, seperti yang dinyatakan oleh Jariyah sebagai berikut ini:

“Modal sangat tertolong dari usaha ternak puyuh maka saya mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- walaupun dalam hal jumlah dana yang diberikan bisa dikatakan kurang atau tanggung artinya sebenarnya dengan dana yang lebih besar saya bisa mngupayakan pengembangan usaha dan Insya Allah akan mampu mengembalikan karena dengan dana yang ada seiring dengan adanya kenaikan BBM akan terjadi kenaikan baik pada pakan maupun angkuan dan ini juga merepotkan saya”.

(Lampiran 1. 12. 1)

Namun demikian, dana yang berasal dari program pembangunan selama ini membingungkan dikarenakan sumber dana yang berasal dari pemerintah baik kabupaten, propinsi, maupun pusat menuntut pengelolaan yang berbeda termasuk tata cara penggunaan maupun operasionalnya. Dalam menterjemahkan kebijakan yang datang dari aparat ditingkat desa termasuk tokoh masyarakat mengalami kebingungan. Pada masyarakat penerima dana program juga kadang rancu karena dalam satu desa muncul banyak aturan-aturan terkait pemanfaatan dana, hal ini seperti yang ditambahkan oleh Jariyah:

“Sumber dana yang ada selama ini membingungkan karena kami mendapatkan modal dengan aturan yang berbeda-beda walaupun untuk satu usaha saya yaitu ternak puyuh, ada keinginan saya ingin dapat dana yang satu pintu daripada dibuat sendiri-sendiri sehingga dari misalnya saya dapat dana Rp. 500.000,- saya harus mengembalikan Rp. 100.000,- sebanyak 5 kali lebih baik mengembalikan Rp. 500.000,- sekaligus selesai selama satu bulan”. (Lampiran 1. 12. 2)

Ditambahkan juga oleh Suparmi :

”Pendanaan desa mandiri pangan dari pusat maupun daerah, namun kami diharapkan dalam pengelolaan tetap satu pintu, karena kalau sendiri-sendiri merepotkan” (Lampiran 1.14.2)

Informasi mengenai permasalahan pengelolaan dana tadi menjadi masukan pada program-program apa saja yang harus dilakukan Desa Muntuk. Memang betul bahwa program-program tersebut memerlukan dukungan dana baik dari pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat termasuk swasta. Namun demikian, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat setempat juga mengalami kendala dalam hal menterjemahkan aturan pelaksanaan terutama dalam hal pendanaan, terutama dari masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penjelasan lebih detail melalui sosialisasi dan yang lebih penting penyatuan aturan untuk mensinergikan setiap program dalam suatu aturan yang disepakati ditingkat desa.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dengan mata pencaharian sebagian masyarakat yang tidak tetap, menyebabkan keinginan yang besar dari sebagian masyarakat untuk dapat memanfaatkan dana dari pemerintah, tanpa pemberitahuan

yang jelas dalam pemanfaatan dana yang ada dikhawatirkan akan adanya penyelewengan pemanfaatan dana dari berbagai macam program pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Suparno:

“Masalah pendanaan jika sama dengan dengan kegiatan-kegiatan program lain yang cenderung tidak ada kawalan dikhawatirkan dana ataupun program yang selama ini di laksanakan tidak memberikan manfaat dan bahkan bisa menyebabkan penyelewengan karena didorong oleh kebutuhan lain yang lebih mendesak khususnya untuk kebutuhan konsumsi maupun sosial tapi mudah-mudahan dalam mandiri pangan ini tidak karena saya melihat ini berbeda”. (Lampiran 1. 3. 1)

Oleh karena itu dalam pembangunan Desa Muntuk, Kabupaten Bantul yang memanfaatkan dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa jika titik berat pembangunan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, maka tahap awal yang perlu diperbaiki atau diatasi adalah upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program terutama tentang tata cara pemanfaatan dana yang bersumber dari berbagai macam program dimaksud, seperti yang disampaikan oleh Dalduri:

“Kita pada prinsipnya cocok dengan program desa mandiri pangan namun memang perlu pengembangan lebih lanjut dengan masukan dan saran dari masyarakat dan kelompok, contoh kecil bahwa Muntuk sebagai desa kerajinan untuk penjualan kerajinan bukan kita secara langsung yang mendapatkan manfaat dari penjualan produk, ini yang akan kita capai dimasa yang akan datang. Sebenarnya dalam jumlah yang terbatas bisa dikembangkan tentunya dengan usulan-usulan tambahan kegiatan dan dana tentunya dengan pengawasan yang lebih perlu ditingkatkan sebagai kontrol jalannya kegiatan”

Hal ini diperjelas oleh pernyataan Jaelani, Pemuka masyarakat yang menyatakan :

“Ada kecenderungan penerima manfaat desa mandiri pangan mengutamakan untuk usaha yang mengutamakan pendapatan, dikhawatirkan justru untuk pemanfaatan potensi keluarga yang memanfaatkan pekarangan guna konsumsi keluarga menjadi berkurang dan tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh kelompok masyarakat, disini perlunya kawalan dan penjelasan yang terus-menerus baik dari pendamping atau pelaksana tugas desa mandiri pangan”. (Lampiran 1. 19.1)

Dari peningkatan pengetahuan masyarakat atas program yang ada dimaksud perlu diikuti dengan adanya suatu kemauan masyarakat tentunya diakomodasi oleh aparat pemerintahan Desa Muntuk untuk berani atau mampu membuat aturan yang jelas dan tidak membingungkan, jika memungkinkan ada upaya untuk bisa menyeragamkan atau menyatukan aturan yang ada menjadi satu aturan yang bisa berlaku umum untuk setiap program yang ada tentunya dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian yang spesifik, hal ini seperti dikemukakan oleh Sukijan, Karang Taruna :

” Menurut saya dalam pengelolaan program maupun anggaran sebaiknya ada pengelolaan yang menyatu, dalam artian sumber bisa berbeda namun pemanfaatannya bisa satu bahasa. Pada kenyataannya dahulu dana-dana yang dilaksanakan bisa hilang karena berjalan sendiri-sendiri. Pada program desa mandiri pangan ini walaupun dari sisi pendanaan kecil namun pengelolaannya sudah pas dan menyatu dengan adanya pengelolaan di Lembaga Keuangan Desa yang bisa menjangkau dan mawadahi sesuai dengan keinginan warga”. (Lampiran 1. 2. 1)

Selain itu aturan pemanfaatan dana yang seragam spesifik desa ini diharapkan juga berlaku dimasa yang akan datang ketika program-program ini sudah tidak ada lagi, sehingga keberlanjutan program terkait dengan pembangunan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul ini dapat berkelanjutan. Hal ini dikemukakan oleh Lilik, Tokoh masyarakat seperti tersebut dibawah ini :

“LKD (Lembaga Keuangan Desa) merupakan lembaga pengelola keuangan di Desa Muntuk merupakan pusat manajemen, pengelolaan dana, target keanggotaan termasuk sumber dana akhirnya merupakan ukuran perkembangan desa mandiri pangan di Desa Muntuk. Sampai saat ini LKD masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari sumber dana yang ada baik APBN maupun APBD karena sampai dengan tahun ketiga ini masih banyak KK miskin yang belum bisa terentaskan. Tapi kami tetap optimis keberhasilan desa mandiri pangan dimasa datang akan terjadi dengan catatan masih ada dukungan dari pendamping, tim pangan desa dan dukungan dari instansi teknis termasuk adanya lembaga perbankan yang bisa mensupport LKD Muntuk. Ini semua untuk keberlanjutan pembangunan di Desa Muntuk”. (Lampiran 1. 15. 2)

Namun demikian, yang perlu untuk diperjelas bahwa pembuatan aturan pemanfaatan dana yang seragam ini kedepan, perlu adanya konsep pengembangan yang jelas dari pemerintah desa khususnya. Jangan sampai justru dengan adanya aturan pemanfaatan dana ini justru akan membuat kegagalan pelaksanaan program dengan meniadakan peran serta masyarakat secara maksimal, sehingga masyarakat justru akan mendapat kesulitan dalam pemanfaatan dana yang ada, sebagaimana dikemukakan oleh Kelik, Lurah Desa Muntuk sebagai berikut:

“Program pembangunan sebaiknya menyatu utamanya dalam pengelolaannya ditingkat desa sehingga ditingkat desa akan memudahkan dan tidak menyulitkan warga dalam aplikasinya. Kita ditingkat desa berupaya untuk menyatukan program yang ada dan turun di desa namun ditingkat diatasnya masih berjalan sendiri-sendiri. Dukungan warga karena adanya jiwa sosial akan memudahkan dalam pengelolaan ditambah dengan tingkat pendidikan yang lumayan dan yang terpenting adalah pertanggungjawabannya yang baik maka akan mendapat dukungan dan ini akan berjalan lama”. (Lampiran 1. 11. 1)

9. Peranan Masyarakat dalam Program Desa Mandiri Pangan.

Pelaksanaan preogram desa mandiri pangan dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dan program yang perlu dilaksanakan untuk dapat memperbaiki kondisi masalaha rawan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam

rangka peningkatan kualitas kehidupannya. Program-program/kegiatan tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak baik dari pemerintah terutama masyarakat setempat. Dukungan dari masyarakat setempat tersebut berupa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan program desa mandiri pangan. Ada banyak tingkatan partisipasi masyarakat seperti yang sudah disebutkan dalam Bab II, berdasarkan observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan dapat dilihat sejauh mana peranan masyarakat dalam program desa mandiri pangan. Terkait dengan peran serta masyarakat dimaksud ada argumen yang disampaikan oleh Suptandar, Masyarakat Desa Muntuk: *Dalam usul-usul pelaksanaan selama ini saya juga usulkan dan banyak juga yang diakomodasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan oleh kelompok lain artinya saya merasa program ini bisa menampung aspirasi masyarakat tidak hanya dari saya walaupun memang ada satu dua masalah yang belum juga dapat dipecahkan*". (Lampiran 1. 7. 1)

Terkait sejauhmana tanggapan masyarakat tentang keberadaan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul ini ada dua sisi yang ingin disampaikan. Yang pertama dari sisi perangkat pemerintahan desa dan sisi yang lain dari pelaku pelaksanaan program dalam hal ini masyarakat atau kelompok masyarakat yang ikut berperan langsung dalam pelaksanaan keseharian program. Dari sisi pemerintah seperti yang disampaikan oleh M Suwardi, Kadus Muntuk menyatakan:

"Masyarakat disini sangat diuntungkan dengan program desa mandiri pangan karena program desa mandiri pangan ini dirasa sangat jelas baik dari tahapan awal sosialisasi sampai dengan pelaksanaan dan masyarakat ikut dilibatkan langsung dalam berbagai kegiatan termasuk juga ada kontrol. Penjelasan memang sangat perlu pada saat akan diadakan kegiatan, dan akan sangat efektif lagi penjelasan apabila penjelasan di tiap dusun dengan model perwakilan yang akan menyampaikan langsung dan tanggungjawab moral yang mewakili akan menginformasikan lebih lanjut ke masyarakat". (Lampiran 1.13. 1)

Sementara dari sisi pelaksana langsung kegiatan dalam hal ini masyarakat menyampaikan seperti yang diungkapkan oleh Anton Purwanto, Karang taruna desa: *"Tidak harus ada keikutsertaan langsung masyarakat semua, cukup beberapa orang dan dengan pengertian yang diinformasikan masyarakat sudah merasa terlibat dan ikut mendukung pelaksanaan program. Wajar jika ada satu dua yang mungkin tidak terima namun prosentasenya rendah tapi bisa memahami secara umum"*. (Lampiran 1. 9. 1)

Ada argumen lain yang dikemukakan oleh Suparmi:

"Kami dari PKK dalam penyusunan awal pelaksanaan maupun evaluasi dilibatkan secara aktif, banyak usulan-usulan kami yang diterapkan menjadi kegiatan di desa mandiri pangan yang paling menonjol adalah program makanan tambahan untuk ibu

hamil dan menyusui yang menjadi salah satu kegiatan yang cukup berhasil dan telah dilaksanakan di Desa Muntuk”. (Lampiran 1. 14. 3)

Dari argumen diatas dapat disampaikan bahwa secara umum peranan masyarakat dalam program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul ini cukup positif, artinya dukungan terhadap program nyata ada dalam setiap kegiatan yang diprogramkan, masyarakat ikut dilibatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap program. Sejauh ini masyarakat terlibat di banyak kegiatan dari yang paling kecil ikut serta dalam setiap kegiatan, memberikan masukan atau usulan dalam setiap forum pertemuan, serta berperan sebagai anggota kelompok afinitas dalam pengelolaan anggaran ataupun menjalankan usaha sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama

Dari pernyataan diatas peranan/partisipasi masyarakat aktif dalam program desa mandiri pangan, bahwa ada keterlibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam kelompok afinitas sebagai kelompok yang berperan dalam menggerakkan roda usaha dan ekonomi de desa dapat terlihat seperti yang disampaikan oleh Ratno:

“Keterlibatan masyarakat termasuk anggota kelompok, dilandasi kejujuran masyarakat maka usulan-usulan yang sifatnya vokal mungkin tidak sampai namun masyarakat sangat merasakan adanya perbedaan manfaat desa mandiri pangan khususnya masalah pemasaran yang langsung dikelola oleh mandiri pangan. Perhitungannya selama ini kalau menjual sendiri kepasar ongkos transportnya mahal kepasar misal untung Rp. 250 kali sekian tidak seberapa namun taransportnya bisa Rp. 10.000,- maka tidak efisien dan waktunya juga hilang bisa setengah hari”.

(Lampiran 1. 8. 1)

Dari awal masyarakat miskin didata untuk selanjutnya disurvei, dan dilibatkan dalam program. Bagi masyarakat miskin yang selama ini tidak pernah berusaha diikutkan dalam kelompok-kelompok yang sudah ada, peranan dimaksud dari sejak usulan rencana kegiatan kelompok, bagaimana mengelola keuangan, mengelola usaha, sampai dengan upaya untuk mencari pasar atas produk yang dihasilkan termasuk pemecahan atas permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kegiatan. Menarik seperti yang disampaikan oleh Emi, anggota masyarakat yang menjadi anggota kelompok afinitas perikanan lele, dia mengatakan:

“Saya kelompok afinitas yang benar-benar tumbuh dan diawali dari adanya program desa mandiri pangan, usaha kami adalah perikanan lele. Diawali dengan gempa bumi besar di DIY mental kami sempat turun atau perekonomian kami memburuk, dengan adanya mandiri pangan memacu semangat kami menjadi naik bagaimana mencari usaha yang menguntungkan. Kami punya ide bagaimana lahan kita kita jadikan kolam yang sebelumnya lahan sawah namun kurang menguntungkan dari segi pendapatannya. Pertama kali kita buat kolam pada tahap persiapan satu kolam kemudian setahun saya mendapat dana 3 juta kami kembangkan usaha walaupun kami tidak tahu secara menyeluruh budidaya perikanan/lele bahkan kami gagal sebanyak 5 kali nah kami mohon pada pendamping bagaimana mengatasinya dan akhirnya saya dimagangkan ke Kabupaten Kulon Progo oleh mandiri pangan setelah itu tahap demi tahap kami sampai tahun ke 3 saya sudah punya 11 kolam karena belajar dari pengalaman dan ada kelompok yang bisa kita ajak kembangkan

menjadi kelompok Mergo Lele dengan anggota 22 orang dan alhamdulillah kemarin ikut lomba tingkat propinsi menjadi juara harapan II. Sampai saat ini saya malah menjadi pengumpul dengan bantuan pemuda desa maka bisa berhasil". (Lampiran 1. 17. 1)

Pada pelaksanaannya ketika terjadi kasus kematian lele ini masyarakat berperan aktif memecahkan masalah yang muncul, ketika solusi belum didapatkan maka peranan fasilitator termasuk dalam hal ini pendamping untuk mencari tahu akar permasalahan kepada pemerintah baru solusi yang terbaik atas permasalahannya yang timbul didapatkan, ini dikuatkan oleh Dalduri yang menyampaikan:

"Kita pada prinsipnya cocok dengan program desa mandiri pangan namun memang perlu pengembangan lebih lanjut dengan masukan dan saran dari masyarakat dan kelompok, contoh kecil bahwa Muntuk sebagai desa kerajinan untuk penjualan kerajinan bukan kita secara langsung yang mendapatkan manfaat dari penjualan produk, ini yang akan kita capai dimasa yang akan datang. Sebenarnya dalam jumlah yang terbatas bisa dikembangkan tentunya dengan usulan-usulan tambahan kegiatan dan dana tentunya dengan pengawasan yang lebih perlu ditingkatkan sebagai kontrol jalannya kegiatan". (Lampiran 1. 5. 3)

Terkait peranan masyarakat inipun ketika pengelolaan program sudah ditangan masyarakat bukan berarti pemerintah lepas tangan, masih ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk kawalan baik langsung maupun tidak langsung dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi namun pemerintah tidak melakukan intervensi lebih jauh atau mengarahkan jalannya program ketika rencana kegiatan dimaksud sudah menjadi kesepakatan bersama, ini seperti yang dikemukakan oleh Subandono, Pemuda karang taruna:

"Untuk pelaksanaan kegiatan kita melaksanakan sesuai aturan dengan kesepakatan kelompok dan masyarakat tanpa intervensi pemerintah secara jauh, walaupun dalam pembinaan lebih lanjut peran pemerintah selalu ada, baik langsung maupun tidak langsung lewat pendamping" (Lampiran 1. 10. 1)

pendapat ini dikuatkan oleh Suyadi yang menyatakan:

" Yang saya pahami terkait dengan desa mandiri pangan ini aturannya sudah ada dan pelaksanaannya ditingkat masyarakat berjalan dengan mekanisme yang ditentukan oleh masyarakat dan selama ini berjalan. Peranan pemerintah jelas ada tapi saya melihatnya peranan itu tidak begitu banyak". (Lampiran 1. 18. 1)

Dari peranan masyarakat terhadap program tersebut terlihat masyarakat berpartisipasi pada program desa mandiri pangan pada berbagai kegiatan, yang mengarah pada bentuk keterlibatan aktif seperti yang dikatakan Suratman:

"Pelaksanaan program desa mandiri pangan dilaksanakan secara partisipatif dengan mempertimbangkan potensi masyarakat termasuk usulan-usulan dan permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga semua yang direncanakan dapat diaplikasikan walaupun disana-sini ada permasalahan namun karena merupakan

kesepakatan bersama sehingga pemecahan masalah menjadi mudah dan tidak terkendala. Ditambah dengan peran fasilitator dalam hal ini pemerintah yang berperan dalam setiap langkah kegiatan untuk mendorong dan memacu jalannya kegiatan”. (Lampiran 1. 20. 1)

Pernyataannya ditambahkan oleh Suyadi:

”Bahwa dalam hal pelaksanaan program desa mandiri pangan apa yang saya rasakan prakteknya lebih berkembang dibandingkan dengan ketika disosialisasikan awal, banyak kegiatan yang dipacu oleh karena masukan masyarakat, partisipasi aktif masyarakat, bimbingan dan pembinaan petugas dan aparat sehingga penerimaan masyarakat atas program sangat baik. Musyawarah sebagai forum pertemuan masyarakat dilakukan secara rutin atau pada setiap awal kegiatan hasilnya pun dikomunikasikan kembali. Ketika melangkah baik oleh aparat maupun oleh kelompok pelaksana hasilnya juga kita laporkan dan dievaluasi secara bersama pemantauan juga dilaksanakan oleh kita termasuk dari petugas mulai yang paling rendah di desa kemudian kabupaten dan propinsi dan bahkan pusat.”. (Lampiran 1. 18. 2)

Sesuai dengan uraian diatas bahwasanya peranan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat menempatkan partisipasi masyarakat Desa Muntuk Kabupaten Bantul terhadap program desa mandiri pangan berada pada tingkatan *partnership* dimana partisipasi mendapat tempat dan apresiasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan masyarakat merasa bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pelibatan masyarakat sangat besar serta ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas di dalamnya antara masyarakat dan pemerintah serta tidak ada intervensi terlalu jauh dari pemerintah dan tidak ada keputusan sepihak dengan kata lain masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek program juga sebagai subjek yang turut serta dalam pelaksanaan dan mengontrol jalannya program, ini sesuai yang disampaikan oleh Dalduri dalam uraian sebelumnya, dapat disimpulkan tanggapan masyarakat atas program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul dan usulan program dari masyarakat setempat dapat dilihat dalam tabel IV.2.

4.3 Evaluasi Tujuan dan Pencapaian Program Desa Mandiri Pangan di Desa

Muntuk, Kabupaten Bantul

Program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat miskin di daerah rawan pangan yang difokuskan untuk memerangi kemiskinan dengan mewujudkan kondisi yang kondusif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yang termarginalkan di wilayah tersebut serta meningkatkan kemampuan mereka untuk merealisasikannya sehingga pendapatan dan kualitas kehidupannya meningkat secara berkesinambungan.

TABEL IV.2
TANGGAPAN DAN USULAN PROGRAM PADA PROGRAM DESA MANDIRI
PANGAN DI DESA MUNTUK, KABUPATEN BANTUL

Permasalahan Mendasar dan Usulan Program	
Tanggapan	Usulan
<p>Secara umum pelaksanaan program desa mandiri pangan berjalan dengan baik dalam artian tahapan pelaksanaan dari mulai penetapan desa, sosialisasi, penyusunan data dasar desa dan penyusunan rencana pembangunan desa partisipatif telah dijalani. Permasalahan yang ada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan program yang hanya berlangsung empat tahun. 2. Pada penerima manfaat awal yang hanya 40 KK miskin dirasa kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesepakatan pengelolaan agar program berlanjut dengan mengupayakan kegiatan peningkatan kualitas SDM yang ada di desa. 2. Solusi dengan penerapan pola perguliran untuk penerima manfaat bagi KK miskin selanjutnya dengan disertai penjelasan dan kawalan yang diharapkan sama dengan penerima manfaat awal walaupun pelaksanaan program telah selesai
<p>Pengelolaan program khususnya pemanfaatan dana dikawatirkan sama dengan program sebelumnya yang tidak berbekas atau tidak ada tindak lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana untuk pembangunan desa bisa dari berbagai sumber 2. Pengelolaan dana disatukan pada satu lembaga tingkat desa. 3. Ada aturan yang jelas dan transparan tentang pemanfaatan dana termasuk kejelasan status penerima manfaat.
<p>Partisipasi masyarakat terhadap program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul dapat dirumuskan berada pada tingkatan partnership sesuai dengan tangga tingkatan partisipasi Arstein dengan ciri-ciri partisipasi masyarakat pada setiap tahapan dari mulai dengan ide awal pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi. Peran pemerintah ada dan tidak terlalu mencampuri. Ada pembagian tugas dan kewenangan yang disepakati bersama dalam setiap operasional kegiatan dan tidak dimungkinkan adanya perubahan sepihak atas keputusan yang telah menjadi kesepakatan</p>	<p>Partisipasi masyarakat yang sudah ada diharapkan sebagai modal atau investasi dalam rangka keberlanjutan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk ketika secara keprograman telah selesai.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Desa Muntuk berada di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dari sisi sosial ekonomi masyarakat memang tidak terlalu baik, hal ini terlihat pada Sumber Daya Manusia yang ada di desa tersebut yang masih adanya KK miskin dalam jumlah yang cukup besar. Sumber Daya Manusia yang ditemui masih memprihatinkan baik dari segi

pendidikan, umumnya masih didominasi lulusan SD sebesar 24,49% penduduk atau sebanyak 120 jiwa dan penduduk yang hanya tamat SD sebesar 18,36%. Sedangkan penduduk yang tamat pendidikan formal yang lebih tinggi yaitu SMA sebesar 6,12% dan lulusan Akademi/Perguruan Tinggi hanya 1 orang saja. Dari sisi usia, dominasi pada usia produktif tanpa penyaluran kegiatan dikawatirkan akan menimbulkan problem sosial disamping besaran rata-rata pendapatan yang rendah di Desa Muntuk menyebabkan rendahnya kualitas taraf kehidupan masyarakat sehari-hari. Topografi desa berupa perbukitan juga berpengaruh utamanya terkait dengan aksesibilitas dari dan menuju ke Desa Muntuk ditambah jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan mengakibatkan tingginya biaya distribusi.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat miskin utamanya yang kurang memiliki akses pada sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kehidupan mereka, program desa mandiri pangan telah berusaha membantu masyarakat binaan program untuk dapat mengenali dan mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan. Berdasarkan kerangka program desa mandiri pangan, keluarga miskin yang terdapat pada masyarakat Desa Muntuk memerlukan tiga hal untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu: (1) Pengembangan kelembagaan masyarakat berdasarkan afinitas yang merupakan wadah untuk pengembangan modal baik sosial maupun keuangannya. (2) Kesempatan untuk meningkatkan pendapatan bagi keluarga/kelompok secara berkesinambungan (3) Kemampuan untuk menggunakan kesempatan-kesempatan tersebut yang mendukung masyarakat dalam mewujudkan dua hal pertama yang disebutkan di atas pada setiap tahap kegiatan program desa mandiri pangan.

Kelompok afinitas merupakan kelompok masyarakat miskin yang dibentuk dan diintegrasikan dalam sistem organisasi desa oleh program desa mandiri pangan, adalah perwakilan dari kelompok sasaran yang telah ditentukan. Harapan program adalah agar kelompok mampu memfasilitasi anggotanya untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pada dasarnya masyarakat di Desa Muntuk memiliki budaya gotong royong aktif berpartisipasi telah terbiasa untuk berpartisipasi bahkan menyumbangkan sumberdaya yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan komunitasnya. Seperti layaknya organisasi, kelompok afinitas adalah kelompok yang ditumbuhkan, berkembang dan disapih. Kelompok ini akan ditumbuhkan dan dapat membentuk kelompok afinitas lainnya, jika mereka merasa bahwa kelompok mereka sudah besar dan telah dapat melaksanakan fungsinya dan ada upaya untuk memisah berusaha dan berkembang lebih lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kelompok yang akan mampu berkinerja lebih baik untuk pengembangan usaha yang lebih besar ditingkat desa atau antar desa.

Dalam suatu kelompok atau organisasi, unsur sumber daya manusia merupakan titik sentral keberhasilan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Artinya sumber daya manusia merupakan penentu jalan tidaknya atau maju mundurnya suatu organisasi. Sebaik apapun sistem yang telah disusun atau selengkap apapun sarana dan prasarana kerja yang tersedia, tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak akan berarti banyak bagi keberadaan kelompok atau organisasi. Dengan Sumber daya manusia pula, sistem, sarana dan prasarana yang ada dapat terus disempurnakan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok atau organisasi.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia para pelaksana program desa mandiri pangan di Desa Muntuk baik petugas, pendamping maupun masyarakat telah melaksanakan pelatihan, magang, maupun koordinasi-koordinasi terutama bagi pelaksana langsung program desa mandiri pangan. Sementara kegiatan pelatihan teknis telah dilaksanakan oleh pembina maupun aparat secara berjenjang dan berlanjut dengan mengakomodasi materi sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di tingkat desa. Pengalaman menunjukkan bahwa agar peningkatan kemampuan sosial dan masyarakat itu dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dibutuhkan peningkatan pendapatan dan kesempatan peningkatan ekonomi secara paralel. Dalam hal ini menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat di Desa Muntuk, khususnya masyarakat miskin dalam program desa mandiri pangan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan atas tahapan kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam menetapkan prioritas kegiatan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan berupa potensi yang ada di desa baik dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll yang terbatas dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya kebutuhan untuk melanjutkan partisipasi masyarakat setelah program desa mandiri pangan akan berakhir (2009) agar apa yang telah dilaksanakan sebagai investasi dan keuntungan usaha dapat berlanjut.

Sistem Monitoring dan evaluasi diharapkan dapat berperan dalam pelaksanaan strategi program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul dan dalam memonitoring proses penilaian tahapan kegiatan masyarakat terkait mengenai prioritas dan kekuatan masyarakat desa dalam rangka pembinaan kelompok afinitas. Hal lain yang perlu diperhatikan dan terus dijaga pada program desa mandiri pangan di Desa Muntuk adalah jangan sampai terjadi partisipasi yang keliru adalah partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam program hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan, memang pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu kompromi atas konflik kepentingan yang terjadi harus terus disosialisasikan sebagai bagian dalam pemecahan permasalahan yang muncul pada program desa mandiri pangan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Desa Muntuk merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bantul, merupakan desa rawan pangan dengan jumlah KK miskin yang cukup besar. Seperti halnya desa-desa yang mengalami permasalahan pangan atau desa rawan pangan permasalahan utama yang mendasar adalah sumber daya manusia dengan taraf kehidupan masyarakatnya yang rendah dan fasilitas dasar juga belum sepenuhnya terpenuhi. Disamping itu daerah rawan pangan menyangkut ketersediaan pangan yang kurang ditingkat rumah tangga, yang ini jika tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan timbulnya kerawanan pangan yang kronis yang berakibat pada turunnya kualitas kehidupan masyarakat.

Adanya program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul sebagai suatu upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat terkesan kecil, baik dari sisi cakupan kegiatan maupun besaran dana yang diimplementasikan, namun program desa mandiri pangan ini sangat strategis karena merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di lokasi desa yang mengalami masalah rawan pangan untuk dapat memotivasi dalam berusaha menciptakan pendapatan bagi keluarga.

Berdasarkan observasi lapangan memang Desa Muntuk ini dilihat secara keseluruhan Kabupaten Bantul lokasinya kurang menguntungkan karena geografisnya adalah perbukitan terjal dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat pemerintahan yang berakibat pada masih besarnya jumlah KK miskin. Selama ini program-program

pembangunan memang telah ada namun sangat sedikit yang menyentuh langsung dan bersentuhan dengan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Sebenarnya lokasi sasaran desa mandiri pangan di Desa Muntuk ini adalah karena potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Muntuk diantaranya dukungan yang sangat besar terhadap program pembangunan ketahanan pangan disamping potensi yang cukup besar diantaranya banyaknya jenis usaha yang bisa dikembangkan di Desa Muntuk diantaranya pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kerajinan dan jasa perdagangan.

Program pemberdayaan masyarakat seperti yang ada di program desa mandiri pangan ini merupakan salah satu program pemberdayaan yang masih jarang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari sistem dan pengelolaan kelompok dampingan. Desa mandiri pangan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat telah berhasil mendudukan pemberdayaan sesuai dengan tempatnya dan porsinya. Tepat dimaksudkan adalah program bekerja sesuai porsinya sebagai pemberdaya (bukan memberdayai). Program desa mandiri pangan adalah program yang terkonsentrasi ke dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan aspek pendapatan/ekonomi dan sosial yang mana dari aspek-aspek dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena saling dukung dan berhubungan.

Program pada tahun pertama dan kedua telah memberikan pembekalan kepada anggotanya untuk mandiri. Pembekalan tersebut berupa pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas dan motivasi serta pendampingan secara intensif kepada para anggota. Dengan adanya pendampingan yang intensif dan pelatihan-pelatihan diharapkan akan ada pembangunan kapasitas dan kemampuan (SDM) dari anggota kelompok yang rata-rata

adalah miskin yang pada umumnya yang dekat dengan kebodohan dan kemiskinan.

Setelah sekian lama didampingi dan dibina dalam program desa mandiri pangan tidak dapat diragukan lagi keberadaannya. Hal ini terlihat dari peran serta para anggota kelompok baik kelompok perempuan maupun laki-laki di lingkungan maupun didalam sekup desa. Para anggota kelompok sudah dapat mewarnai dan dipercaya untuk menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan maupun kedudukanya di desa. Hal ini terlihat dari peran anggota kelompok afinitas di desa dampingan. Ambillah contoh seperti kelompok budidaya perikanan lele, para anggota kelompok sudah mampu memerankan diri dalam upaya meningkatkan pendapatan baik untuk pribadi anggota maupun kelompoknya maupun dalam kelembagaan di desa sehingga mereka tidak lagi termarginalkan seperti sebelum adanya program desa mandiri pangan masuk di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul.

Kelompok-kelompok lain juga sudah menunjukkan kemajuan yang cukup membanggakan. Hal ini terlihat dari kegiatan dan usaha yang mereka jalani sekarang dengan didukung sumberdaya yang ada disekitarnya kelompok. Sebuah kolaborasi yang sangat baik tentunya ketika hubungan sosial menjadi lebih erat dengan adanya afinitas, lingkungan terjaga karena adanya pembangunan sumberdaya alam (SDA), sumberdaya manusia (SDM) dan ekonomi meningkat karena adanya usaha bersama diantaranya.

Peran pendamping juga sangat bermanfaat dalam program desa mandiri pangan ini, Dalam prakteknya peran pendampingan melebihi ketugasan yang diberikan kepada pendamping, terkait dengan perjuangan dalam mengembangkan masyarakat disekitarnya utamanya dalam peningkatkan harkat dan martabat para anggota masyarakat peserta

program desa mandiri pangan. Kehadiran pendamping pada pertemuan-pertemuan kelompok untuk memberikan motivasi dan arahan berkaitan dengan program desa mandiri pangan, juga berperan dalam mengakomodir pelatihan maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan koordinasi secara terus menerus dengan aparat desa maupun pembina-pembina dan pemangku kepentingan baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

Implementasi kegiatan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul telah berjalan sampai tahun ketiga atau tahapan pengembangan, serta banyak kegiatan yang terdapat dalam setiap tahapan kegiatan dari mulai persiapan, penumbuhan sampai akhirnya pengembangan yang menunjukkan keberhasilan, memang berdasarkan identifikasi program, masih ada beberapa hal yang kurang sesuai dari kegiatan yang telah diimplementasikan tersebut . Salah satunya adalah penetapan desa yang terkeasan masih sepihak ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat tahu bahwa desanya lokasi desa mandiri pangan setelah program masuk dan dilakukan sosialisasi, sehingga masih ada kesan bahwa program desa mandiri pangan merupakan program yang bersifat *topdown*, walaupun pada banyak kegiatan lainnya telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh program.

Di sisi Lain berdasarkan kajian yang dilakukan, partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul berada pada tingkatan *partnership* sesuai dengan tingkatan partisipasi Arstein yang dicirikan dengan adanya partisipasi secara aktif dari masyarakat pada program baik pada tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi termasuk dalam pemecahan permasalahan yang timbul. Masyarakat juga merasa mendapatkan manfaat yang nyata atas pelaksanaan

program diantaranya terpenuhinya kebutuhan akan kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program inipun dirasa sangat besar, sudah ada pembagian kewenangan yang jelas antara peran pemerintah dan masyarakat serta mereka tidak merasa adanya intervensi yang terlalu jauh dari pemerintah atas kegiatan program yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat di desa tersebut.

Adanya program desa mandiri pangan menjadikan masyarakat desa mampu untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan baik di dalam program desa mandiri pangan sendiri maupun pada program pembangunan lain yang sudah ada di masyarakat. Dengan daya kritis dari masyarakat diharapkan langkah yang akan diambil benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga seiring dengan pelaksanaan program desa mandiri pangan, agenda pembangunan lain yang direncanakan di Desa Muntuk di masa mendatang akan berjalan sukses dan lancar sehingga ada kemanfaatan yang besar yang dapat diperoleh.

Program desa mandiri pangan merupakan program pembangunan partisipatif yang sesuai dilaksanakan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Pada sekian tahun program desa mandiri pangan yang telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya dengan terus didampingi dan dibina maka kemandirian optimis akan dapat dicapai di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Kemandirian menjadi mutlak ketika mereka sudah berdaya dan mampu mewujudkan cita-citanya secara mandiri dalam artian tanpa adanya pendampingan program lagi dari pemerintah dan ini bisa menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Abe. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo. Pondok Edukasi.
- Anonim, 2006. *Pedoman Umum Program Desa mandiri Pangan*, Jakarta, Badan ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- , 2006. *Pedoman Operasional Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahap Persiapan*, Jakarta, Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- , 2006. *Pedoman Operasional Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahap Penumbuhan*, Jakarta, Badan ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- Burke, Edmund M. 2004. *Sebuah Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota (Terjemahan A Participatory Approach to Urban Planning.)*. Bandung: Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Blakely, Edward J., 1989. *Planning Lokal Economic Development: Theory and Practice*, 1st edition, Sage Publications Inc., California.
- Dahl. 1963. *Democracy and Its Critics*.
- Friedman, John, 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Massachusetts, MIT Press.
- Hall, Anthony, Midgley James, Hardiman, Margareth, Narine, dhanpaul, 1986: *Community Participation, Social Development and State*, London, Methven & Co.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Korten, David C dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta, Yayasan Obor.
- Komarudin, Drs, MA, 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*, Jakarta, Yayasan Realestat Indonesia- PT. Rakasindo.
- Munir R, Fitanto B. 2005. *Pengembangan Ekonomi Lokal partisipatif: Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. Jakarta: Local Governance Support Program (LGSP) USAID.

- Miles, Matthew B. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Parwoto, MDS, 1997. Pembangunan Partisipatif . Makalah pada Loka karya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Pemukiman, 15-16 juli 1997 BKSJN. Jakarta.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Panudju, Bambang, 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta masyarakat Berpenghasilan rendah, Bandung, Penerbit Alumni.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan..
- Soetrisno, Loekman, 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Soetomo, 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soetomo, 1995 . Masalah Sosial dan Pembangunan, Yogyakarta. Pustaka Jaya
- Sugiyono. 2002. Statistik untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.
- Slamet Y, 1992. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Tambunan, Tulus T.H., 2001. Perekonomian Indonesia:Teori dan Temuan Empiris, Cetakan Kedua, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Tentang Pangan.
- Wibisana, Gunawan, 1989. Partisipasi Masyarakat dalam Proses peremajaan Pasar, Thesis, Program Pembangunan Wilayah dan Kota, ITB Bandung.

LAMPIRAN 1 : INTISARI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

1.1

Nama Responden : Jiman
Kedudukan dalam Masyarakat : Kadus Sanggrahan II
Waktu Wawancara : Rabu, 20 Agustus 2008 jam 10.00 s/d 10.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Kadus Sanggrahan II
Intisari Hasil Wawancara :

1. *“Seleksi desa memang merupakan hal yang penting untuk jalan pembuka pada jalannya program secara keseluruhan. Setahu saya seleksi dan penetapan desa ini telah ditentukan, memang dengan mempertimbangkan kondisi riil Desa Muntuk yang memang daerah rawan pangan”.*
2. *”Tahapan penyusunan rencana pembangunan desa saya juga ikut namun tidak bisa 100%. Pada tahapan selanjutnya program tingkat desa tertentu kita kembangkan di dusun pada kelompok-kelompok afinitas dengan kesepakatan kelompok dan disitu saya sebagai pelindung supaya kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan selanjutnya apa yang terjadi nantinya menjadi tanggungjawab kelompok”*
3. *Dana program desa mandiri pangan ini sepengetahuan saya ya dari pemerintah, namun yang mendapatkan manfaat dana dari program ini masih sangat kecil namun walaupun kecil untuk motivasi dirasa masih cukup. Besaran dana dalam hal ini setelah distribusi kekelompok tentunya tergantung kelompoknya katakanlah untuk masing-masing kelompok mendapat sekitar Rp. 500.000,- untuk kelompok perajinin maupun pedagang keliling hitungannya ya masih kecil namun sebagai stimulan untuk memotivasi dalam berusaha lebih lanju saya rasa cukup yang penting juga agar kawalan dana dan penerima manfaat lebih lanjut terkait dengan perguliran ke kelompok lainnya”.*

1.2

Nama Responden : Sukijan Kiki Saputro (Banjarejo I)
Kedudukan dalam Masyarakat : Karang taruna
Waktu Wawancara : Rabu, 20 Agustus 2008 jam 11.00 s/d 11.30 WIB
Tempat Wawancara : Lokasi pengembangan usaha kerajinan.
Intisari Hasil Wawancara :

1. *” Menurut saya dalam pengelolaan program maupun anggaran sebaiknya ada pengelolaan yang menyatu, dalam artian sumber bisa berbeda namun pemanfaatannya bisa satu bahasa. Pada kenyataannya dahulu dana-dana yang dilaksanakan bisa hilang karena berjalan sendiri-sendiri. Pada program desa mandiri pangan ini walaupun dari sisi pendanaan kecil namun pengelolaannya sudah pas dan menyatu dengan adanya pengelolaan di Lembaga Keuangan Desa yang bisa menjangkau dan mewadahi sesuai dengan keinginan warga”*

1.3

Nama Responden : Suparno
Kedudukan dalam Masyarakat : BPD
Waktu Wawancara : Rabu, 20 Agustus 2008 jam 10.00 s/d 10.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah BPD
Intisari Hasil Wawancara :

1. *“Masalah pendanaan jika sama dengan dengan kegiatan-kegiatan program lain yang cenderung tidak ada kawalan dikawatirkan dana ataupun program yang selama ini di laksanakan tidak memberikan manfaat dan bahkan bisa menyebabkan penyelewengan karena didorong oleh kebutuhan lain yang lebih mendesak khususnya untuk kebutuhan konsumsi maupun sosial tapi mudah-mudahan dalam mandiri pangan ini tidak karena saya melihat ini berbeda”.*
2. *” Perencanaan Desa Partisipatif (RPJPD) dibuat dan mencantumkan kegiatan-kegiatan pelaksanaan desa mandiri pangan termasuk kegiatan yang ada ditingkat kelompok usaha maupun afinitas termasuk kegiatan evaluasi oleh anggota*

masyarakat yang diikuti oleh aparat ditingkat dusun maupun desa dalam kegiatan pertemuan baik rutin maupun yang diadakan khusus”.

1.4

Nama Responden : Sugiyono
Kedudukan dalam Masyarakat : Kadus Tangkil
Waktu Wawancara : Rabu, 20 Agustus 2008 jam 13.00 s/d 13.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Kadus
Intisari Hasil Wawancara :

1. “kalau ditanya apakah pendamping yang ada ini telah sesuai saya sampaikan sangat pas, karena pendamping ini adalah penduduk desa sini, tahu tentang kondisi masyarakat desa, sekolahnyapun sarjana pertanian yang mendukung dalam hal pendampingannya dan yang penying baik sekarang maupun sebelum jadi pendamping telah aktif dan tanggap dalam kegiatan-kegiatan yang ada”
2. ”Sebagai kepala dusun saya selalu memantau pelaksanaan program ditingkat kelompok bersama dengan pendamping yang ada dan hasil ini akan kami sampaikan serta diskusikan di forum pertemuan aparat Tim Pangan Desa di tingkat desa, hasil pertemuan atau informasi apapun terkait dengan program desa mandiri pangan juga akan kami sampaikan kepada kelompok dalam pertemuan rutin yang diadakan di kelompok”.
3. ”Ada juga pembinaan yang dilakukan oleh bapak-bapak baik dari propinsi maupun kabupaten juga dari dinas-dinas baik pertanian, peeternakan, perikanan, perdagangan, kesehatan. Selama ini juga sangat terbantu juga dengan adanya satu bahasa tentang program dari aparat di desa sampai dengan masyarakat artinya pembinaan selama ini disamping secara umum dilakukan didesa juga terjun langsung dikelompok maupun di masyarakat”.

1.5

Nama Responden : Dalduri
Kedudukan dalam Masyarakat : BPD
Waktu Wawancara : Rabu, 20 Agustus 2008 jam 14.00 s/d 15.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Bpk Dalduri

Intisari Hasil Wawancara :

1. “Pemberdayaan kelompok usaha seharusnya dapat dilakukan dengan dukungan masyarakat setempat asal pemerintah jelas tujuannya apa. Kami bisa memberitahu kepada masyarakat. Di tempat kami ada kelompok-kelompok usaha yang sudah ada utamanya di kerajinan walaupun juga ada dibidang peternakan maupun perikanan, kebetulan kami salah satu anggota dari kelompok usaha yang sudah ada. Ada juga keinginan dari anggota kelompok mandiri mendirikan kelompok baru maupun usaha baru tentunya berangkat dari dari pengalaman yang telah diperoleh dari kelompok sebelumnya. Dengan program yang ada dari pemerintah yang disampaikan kepada kami maka dukungan atas program akan terus ada. Secara materi atau prmodalan kami memang kurang mampu, tapi kami punya tenaga, pengalaman, informasi dan yang penting kami bisa memberikan masukan-masukan berkait dengan pelaksanaan program desa mandiri pangan”.
2. “Untuk identifikasi awal atau pendataan awal desa mandiri pangan memang masih difokuskan pada 40 kelompok usaha dengan anggota masyarakat miskin, mungkin ini yang dikeluhkan walaupun nantinya masyarakat miskin lain akan mendapatkan perguliran namun sentuhannya akan sangat berbeda dibandingkan dengan penerima manfaat pada tahap awal”.
3. “Kita pada prinsipnya cocok dengan program desa mandiri pangan namun memang perlu pengembangan lebih lanjut dengan masukan dan saran dari masyarakat dan kelompok, contoh kecil bahwa muntuk sebagai desa kerajinan untuk penjualan kerajinan bukan kita secara langsung yang mendapatkan manfaat dari penjualan produk, ini yang akan kita capai dimasa yang akan datang. Sebenarnya dalam jumlah yang terbatas bisa dikembangkan tentunya dengan usulan-usulan tambahan kegiatan dan dana tentunya dengan pengawasan yang lebih perlu ditingkatkan sebagai kontrol jalannya kegiatan” .

1.6

Nama Responden : Sujilah

Kedudukan dalam Masyarakat : Masyarakat
Waktu Wawancara : Rabu, 20 Agustus 2008 jam 15.30 s/d 16.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Sujilah
Intisari Hasil Wawancara :

1. *" Untuk dana yang ada selama ini lumayan bisa untuk peningkatan usaha, namun selanjutnya kedepan kebutuhan dana akan besar karena permintaan barang kerajinan cukup selama ini diperkirakan besar karena misalnya untuk kerajinan adanya sampel-sampel untuk memenuhi konsumen yang semakin berkembang"*

1.7

Nama Responden : Suptandar
Kedudukan dalam Masyarakat : Masyarakat
Waktu Wawancara : Jumat, 22 Agustus 2008 14.00 s/d 14.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Suptandar
Intisari Hasil Wawancara :

1. *"Dalam usul-usul pelaksanaan selama ini saya juga usulkan dan banyak juga yang diakomodasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan oleh kelompok lain artinya saya merasa program ini bisa menampung aspirasi masyarakat tidak hanya dari saya"*

1.8

Nama Responden : Ratno
Kedudukan dalam Masyarakat : Ketua RT 2
Waktu Wawancara : Jumat, 22 Agustus 2008 15.00 s/d 15.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah ketua RT 2
Intisari Hasil Wawancara :

1. *"Keterlibatan masyarakat termasuk anggota kelompok, dilandasi kejujuran masyarakat maka usulan-usulan yang sifatnya vokal mungkin tidak sampai namun masyarakat sangat merasakan adanya perbedaan manfaat desa mandiri pangan khususnya masalah pemasaran yang langsung dikelola oleh mandiri pangan. Perhitungannya selama ini kalau menjual sendiri kepasar ongkos transportnya"*

mahal kepasar misal untung Rp. 250 kali sekian tidak seberapa namun taranspornya bisa Rp. 10.000,- maka tidak efisien dan waktunya juga hilang bisa setengah hari”.

1.9

Nama Responden : Anton Purwanto
Kedudukan dalam Masyarakat : Karang taruna
Waktu Wawancara : Jumat, 22 Agustus 2008 15.45 s/d 16.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Anton Purwanto
Intisari Hasil Wawancara :

1. *”Tidak harus ada keikutsertaan langsung masyarakat semua, cukup beberapa orang dan dengan pengertian yang diinformasikan masyarakat sudah merasa terlibat dan ikut mendukung pelaksanaan program. Wajar jika ada satu dua yang mungkin tidak terima namun prosentasenya rendah tapi bisa memahami secara umum”.*

1.10

Nama Responden : Subandono
Kedudukan dalam Masyarakat : Pemuda (Karang Taruna)
Waktu Wawancara : Jumat, 22 Agustus 2008 16.30 s/d 17.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah
Intisari Hasil Wawancara :

1. *”Untuk pelaksanaan kegiatan kita melaksanakan sesuai aturan dengan kesepakatan kelompok dan masyarakat tanpa intervensi pemerintah secara jauh, walaupun dalam pembinaan lebih lanjut peran pemerintah selalu ada baik langsung maupun tidak langsung lewat pendamping”*

1.11

Nama Responden : Kelik

Kedudukan dalam Masyarakat : Lurah Desa
Waktu Wawancara : Senin, 25 Agustus 2008, jam 09.00 s/d 09.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Lurah Desa
Intisari Hasil Wawancara :

1. *“Program pembangunan sebaiknya menyatu utamanya dalam pengelolaannya ditingkat desa sehingga ditingkat desa akan memudahkan dan tidak menyulitkan warga dalam aplikasinya. Kita ditingkat desa berupaya untuk menyatukan program yang ada dan turun di desa namun ditingkat diatasnya masih berjalan sendiri-sendiri. Dukungan warga karena adanya jiwa sosial akan memudahkan dalam pengelolaan ditambah dengan tingkat pendidikan yang lumayan dan yang terpenting adalah pertanggungjawabannya yang baik maka akan mendapat dukungan dan ini akan berjalan lama”.*

1.12

Nama Responden : Jariyah
Kedudukan dalam Masyarakat : Warga
Waktu Wawancara : Senin, 25 Agustus 2008, jam 10.00 s/d 11.00 WIB
Tempat Wawancara : Lokasi peternakan puyuh
Intisari Hasil Wawancara :

1. *“Modal sangat tertolong dari usaha ternak puyuh maka saya mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- walaupun dalam hal jumlah dana yang diberikan bisa dikatakan kurang atau tanggung artinya sebenarnya dengan dana yang lebih besarsay bisa mngupayakan pengembangan usaha dan Insya Allah akan mampu mengembalikan karena dengan dana yang ada seiring dengan adanya kenaikan BBM akan terjadi kenaikan baik pada pakan maupun angkuan dan ini juga merepotkan saya”..*
2. *Sumber dana yang ada selama ini membingungkan karena kami mendapatkan modal dengan aturan yang berbeda-beda walaupun untuk satu usaha saya yaitu ternak puyuh, ada keinginan saya ingin dapat dana yang satu pintu daripada dibuat sendiri-sendiri sehingga dari misalnya saya dapat dana Rp. 500.000,- saya harus mengembalikan Rp. 100.000,- sebanyak 5 kali lebih baik mengembalikan Rp.*

500.000,- sekaligus selesai selama satu bulan”.

1.13

Nama Responden : M Suwardi
Kedudukan dalam Masyarakat : Kadus Muntuk
Waktu Wawancara : Senin, 25 Agustus 2008, jam 11.15 s/d 11.45 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Kadus
Intisari Hasil Wawancara :

1. *”Masyarakat disini sangat diuntungkan dengan program desa mandiri pangan karena program desa mandiri pangan ini dirasa sangat jelas baik dari tahapan awal sosialisasi sampai dengan pelaksanaan dan masyarakat ikut dilibatkan langsung dalam berbagai kegiatan termasuk juga ada kontrol. Penjelasan memang sangat perlu pada saat akan diadakan kegiatan, dan akan sangat efektif lagi penjelasan apabila penjelasan di tiap dusun dengan model perwakilan yang akan menyampaikan langsung dan tanggungjawab moral yang mewakili akan menginformasikan lebih lanjut ke masyarakat”.*

1.14

Nama Responden : Suparmi
Kedudukan dalam Masyarakat : Kelompok PKK
Waktu Wawancara : Selasa, 26 Agustus 2008 jam 09.00 s/d 09.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah ibu Suparni
Intisari Hasil Wawancara :

1. *”Memang banyak sih pelatihan yang telah dilakukan, namun yang kami rasakan masih kurang terutama pelatihan menyangkut perempuan kaitannya dengan ketrampilan keluarga, bagaimana perempuan mencari nafkah tambahan karena kebanyakan perempuan disini pendidikan masih kurang, paling-paling tamat SMA untuk anak sekarang semuran saya maksimal tamat SMP, pelatihan yang sekarang cenderung teknis dan administrasi, sementara masih kita perlukan pelatihan terkait berwirausaha, mendidik anak, kesehatan dan penatalaksanaan keluarga khususnya*

bagaimana memberdayakan perempuan atau ibu-ibu untuk bisa berusaha membantu ekonomi keluarga, yang saya rasakan mandiri pangan ini harusnya dari keluarga kan tidak terlepas dari peran ibu-ibu”.

2. *”Pendanaan desa mandiri pangan dari pusat maupun daerah, namun kami diharapkan dalam pengelolaan tetap satu pintu, karena kalau sendiri-sendiri merepotkan”.*
3. *”Kami dari PKK dalam penyusunan awal pelaksanaan maupun evaluasi dilibatkan secara aktif, banyak usulan-usulan kami yang diterapkan menjadi kegiatan di desa mandiri pangan yang paling menanjol adalah program makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui yang menjadi salah satu kegiatan yang cukup berhasil dan telah dilaksanakan di desa muntuk”.*

1.15

Nama Responden : Lilik
Kedudukan dalam Masyarakat : Tokoh Masyarakat
Waktu Wawancara : Selasa, 26 Agustus 2008 jam 09.30 s/d 10.00 WIB
Tempat Wawancara : Lokasi rumah Pak Lilik
Intisari Hasil Wawancara :

1. *”Memang benar Desa Muntuk merupakan desa miskin dalam arti jumlah KK miskinnya banyak dan penghidupan penduduknyapun masih terbelakang baik dalam penghasilan maupun pendidikan. Bagaimana akan maju jika program-program yang ada atau datang dari pusat kadang tidak mempertimbangkan kondisi penduduk”.*
2. *”LKD (Lembaga Keuangan Desa) merupakan lembaga pengelola keuangan di Desa Muntuk merupakan pusat manajemen, pengelolaan dana, target keanggotaan termasuk sumber dana akhirnya merupakan ukuran perkembangan desa mandiri pangan di Desa Muntuk. Sampai saat ini LKD masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari sumber dana yang ada baik APBN maupun APBD karena sampai dengan tahun ketiga ini masih banyak KK miskin yang belum bisa terentaskan. Tapi kami tetap optimis keberhasilan desa mandiri pangan dimasa datang akan terjadi dengan catatan masih ada dukungan dari pendamping, tim pangan desa dan dukukungan dari instansi teknis termasuk adanya lembaga perbankan yang bisa mensupport LKD Muntuk. Ini semua untuk keberlanjutan pembangunan di Desa*

Muntuk”.

1.16

Nama Responden : Warsono
Kedudukan dalam Masyarakat : Tokoh Masyarakat
Waktu Wawancara : Selasa, 26 Agustus 2008 jam 10.30 s/d 11.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah tokoh masyarakat
Intisari Hasil Wawancara :

1. *”Perencanaan dan pelaksanaan desa mandiri pangan sudah disampaikan, setahu saya penetapan desa secara langsung ditentukan dari pusat di Desa Muntuk ini jadi kita langsung menjalani sesuai dengan petunjuk baik dari aparat, pendamping dan bapak-bapak baik dari kabupaten maupun propinsi”.*
2. *”Ada kecenderungan bahwa berkaitan dengan program sebenarnya masyarakat sangat mendukung namun dari banyak kegiatan masyarakat cenderung mendahulukan kegiatan berkaitan dengan pembangunan fisik karena hasilnya langsung kelihatan, sementara untuk kegiatan lain memang masih memerlukan upaya yang lebih terutama penjelasan yang terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat apalagi menyangkut pemanfaatan dana yang ada”.*

1.17

Nama Responden : Emi
Kedudukan dalam Masyarakat : Pemuda (Karang Taruna)
Waktu Wawancara : Selasa, 26 Agustus 2008 jam 11.45 s/d 12.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Emi
Intisari Hasil Wawancara :

1. *“Saya kelompok afinitas yang benar-benar tumbuh dan diawali dari adanya program desa mandiri pangan, usaha kami adalah perikanan lele. Diawali dengan gempa bumi besar di DIY mental kami sempat turun atau perekonomian kami memburuk, dengan adanya mandiri pangan memacu semangat kami menjadi naik bagaimana mencari usaha yang menguntungkan. Kami punya ide bagaimana lahan kita kita jadikan kolam yang sebelumnya lahan sawah namun kurang menguntungkan dari segi pendapatannya. Pertama kali kita buat kolam pada tahap persiapan satu kolam*

kemudian setahun saya mendapat dana 3 juta kami kembangkan usaha walaupun kami tidak tahu secara menyeluruh budidaya perikanan/lele bahkan kami gagal sebanyak 5 kali nah kami mohon pada pendamping bagaimana mengatasinya dan akhirnya saya dimagangkan ke Kab. Kulon Progo oleh mandiri pangan setelah itu tahap demi tahap kami sampai tahun ke 3 saya sudah punya 11 kolam karena belajar dari pengalaman dan ada kelompok yang bisa kita ajak kembangkan menjadi kelompok Mergo Lele dengan anggota 22 orang dan alhamdulillah kemarin ikut lomba tingkat propinsi menjadi juara harapan II. Sampai saat ini saya malah menjadi pengumpul dengan bantuan pemuda desa maka bisa berhasil”.

2. *“Peran pendamping sangat penting dan berpengaruh, yang saya alami dan rasakan adalah tempat konsultasi dan berkeluh kesah atas permasalahan yang saya alami. Pernah saya memasukan benih ikan lele sebanyak 11.000 karena saya tidak tahu apa masalahnya kok mati semua padahal saya habis magang. Oleh pendamping air kolam saya dilabkan ternyata mengandung potasium yang menyebabkan matinya lele dikolam saya, sejak itu saya jadi tahu bahwa sumber air kolam dari sungai tidak baik dan beralih ke sumber mata air. Disamping tanggap dan aktif, pendamping juga sumber informasi tentang jalannya program dari awal sampai dengan berjalan”.*
3. *“Saya baru saja pulang dari pelatihan terkait budidaya perikanan yang diadakan ditingkat kabupaten, ini juga dikoordinasikan oleh fasilitator desa mandiri pangan disamping itu juga dulu saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen secara umum bagaimana berusaha untuk mandiri dan berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada termasuk upaya mengatasi permasalahan yang muncul”.*
4. *“Sumber pendanaan dari APBN dan APBD dan yang saya paling senang dari program desa mandiri pangan ini adalah adanya kawalan dan pembinaan jadi dibandingkan dengan misalnya bank lebih baik karena kalau dari bank tanpa kawalan jika ada masalah atas usaha kita maka kita sendiri yang memecahkan sementara pada program desa mandiri pangan ada solusi dari pendamping ada juga ada pembinaan-pembinaan untuk keberlanjutan usaha kita”.*

1.18

Nama Responden : Suyadi

Kedudukan dalam Masyarakat : Masyarakat

Waktu Wawancara : Selasa, 26 Agustus 2008 jam 13.00 s/d 14.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Suyadi

Intisari Hasil Wawancara :

1. " Yang saya pahami terkait dengan desa mandiri pangan ini aturannya sudah ada dan pelaksanaannya ditingkat masyarakat berjalan dengan mekanisme yang ditentukan oleh masyarakat dan selama ini berjalan. Peranan pemerintah jelas ada tapi saya melihatnya peranan itu tidak begitu banyak".
2. "Bahwa dalam hal pelaksanaan program apa yang saya rasakan prakteknya lebih berkembang dibandingkan dengan ketika disosialisasikan awal, banyak kegiatan yang dipacu oleh karena masukan masyarakat, partisipasi aktif masyarakat, bimbingan dan pembinaan petugas dan aparat sehingga penerimaan masyarakat atas program sangat baik. Musyawarah sebagai forum pertemuan masyarakat dilakukan secara rutin atau pada setiap awal kegiatan hasilnya pun dikomunikasikan kembali. Ketika melangkah baik oleh aparat maupun oleh kelompok pelaksana hasilnya juga kita laporkan dan dievaluasi secara bersama pemantauan juga dilaksanakan oleh kita termasuk dari petugas mulai yang paling rendah di desa kemudian kabupaten, provinsi dan pusat."

1.19

Nama Responden : Jaelani

Kedudukan dalam Masyarakat : Pemuka Masyarakat

Waktu Wawancara : Selasa, 26 Agustus 2008 jam 15.00 s/d 15.15 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Jaelani

Intisari Hasil Wawancara :

1. *"Ada kecenderungan penerima manfaat desa mandiri pangan mengutamakan untuk usaha yang mengutamakan pendapatan, dikhawatirkan justru untuk pemanfaatan potensi keluarga yang memanfaatkan pekarangan guna konsumsi keluarga menjadi berkurang dan tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh kelompok masyarakat, disini perlunya kawalan dan penjelasan yang terus-menerus baik dari pendamping atau pelaksana tugas desa mandiri pangan"*.

1.20

Nama Responden : Suratman

Kedudukan dalam Masyarakat : Masyarakat

Waktu Wawancara : Selasa, 26 Agustus 2008 jam 15.30 s/d 16.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah

Intisari Hasil Wawancara :

1. *“Pelaksanaan program desa mandiri pangan dilaksanakan secara partisipatif dengan mempertimbangkan potensi masyarakat termasuk usulan-usulan dan permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga semua yang direncanakan dapat diaplikasikan walaupun disana sini ada permasalahan namun karena merupakan kesepakatan bersama sehingga pemecahan masalah menjadi mudah dan tidak terkendala. Ditambah dengan peran fasilitator dalam hal ini pemerintah yang berperan dalam setiap langkah kegiatan utnk mendorong dan memacu jalannya kegiatan”*.

